



LAPORAN AKHIR
PENYUSUNAN PEDOMAN
MANAJEMEN DATA SPBE
KABUPATEN POSO



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Sasaran	3
1.4. Ruang Lingkup Manajemen Data	4
BAB II MANAJEMEN ARSITEKTUR DATA	5
2.1. Penyusunan dan Penetapan Arsitektur Data	5
2.2. Penyebarluasan Arsitektur Data SPBE.....	6
2.3. Reviu Arsitektur Data SPBE	6
BAB III MANAJEMEN DATA INDUK DAN DATA REFERENSI.....	7
3.1. Perencanaan Data Induk dan Data Referensi.....	8
3.2. Pengumpulan Data.....	9
3.2.1. Metadata Kegiatan	10
3.2.2. Metadata Variabel.....	10
3.2.3. Metadata Indikator	11
3.3. Pemeriksaan Data	12
3.4. Penyebarluasan Data	14
3.5. Pembaruan Data	15
BAB IV MANAJEMEN BASIS DATA.....	17
4.1. Tahapan Manajemen Basis Data	18
4.2. Sistem Manajemen Basis Data	20
4.2.1. Kriteria.....	20
4.2.2. Spesifikasi.....	21
4.3. Sistem Data Warehouse	24
4.3.1. Topologi Sistem Data Warehouse	24
4.3.2. Spesifikasi Data Warehouse	26

BAB V MANAJEMEN KUALITAS DATA.....	30
BAB VI PETA JALAN MANAJEMEN DATA KABUPATEN POSO.....	34
BAB VII PENUTUP	37
LAMPIRAN	38
Lampiran 1. Format Metadata Kegiatan, Indikator dan Variabel Statistik Sektoral	38
Lampiran 2. Kuesioner FS3 (Formulir Rekomendasi BPS)	46
Lampiran 3. Arsitektur Data SPBE	57
Lampiran 4. Data Statistik Sektoral.....	80
L4-1. Sektor Pemerintahan.....	80
L4-2. Sektor Sosial Budaya	83
L4-3. Ekonomi.....	92
L4-4. Fisik/Infrastruktur.....	97
Lampiran 5. Data Prioritas.....	99
L5-1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Kabupaten Poso.....	99
L5-2. Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Poso	100
L5-3. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Program Pemerintah Daerah Kabupaten Poso.....	115
L5-4. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	153

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Struktur Baku Metadata Kegiatan Statistik.....	10
Tabel 2. Struktur Baku Metadata Variabel	11
Tabel 3. Struktur Baku Metadata Indikator	11
Tabel 4. Pengelompokan Data per Sektor	14
Tabel 5. Spesifikasi Sistem Manajemen Basis Data	22
Tabel 6. Spesifikasi Sistem Data Warehouse (Rekomendasi)	28
Tabel 7. Profil Kualitas Data.....	31
Tabel 8. Matriks Kualitas Data	32
Tabel 9. Peta Jalan Pelaksanaan Manajemen Data SPBE Kabupaten Poso	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Portal Satu Data Kabupaten Poso.....	15
Gambar 2. Jaringan Informasi Geospasial Nasional.....	19
Gambar 3. Alur Kerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial.....	19
Gambar 4. Konsep Data Warehouse.....	25
Gambar 5. Topologi Data Warehouse.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Poso, sebagai bagian dari Pemerintah Daerah di Indonesia, memiliki tanggung jawab untuk mendukung tercapainya pembangunan nasional yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dalam era transformasi digital, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dikenal sebagai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, mempercepat pengambilan keputusan berbasis data, serta memastikan integrasi dan interoperabilitas antar sistem pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pengelolaan data menjadi elemen krusial dalam mendukung implementasi SPBE. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik telah diterbitkan sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Peraturan ini menekankan pentingnya pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Di tingkat lokal, Kabupaten Poso menghadapi tantangan dalam pengelolaan data pemerintahan yang masih bersifat sektoral, kurang terintegrasi, dan belum sepenuhnya memenuhi standar Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Hal ini berdampak pada keterbatasan akses terhadap data berkualitas yang dibutuhkan untuk perumusan kebijakan pembangunan daerah, seperti dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Poso. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pedoman yang mengatur manajemen data SPBE secara sistematis dan selaras dengan regulasi nasional untuk memastikan data yang dihasilkan dapat digunakan secara optimal oleh berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Poso.

Penyusunan pedoman Manajemen Data SPBE untuk Kabupaten Poso ini bertujuan untuk menjamin tersedianya data yang berkualitas tinggi sebagai dasar pengambilan keputusan yang mendukung visi pembangunan daerah. Pedoman ini disusun dengan mengacu pada Arsitektur Data SPBE Nasional serta mempertimbangkan kebutuhan lokal, seperti karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi Kabupaten Poso. Dengan demikian, pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam melaksanakan pengelolaan data yang mencakup arsitektur data, data induk dan referensi, basis data, serta kualitas data, sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

Melalui pendekatan ini, Pemerintah Kabupaten Poso berkomitmen untuk meningkatkan tata kelola data yang efektif dan efisien, mendukung interoperabilitas antar sistem, serta memastikan ketersediaan data yang akurat dan mutakhir untuk kepentingan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dengan mengadopsi pedoman manajemen data ini, Kabupaten Poso tidak sekadar menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih maju. Pedoman ini akan menjadi katalis bagi terciptanya lingkungan yang mendukung inovasi, khususnya dalam pengembangan solusi berbasis data seperti analitik prediktif atau aplikasi layanan publik berbasis teknologi. Lebih dari itu, langkah ini menandai komitmen Kabupaten Poso untuk membangun fondasi yang kokoh dalam transformasi digital. Transformasi ini diharapkan dapat membawa pemerintahan daerah menuju tata kelola yang lebih efisien, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sekaligus menjadikan Kabupaten Poso sebagai contoh bagi daerah lain dalam memanfaatkan potensi data di era digital yang terus berkembang.

1.2. Maksud dan Tujuan

Pedoman Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Poso disusun sebagai acuan bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Poso dalam melaksanakan pengelolaan data pemerintahan yang terintegrasi, efektif, dan efisien. Pedoman ini dimaksudkan untuk menyelaraskan praktik pengelolaan data di tingkat daerah dengan ketentuan nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan demikian, pedoman ini menjadi panduan operasional bagi Pemerintah Kabupaten Poso untuk mendukung implementasi SPBE yang selaras dengan prinsip Satu Data Indonesia, guna mewujudkan tata kelola data yang berkualitas dan mendukung pembangunan daerah.

Penyusunan pedoman Manajemen Data SPBE Kabupaten Poso memiliki tujuan sebagai berikut:

1. **Menjamin Ketersediaan Data Berkualitas:** Memastikan tersedianya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan di Kabupaten Poso.
2. **Meningkatkan Pemahaman Kebutuhan Data:** Membantu perangkat daerah di Kabupaten Poso memahami kebutuhan data yang spesifik sesuai dengan karakteristik dan prioritas pembangunan lokal.
3. **Mengoptimalkan Pengelolaan Data:** Mendukung proses pengumpulan, penyimpanan, perlindungan, dan peningkatan kualitas data secara berkelanjutan agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh berbagai pemangku kepentingan.

4. **Mendukung Interoperabilitas Data:** Memfasilitasi pembagian dan penggunaan data antar sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Poso serta dengan instansi lain, sesuai dengan standar interoperabilitas yang ditetapkan.
5. **Mewujudkan Efektivitas Pembangunan Daerah:** Memberikan landasan data yang kuat untuk pengambilan keputusan berbasis fakta dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Poso sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi alat bantu strategis bagi Pemerintah Kabupaten Poso dalam menciptakan ekosistem data yang mendukung transformasi digital pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dalam pengelolaan data SPBE.

1.3. Sasaran

Pedoman Manajemen Data SPBE Kabupaten Poso disusun dengan sasaran sebagai berikut:

1. **Pemahaman Kebutuhan Data yang Jelas:** Perangkat daerah di Kabupaten Poso mampu mengidentifikasi dan memahami kebutuhan data yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, sehingga data yang dihasilkan relevan dan mendukung proses pengambilan keputusan.
2. **Tersedianya Data yang Terjamin Integritasnya:** Pemerintah Kabupaten Poso dapat mengumpulkan, menyimpan, melindungi, dan memastikan integritas data melalui sistem yang terstruktur, sehingga data tetap akurat, mutakhir, dan dapat dipercaya.
3. **Peningkatan Kualitas Data Berkelanjutan:** Terwujudnya proses pengelolaan data yang konsisten dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas data secara terus-menerus, sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
4. **Penggunaan Data yang Efektif dan Efisien:** Seluruh perangkat daerah di Kabupaten Poso dapat memaksimalkan penggunaan data untuk menghasilkan informasi yang bernilai tinggi, mendukung efektivitas pelayanan publik, dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah.
5. **Integrasi dan Interoperabilitas Data:** Terciptanya sistem data yang terintegrasi antar perangkat daerah di Kabupaten Poso serta mendukung interoperabilitas dengan sistem nasional, sehingga memudahkan pertukaran dan pemanfaatan data secara lintas sektoral.
6. **Kesesuaian dengan Arsitektur SPBE Nasional:** Pengelolaan data di Kabupaten Poso selaras dengan Arsitektur Data SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, sekaligus memperhatikan kebutuhan lokal dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Sasaran-sasaran ini diarahkan untuk membangun fondasi pengelolaan data yang kuat di Kabupaten Poso, sehingga dapat mendukung transformasi digital pemerintahan, meningkatkan akuntabilitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui layanan yang lebih baik dan berbasis data.

1.4. Ruang Lingkup Manajemen Data

Manajemen Data merupakan serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data, dan interoperabilitas data. Ruang lingkup manajemen data adalah sebagai berikut:

1. Arsitektur Data
2. Data Induk dan Data Referensi
3. Basis Data
4. Kualitas Data

BAB II

MANAJEMEN ARSITEKTUR DATA

Menurut Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data SPBE, Arsitektur Data adalah model yang mengatur dan menentukan jenis data yang dikumpulkan, disimpan, dikelola, dan diintegrasikan dalam SPBE. Manajemen Arsitektur Data adalah rangkaian proses untuk menetapkan dan menyebarluaskan komponen Arsitektur Data. Komponen utama dalam manajemen arsitektur data yaitu meliputi Spesifikasi Data dan Ketentuan Data. Spesifikasi Data terdiri atas format dan struktur baku untuk Data Induk dan Data Referensi, sedangkan Ketentuan Data mencakup tata cara perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebaran spesifikasi data.

Tujuan Manajemen Arsitektur Data adalah untuk: (1) Menyediakan data yang berkualitas tinggi; (2) Mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan data; serta (3) Merancang struktur dan rencana untuk memenuhi kebutuhan data saat ini dan kebutuhan data jangka panjang. Manajemen Arsitektur Data SPBE Tingkat Daerah juga sebagai perwujudan dari penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah.

Kegiatan Manajemen Arsitektur Data di Kabupaten Poso meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan Arsitektur Data SPBE tingkat daerah;
- b. penyebaran Arsitektur Data SPBE tingkat daerah; dan
- c. reviu Arsitektur Data SPBE tingkat daerah.

2.1. Penyusunan dan Penetapan Arsitektur Data

Penyusunan Arsitektur Data SPBE tingkat daerah di Kabupaten Poso dilaksanakan oleh Forum Satu Data Kabupaten Poso yang dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Poso sebagai Walidata utama. Proses penyusunan ini mengacu pada Arsitektur Data SPBE Nasional, Rencana Induk SPBE Nasional, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Poso, sehingga arsitektur yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan lokal sekaligus mendukung kerangka nasional. Untuk menjamin keselarasan dengan Arsitektur Data SPBE Nasional, penyusunan Arsitektur Data SPBE mengikuti aturan yang berlaku secara nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik. Arsitektur Data SPBE tingkat daerah ditetapkan oleh Bupati Poso melalui Keputusan Bupati, menjadi landasan resmi bagi pengelolaan data di Kabupaten Poso.

2.2. Penyebarluasan Arsitektur Data SPBE

Penyebarluasan Arsitektur Data SPBE tingkat daerah Kabupaten Poso dilakukan melalui Portal Satu Data Kabupaten Poso, yang dikelola oleh Dinas Kominfo Kabupaten Poso sebagai pusat informasi data daerah. Setiap Walidata di perangkat daerah memiliki tanggung jawab untuk mendukung proses penyebarluasan ini melalui sistem informasi internal masing-masing, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyebarluasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa Arsitektur Data SPBE dapat diakses dan dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk perangkat daerah, masyarakat, dan pihak lain yang berkepentingan, sehingga mendukung transparansi dan koordinasi dalam pengelolaan data di Kabupaten Poso.

2.3. Reviu Arsitektur Data SPBE

Reviu Arsitektur Data SPBE tingkat daerah Kabupaten Poso dilakukan sebagai bagian dari proses reviu terhadap Arsitektur SPBE Nasional, dengan koordinasi oleh Bappeda Kabupaten Poso melalui Forum Satu Data Kabupaten Poso. Reviu ini dilaksanakan pada paruh waktu pelaksanaan Arsitektur SPBE tingkat daerah, tahun terakhir pelaksanaan, atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, seperti saat terjadi perubahan prioritas pembangunan daerah atau regulasi nasional. Hasil dari reviu ini digunakan untuk memperbarui Arsitektur Data SPBE tingkat daerah, sehingga tetap relevan dan mendukung kebutuhan pengelolaan data serta pembangunan Kabupaten Poso dalam jangka panjang.

BAB III

MANAJEMEN DATA INDUK DAN DATA REFERENSI

Manajemen Data Induk dan Data Referensi di Kabupaten Poso merupakan bagian integral dari pengelolaan data dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Manajemen Data Induk dan Data Referensi dilaksanakan untuk menyediakan data yang:

1. sesuai struktur dan format baku yang ditentukan;
2. dapat dijadikan acuan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagipakaikan; serta
3. menghindari duplikasi.

Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia. Sementara itu, data referensi adalah komponen yang mendeskripsikan substansi data yang berupa spesifikasi dan kategorisasi, dan ketentuan mengenai data, serta mengintegrasikannya dengan domain arsitektur SPBE yang lain. Dalam data referensi terdapat Kode Referensi, yaitu tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.

Dengan demikian, Manajemen Data Induk dan Data Referensi menjadi fondasi untuk mendukung prinsip Satu Data Indonesia di tingkat daerah, memastikan data yang dihasilkan dapat dipercaya dan digunakan secara optimal untuk pembangunan daerah.

Pengelolaan Data Induk dan Data Referensi di Kabupaten Poso mencakup serangkaian kegiatan yang terdiri dari:

1. Perencanaan,
2. Pengumpulan,
3. Pemeriksaan,
4. Penyebarluasan, dan
5. Pembaruan.

Perencanaan dilakukan untuk menentukan jenis data yang diperlukan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, pengumpulan dilaksanakan untuk mengumpulkan data dari sumber yang sah, dan pemeriksaan bertujuan untuk memastikan kualitas serta kepatuhan data terhadap standar yang ditetapkan. Penyebarluasan memungkinkan data dapat diakses oleh pemangku kepentingan, sedangkan pembaruan dilakukan untuk menjaga data tetap relevan dan mutakhir. Kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan secara terkoordinasi untuk mendukung pengelolaan data yang terintegrasi di Kabupaten Poso.

3.1. Perencanaan Data Induk dan Data Referensi

Perencanaan data induk dan data referensi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan data dan menghindari duplikasi data serta sebagai acuan dalam pelaksanaan pengumpulan data. Dalam proses perencanaan data, setiap Produsen Data (Perangkat Daerah/Desa/Kelurahan/Lembaga Lainnya) membuat daftar data sebagai kebutuhan data daerah. Daftar data dibuat berdasarkan pemetaan kebutuhan data pemerintah daerah, arahan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dan disepakati dalam Forum Satu Data Kabupaten Poso. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Poso (Bappeda) sebagai Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten menetapkan Daftar Kebutuhan Data dan Data Prioritas melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

Kriteria data yang dikategorikan ke dalam Data Prioritas adalah sebagai berikut:

1. Mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD;
2. Mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;
3. Memenuhi kebutuhan program, kegiatan dan kebijakan yang mendesak.

Daftar data yang dibuat oleh Perangkat Daerah memuat produsen data untuk masing-masing data, satuan, cara pengumpulan data, pengkategorian prioritas atau non prioritas, untuk kebutuhan apa data tersebut dan apakah data boleh dipublikasi kepada umum atau hanya internal Pemerintah Daerah. Selanjutnya daftar data tersebut diserahkan kepada Walidata (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Poso) dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati.

Manajemen Data Induk dan Data Referensi dilaksanakan untuk menyediakan data yang:

1. sesuai struktur dan format baku yang ditentukan;
2. dapat dijadikan acuan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagipakaikan; serta
3. menghindari duplikasi.

Penentuan Data prioritas ditetapkan berdasarkan pada :

1. Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
2. Standar Pelayanan Minimal (SPM);
3. Indikator Kinerja dalam RPJMD;
4. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; dan
5. Rencana Strategis setiap Perangkat Daerah.

Dari penetapan indikator tersebut di atas, diidentifikasi menjadi Daftar Data Prioritas yang harus dikumpulkan oleh semua Produsen Data (Lampiran 5).

3.2. Pengumpulan Data

Setelah Daftar Data dibuat oleh masing-masing Perangkat Daerah, selanjutnya Perangkat Daerah melakukan pengumpulan data dan penyusunan metadatanya. Walidata Pendukung yang berkedudukan di setiap Perangkat Daerah merekap dan memeriksa data, mengklasifikasikan data sesuai dengan keterbukaan informasi publik, selanjutnya menyerahkan data kepada Walidata, baik melalui inputting data ke dalam sistem aplikasi maupun secara manual.

Dari setiap Daftar Data yang telah ditetapkan, harus disusun metadatanya. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.

Metadata sering disebut sebagai data tentang data atau informasi tentang informasi. Metadata mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen file/data tersebut dalam suatu basis data. Setiap data yang dikumpulkan wajib ada metadatanya. Manfaat metadata adalah sebagai berikut:

1. Pembina Data: menjadi alat bagi pengukuran tingkat kematangan penyelenggaraan statistik. Dengan adanya ukuran tersebut, pembina data dapat menentukan program pembinaan statistik yang tepat sasaran sesuai dengan tingkat kebutuhan;
2. Produsen Data: menghindari duplikasi kegiatan, meningkatkan efisiensi anggaran, peningkatan nilai organisasi karena tatakelola informasi yang baik, memudahkan seluruh unsur pimpinan dalam memahami indikator kinerjanya, dan menjaga kesinambungan data pada saat pergantian pengelola kegiatan/data;
3. Walidata: memudahkan dalam memahami dan mengelola data dan informasi sebagai investasi organisasi, dokumentasi tahapan pengolahan data, pengendalian mutu, definisi, penggunaan data, keterbatasan, dan sebagainya, serta mencegah kesalahan dalam penyampaian data;
4. Pengguna Data: dapat memudahkan dalam memahami data, mencegah kesalahan penggunaan dan interpretasi data, serta menjamin ketepatan dalam pemanfaatan data.

Metadata terdiri dari 3 jenis dengan masing-masing format yang berbeda, yaitu:

1. Metadata Kegiatan Statistik;
2. Metadata Variabel; dan
3. Metadata Indikator.

Formulir metadata mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik seperti tercantum dalam Lampiran 1. Penjelasan masing-masing jenis metadata tersebut adalah sebagai berikut:

3.2.1. Metadata Kegiatan

Kegiatan statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya Sistem Statistik Nasional. Kegiatan statistik ini bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir guna mendukung pembangunan nasional. Data statistik dapat diinterpretasikan dengan benar dan tepat jika karakteristik atau atribut dari data tersebut didefinisikan dalam bentuk metadata statistik. Metadata kegiatan adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyelenggaraan kegiatan statistik.

Tabel 1. Struktur Baku Metadata Kegiatan Statistik

No	Struktur Metadata Kegiatan
1	Nama Kegiatan Statistik
2	Identifikasi Penyelenggara
3	Tujuan Pelaksanaan
4	Periode Pelaksanaan
5	Cakupan Wilayah
6	Rancangan Pengumpulan Data/Metodologi
7	Rancangan Pengolahan Data
8	Level Estimasi
9	Analisis

3.2.2. Metadata Variabel

Variabel didefinisikan sebagai konsep yang dapat diukur dan memiliki variasi hasil pengukuran. Variabel statistik merupakan variabel yang digunakan pada kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga. Setiap variabel memiliki konsep dan definisi yang perlu dipahami terlebih dahulu sebelum menggunakan variabel tersebut. Data yang dikumpulkan dari variabel-variabel kegiatan statistik akan menghasilkan angka-angka statistik maupun indikator. Variabel didefinisikan sebagai konsep yang dapat diukur dan memiliki variasi hasil pengukuran. Variabel statistik merupakan variabel yang digunakan pada kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga.

Tabel 2. Struktur Baku Metadata Variabel

No	Struktur Metadata Variabel
1	Kode Kegiatan
2	Nama Variabel
3	Alias
4	Konsep
5	Definisi
6	Referensi Pemilihan
7	Referensi Waktu
8	Tipe Data
9	Domain Value
10	Kalimat Pertanyaan
11	Apakah Variabel dapat Diakses Umum

3.2.3. Metadata Indikator

Metadata indikator adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dasar terbentuknya suatu indikator, interpretasi terhadap suatu indikator, variabel pembentuk indikator, rumus yang digunakan dalam metode penghitungan indikator, dan informasi lain yang perlu untuk diketahui dalam upaya memberikan pemahaman yang tepat dalam menggunakan nilai indikator yang dihasilkan.

Tabel 3. Struktur Baku Metadata Indikator

No	Struktur Metadata Indikator
1	Nama Indikator
2	Konsep
3	Definisi
4	Interpretasi
5	Metode/Rumus Penghitungan
6	Ukuran
7	Satuan
8	Klasifikasi
9	Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan
10	Nama Indikator Pembangunan
11	Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan
12	Nama Variabel Pembangunan
13	Level Estimasi
14	Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Penyusunan metadata dilakukan oleh Produsen Data, dengan pendampingan dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian serta Badan Pusat Statistik Kabupaten Poso dan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan. Pendampingan penyusunan metadata dilakukan secara bertahap, diawali dengan sosialisasi tentang metadata, desk penyusunan metadata pertama dan kedua, serta desk ketiga jika diperlukan. Selain itu juga dilakukan rapat koordinasi dalam penyusunan metadata statistik sektoral.

Dalam proses pengumpulan data statistik sektoral, terdapat 4 cara yaitu:

1. Sensus;
2. Survei;
3. Kompilasi produk administrasi; dan
4. Cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi.

Untuk pengumpulan data dengan metode survei, baik dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga lain wajib melaporkan kegiatan statistik tersebut kepada BPS. Selanjutnya BPS akan memberikan rekomendasi yang menyatakan kegiatan tersebut layak atau tidak untuk dilanjutkan. Tata cara pemberian rekomendasi pada kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh pemerintah mengacu pada Panduan Rekomendasi Kegiatan Statistik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, penyelenggara survei statistik sektoral wajib memberitahukan rencana penyelenggaraan surveinya kepada BPS, mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS, dan menyerahkan hasil penyelenggaraan survei yang dilakukannya kepada BPS. Pemberitahuan rancangan penyelenggaraan survei statistik sektoral kepada BPS dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan statistik tidak terjadi duplikasi penyelenggaraan survei dan hasil kegiatan statistik sektoral tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal serta dalam rangka menyusun metadata statistik sektoral yang dapat diakses oleh semua pihak.

Penyampaian pemberitahuan penyelenggaraan survei statistik sektoral dilakukan dengan menggunakan kuesioner FS3 yang dapat diperoleh dari kantor BPS terdekat ataupun dengan mengakses website Sistem Informasi Rujukan Statistik BPS dengan alamat <http://sirusa.bps.go.id>. Kuesioner FS3 terdapat dalam Lampiran 2.

3.3. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan Data Induk dan Data Referensi di Kabupaten Poso merupakan tahap kritis untuk menjamin kualitas data sebelum digunakan secara resmi. Proses ini dilakukan oleh Forum Satu Data Kabupaten Poso, yang melibatkan Walidata dan Pembina Data, seperti Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, untuk memverifikasi bahwa data yang dikumpulkan memenuhi standar yang ditetapkan.

Pemeriksaan mencakup tiga aspek utama: kesesuaian dengan struktur dan format baku, seperti memastikan data kependudukan menggunakan format standar Nomor Induk Kependudukan (NIK); pencegahan duplikasi, misalnya menghindari entri ganda untuk data aset daerah; dan kecocokan dengan Daftar Data yang telah direncanakan untuk tahun berikutnya, seperti data yang relevan dengan target pembangunan infrastruktur.

Mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2020, pemeriksaan ini juga memastikan bahwa data memenuhi prinsip Satu Data Indonesia, yaitu akurat, mutakhir, dan terpadu. Di Kabupaten Poso, pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan kolaboratif, di mana setiap perangkat daerah mempresentasikan data yang telah dikumpulkan dalam rapat Forum Satu Data untuk mendapatkan masukan dan validasi. Data yang telah lolos pemeriksaan disepakati dalam Forum dan disampaikan oleh Bappeda Kabupaten Poso kepada Bupati Poso untuk ditetapkan melalui Keputusan Bupati, memastikan bahwa hanya data berkualitas tinggi yang digunakan sebagai acuan resmi dalam SPBE Kabupaten Poso.

Walidata melakukan pemeriksaan data baik melalui sistem ataupun manual dengan tahapan:

1. Penerimaan;
2. Pengelompokan;
3. Penyuntingan;
4. Penyandian; dan
5. Perekaman/penyimpanan data.

Selanjutnya data diverifikasi dan validasi oleh Walidata sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia, yaitu Standar Data, Metadata, Kode Referensi dan Interoperabilitas. Apabila data tidak sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia, maka dikembalikan kepada Perangkat Daerah yang mengumpulkan data tersebut untuk diperbaiki sesuai hasil pemeriksaan. Apabila data tersebut sudah sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia, maka Walidata melakukan approval pada Sistem Aplikasi dan penyebarluasan melalui Portal Open Data Kabupaten Poso.

Data Prioritas yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data juga diperiksa oleh Walidata, dan diperiksa kembali oleh Pembina Data. Hasil pemeriksaan Pembina Data, disampaikan oleh Walidata kepada Pembina Data. Apabila tidak sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, maka dikembalikan kepada Produsen Data untuk diperbaiki.

Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data dikelompokkan per sektor, yaitu sebagai berikut.

Tabel 4. Pengelompokan Data per Sektor

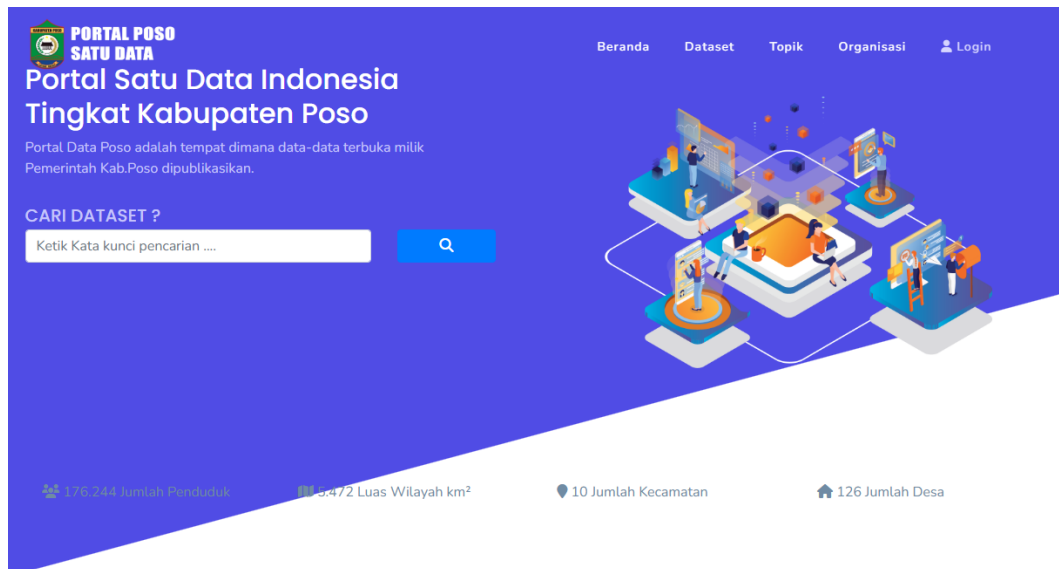
No	Sektor	Perangkat Daerah
1	Sosial Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Sosial 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 8. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 10. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Ketahanan Pangan 2. Dinas Pertanian 3. Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan 4. Dinas Pariwisata 5. Dinas Pemuda dan Olahraga 6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7. Dinas Perikanan dan Kelautan
3	Fisik/Infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. Dinas Perhubungan
4	Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat Daerah 2. Sekretariat Dewan 3. Inspektorat 4. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 5. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah 6. Badan Keuangan dan Aset Daerah 7. Badan Pendapatan Daerah 8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 10. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

3.4. Penyebarluasan Data

Penyebarluasan Data Induk dan Data Referensi di Kabupaten Poso dilakukan untuk memastikan bahwa data yang telah ditetapkan dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan. Proses ini dikelola oleh Dinas Kominfo Kabupaten Poso melalui Portal Satu Data Kabupaten Poso, sebuah platform digital yang dirancang untuk menyediakan akses terpusat ke data resmi daerah. Setiap Walidata di perangkat daerah bertanggung jawab untuk mengunggah data yang telah ditetapkan ke portal ini, seperti

data jumlah penduduk per kecamatan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau data jaringan irigasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Penyebarluasan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, yang menekankan bahwa data harus mudah diakses dan dibagi-pakaikan antar instansi untuk mendukung interoperabilitas.

Di Kabupaten Poso, portal ini juga memungkinkan masyarakat dan sektor swasta untuk mengakses data publik, seperti data potensi ekonomi lokal, guna mendorong inovasi dan partisipasi dalam pembangunan. Untuk mendukung aksesibilitas, Bappeda menyelenggarakan pelatihan bagi perangkat daerah tentang penggunaan portal dan memastikan bahwa data disajikan dalam format yang mudah dipahami, seperti tabel atau visualisasi. Dengan penyebarluasan yang efektif, Kabupaten Poso dapat meningkatkan transparansi, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, dan memperkuat koordinasi antar sektor.



Gambar 1. Portal Satu Data Kabupaten Poso

3.5. Pembaruan Data

Pembaruan Data Induk dan Data Referensi di Kabupaten Poso dilakukan untuk menjaga relevansi dan aktualitas data sesuai dengan dinamika pembangunan daerah. Proses ini dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Poso melalui Forum Satu Data Kabupaten Poso, dengan melibatkan Walidata dan Pembina Data untuk mengevaluasi data yang ada. Pembaruan dilakukan secara berkala, misalnya setiap tahun untuk data kependudukan atau setiap triwulan untuk data ekonomi, atau sewaktu-waktu jika terjadi perubahan signifikan, seperti revisi kode wilayah akibat pemekaran desa atau perubahan prioritas pembangunan akibat bencana alam.

Mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2020, pembaruan memastikan bahwa data tetap selaras dengan Kode Referensi nasional dan memenuhi standar interoperabilitas. Di Kabupaten Poso, proses ini juga mempertimbangkan kebutuhan lokal, seperti pembaruan data fasilitas kesehatan untuk mendukung penanganan pandemi atau data produksi pertanian untuk memantau ketahanan pangan. Data yang telah diperbarui melalui proses pemeriksaan ulang di Forum Satu Data, kemudian ditetapkan kembali oleh Bupati Poso dan disebarluaskan melalui Portal Satu Data Kabupaten Poso. Dengan pembaruan yang konsisten, Kabupaten Poso dapat memastikan bahwa Data Induk dan Data Referensi selalu mencerminkan kondisi terkini, mendukung pengelolaan pemerintahan yang responsif dan efektif.

BAB IV

MANAJEMEN BASIS DATA

Basis data adalah kumpulan data terorganisir yang dapat diakses, dikelola, dan diperbarui secara efisien. Desain basis data yang baik sangat penting untuk memastikan keakuratan, integritas, dan konsistensi data.

Manajemen Basis Data adalah suatu pendekatan sistematis dalam mengelola dan mengatur data dalam suatu organisasi. Hal ini melibatkan perencanaan, implementasi, pemeliharaan, dan optimalisasi basis data untuk mendukung kebutuhan organisasi secara efektif dan efisien.

Sistem Manajemen Basis Data merupakan perangkat lunak yang menyediakan antarmuka antara pengguna, aplikasi, dan basis data. Fungsi utama Sistem Manajemen Basis Data meliputi pengelolaan akses data, keamanan, pemulihan bencana, dan optimalisasi kinerja.

Manajemen Basis Data dilaksanakan untuk menyediakan Basis Data yang:

1. Menjamin penyimpanan Data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagipakaikan di Pusat Data Nasional;
2. Menjamin ketersediaan akses Data yang terus menerus; dan
3. Menjaga keamanan Data dari akses yang tidak sesuai ketentuan tata kelola Data atau peraturan perundangundangan terkait pengelolaan Data.

Prinsip Manajemen Basis Data yang baik, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Konsistensi Data**
Mengutamakan konsistensi data untuk memastikan bahwa informasi yang disimpan tetap akurat dan sesuai dengan aturan bisnis.
2. **Keamanan Data**
Melibatkan kontrol akses yang ketat, enkripsi data, dan pemantauan keamanan untuk melindungi informasi dari akses yang tidak sah.
3. **Ketersediaan Data**
Menjamin ketersediaan data yang optimal, sehingga pengguna dapat mengakses informasi yang mereka butuhkan kapan saja.
4. **Performa Basis Data**
Mengoptimalkan kinerja basis data melalui pemilihan indeks yang tepat, tuning query, dan pemantauan kinerja secara teratur.

4.1. Tahapan Manajemen Basis Data

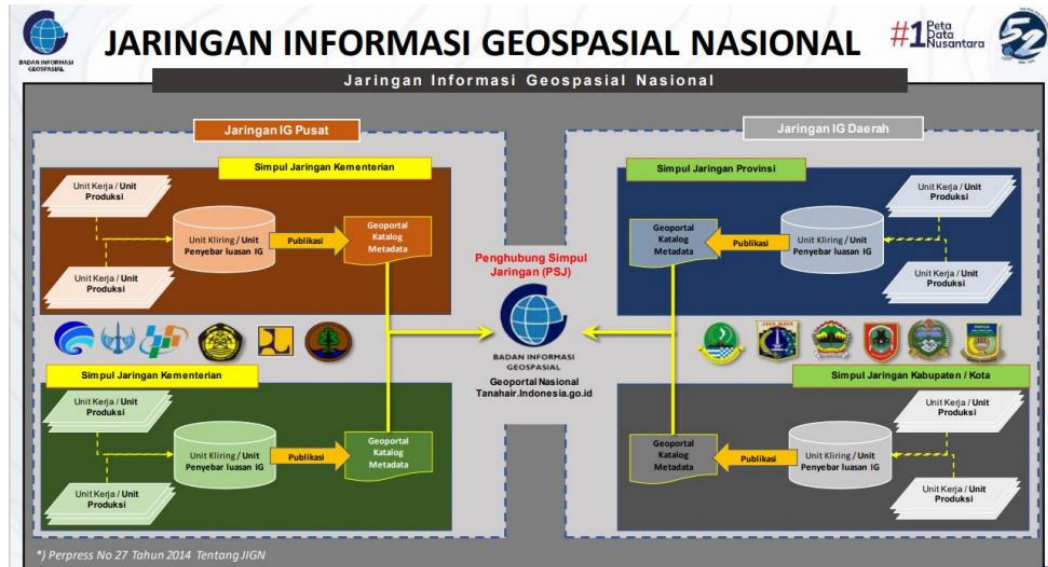
Tahapan Manajemen Basis Data meliputi:

1. Perencanaan
Perencanaan melibatkan identifikasi kebutuhan data organisasi, pemilihan model basis data yang sesuai, dan perencanaan struktur basis data. Rencana ini juga harus mempertimbangkan keamanan, integritas, dan skalabilitas.
2. Desain
Desain basis data melibatkan pembuatan skema basis data, pemilihan indeks, dan perancangan entitas serta hubungan antar entitas. Desain yang baik membantu meningkatkan efisiensi dan konsistensi data.
3. Implementasi
Implementasi melibatkan penerapan desain basis data ke dalam perangkat lunak dan hardware. Ini mencakup pembuatan tabel, indeks, dan prosedur penyimpanan data.
4. Operasi dan Pemeliharaan
Operasi dan pemeliharaan melibatkan pengelolaan sehari-hari basis data, pemantauan kinerja, dan pembaruan keamanan. *Database Administrator* (DBA) bertanggung jawab untuk memastikan integritas dan ketersediaan data.
5. Pemulihan dan Manajemen Bencana
Pemulihan dan manajemen bencana mencakup perencanaan untuk situasi darurat, backup rutin, dan pemulihan data setelah bencana. Tindakan ini penting untuk menjaga kelangsungan bisnis.

Tahapan Manajemen Basis Data tersebut di atas, dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan kegiatan Manajemen Basis Data seperti:

1. Mendefinisikan kebutuhan Walidata dan Produsen Data untuk Basis Data;
2. Mengelola Basis Data di Pusat Data Nasional;
3. Melakukan pemeriksaan Basis Data untuk kesesuaian dengan prinsip Satu Data Indonesia;
4. Menyebarkan Basis Data melalui Portal Satu Data Indonesia;
5. Membuat cadangan dan distribusi Basis Data; dan
6. Merencanakan dan mengelola pembaruan Basis Data.

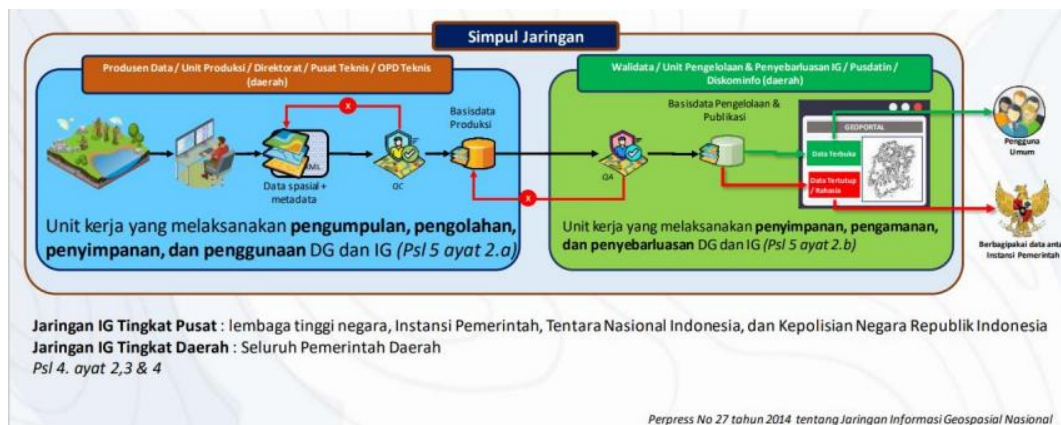
Manajemen basis data geospasial dalam aplikasi geoportal yang dikembangkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar 2. Jaringan Informasi Geospasial Nasional

Jaringan informasi geospasial pusat dan daerah akan terhubung dalam geoportal nasional yang dikembangkan oleh BIG. Jaringan Informasi Geospasial Pusat dikoordinasikan dan dikelola melalui Simpul Jaringan Kementerian dan Jaringan Informasi Geospasial Daerah dikoordinasikan dan dikelola melalui Simpul Jaringan Provinsi dan Simpul Jaringan Kabupaten.

Alur kerja simpul jaringan adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Alur Kerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial

4.2. Sistem Manajemen Basis Data

Dalam membangun sistem manajemen basis data, kriteria dan spesifikasi sangat penting untuk memastikan bahwa sistem tersebut memenuhi kebutuhan dan standar yang diinginkan oleh organisasi. Berikut adalah keterangan dan penjelasan terkait dengan kriteria dan spesifikasi dalam membangun sistem basis data:

4.2.1. Kriteria

Kriteria dalam membangun sistem

1. Ketepatan Fungsional (*Functional Accuracy*)

Menentukan sejauh mana sistem dapat menjalankan fungsi-fungsi dasar yang diharapkan. Kriteria ini mencakup kebutuhan spesifik dari sistem basis data, termasuk operasi penyimpanan dan pengambilan data, manajemen transaksi, dan fungsi-fungsi lainnya yang mendasar.

2. Kinerja (*Performance*)

Mengukur seberapa efisien dan cepat sistem dapat menangani beban kerja yang diberikan. Kriteria ini mencakup waktu respons, throughput, dan kemampuan sistem untuk memproses jumlah data tertentu dalam rentang waktu tertentu.

3. Kemudahan Penggunaan (*Usability*):

Menilai seberapa mudah sistem dapat digunakan oleh pengguna akhir. Kriteria ini melibatkan antarmuka pengguna, dokumentasi, dan kejelasan operasional agar pengguna dapat dengan mudah memahami dan menggunakan sistem.

4. Keamanan (*Security*):

Menjamin keamanan data dan sistem dari ancaman atau akses yang tidak sah. Kriteria ini melibatkan kontrol akses, enkripsi data, dan perlindungan terhadap ancaman keamanan seperti hacking atau malware.

5. Ketersediaan (*Availability*):

Menjamin ketersediaan sistem sepanjang waktu yang diperlukan. Kriteria ini mencakup up time sistem, cadangan data, dan strategi pemulihan bencana untuk memastikan ketersediaan data yang optimal.

4.2.2. Spesifikasi

Sistem Manajemen Basis Data yang dibangun ditentukan oleh:

1. Model Data (*Data Model*):

Menentukan struktur data yang akan digunakan, seperti model relasional atau NoSQL. Spesifikasi ini memberikan panduan tentang bagaimana data diorganisir dan dihubungkan dalam sistem.

2. Kapasitas Penyimpanan (*Storage Capacity*):

Menentukan jumlah maksimal data yang dapat disimpan dalam sistem. Spesifikasi ini melibatkan alokasi ruang penyimpanan dan pertumbuhan yang dapat diantisipasi.

3. Bahasa Query (*Query Language*):

Menentukan bahasa atau antarmuka yang akan digunakan untuk melakukan kueri terhadap data. Spesifikasi ini mencakup pemilihan SQL, NoSQL, atau bahasa kueri khusus lainnya.

4. Integrasi (*Integration*):

Menentukan kemampuan sistem untuk berintegrasi dengan aplikasi atau sistem lain. Spesifikasi ini mencakup antarmuka aplikasi (API), protokol komunikasi, dan format pertukaran data.

5. Skalabilitas (*Scalability*):

Menentukan kemampuan sistem untuk diperluas atau dikurangi sejalan dengan kebutuhan. Spesifikasi ini melibatkan kemampuan sistem untuk menangani pertumbuhan data dan beban pengguna.

6. Pemeliharaan dan Dukungan (*Maintenance and Support*):

Menentukan kebutuhan pemeliharaan rutin dan tingkat dukungan yang tersedia. Spesifikasi ini mencakup perangkat lunak pemantauan, pemeliharaan, dan tingkat dukungan teknis yang dapat diakses.

Daftar spesifikasi sistem manajemen basis data dari beberapa sistem manajemen basis data yang umum digunakan, dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5. Spesifikasi Sistem Manajemen Basis Data

Spesifikasi Database	MySQL	PostgreSQL	Oracle	Microsoft SQL Server
Model Data (Data Model)	Relasional	Relasional	Relasional	Relasional
Kapasitas Penyimpanan	Fleksibel, tergantung pada konfigurasi, versi MySQL, dan jenis penyimpanan. MariaDB 10.6 mendukung kapasitas penyimpanan hingga beberapa terabyte tergantung pada konfigurasi dan jenis penyimpanan yang digunakan.	Fleksibel, bergantung pada konfigurasi, versi, dan jenis penyimpanan. PostgreSQL 13 mendukung kapasitas penyimpanan hingga puluhan terabyte per tabel, dan batas ukuran basis data adalah 32 terabyte.	Fleksibel, tergantung pada konfigurasi, versi Oracle, dan jenis penyimpanan. Oracle Database 19c mendukung kapasitas penyimpanan hingga beberapa eksabyte	Fleksibel, tergantung pada konfigurasi, versi SQL Server, dan jenis penyimpanan. Contoh: SQL Server 2019 mendukung kapasitas penyimpanan hingga puluhan terabyte per basis data
Bahasa Query	SQL (Structured Query Language)	SQL (Structured Query Language), PL/PgSQL (Programming Language PostgreSQL)	SQL (Structured Query Language), PL-SQL (Programming Language Structured Query Language)	SQL (Structured Query Language), T-SQL (Transact-SQL)
Integrasi	Bisa diintegrasikan dengan berbagai bahasa pemrograman dan aplikasi.	Bisa diintegrasikan dengan berbagai bahasa pemrograman dan aplikasi. PostgreSQL menyediakan konektor dan antarmuka yang memungkinkan integrasi yang baik dengan berbagai platform.	Bisa diintegrasikan dengan berbagai bahasa pemrograman dan aplikasi. Oracle menyediakan driver dan konektor untuk berbagai bahasa pemrograman dan mendukung standar industri seperti JDBC dan ODBC	Bisa diintegrasikan dengan berbagai bahasa pemrograman dan aplikasi. SQL Server menyediakan driver dan konektor untuk berbagai bahasa pemrograman, serta dukungan untuk ODBC dan OLE DB
Skalabilitas	Mendukung skalabilitas vertikal dan horizontal. MariaDB mendukung replikasi, partisi tabel, dan sharding	Mendukung skalabilitas vertikal dan horizontal untuk menangani pertumbuhan data. PostgreSQL	Mendukung skalabilitas vertikal dan horizontal untuk menangani pertumbuhan data.	Mendukung skalabilitas vertikal dan horizontal untuk menangani

Spesifikasi Database	MySQL	PostgreSQL	Oracle	Microsoft SQL Server
	untuk meningkatkan kinerja dan kapasitas.	memiliki fitur partisi tabel, sharding, dan dukungan untuk replikasi untuk meningkatkan kinerja dan keandalan.	Oracle Database memiliki fitur partisi tabel, partisi indeks, dan kemampuan untuk menggabungkan dengan teknologi <i>cluster</i> dan <i>cloud</i> untuk skalabilitas yang lebih baik	pertumbuhan data. SQL Server memiliki fitur partisi tabel, kemampuan replikasi, dan fitur <i>Always On Availability Groups</i> untuk meningkatkan kinerja dan keandalan.
Pemeliharaan dan Dukungan	Menyediakan fitur pemeliharaan seperti <i>backup, restore</i> , pemantauan performa, serta dukungan dari komunitas dan penyedia layanan.	Menyediakan fitur pemeliharaan seperti <i>backup, restore</i> , pemantauan performa, serta dukungan dari komunitas dan penyedia layanan.	Menyediakan fitur pemeliharaan seperti <i>backup, restore</i> , pemantauan performa, serta dukungan penuh dari Oracle Corporation untuk penggunaan komersial.	Menyediakan fitur pemeliharaan seperti <i>backup, restore</i> , pemantauan performa, serta dukungan penuh dari Microsoft untuk penggunaan komersial.

4.3. Sistem Data Warehouse

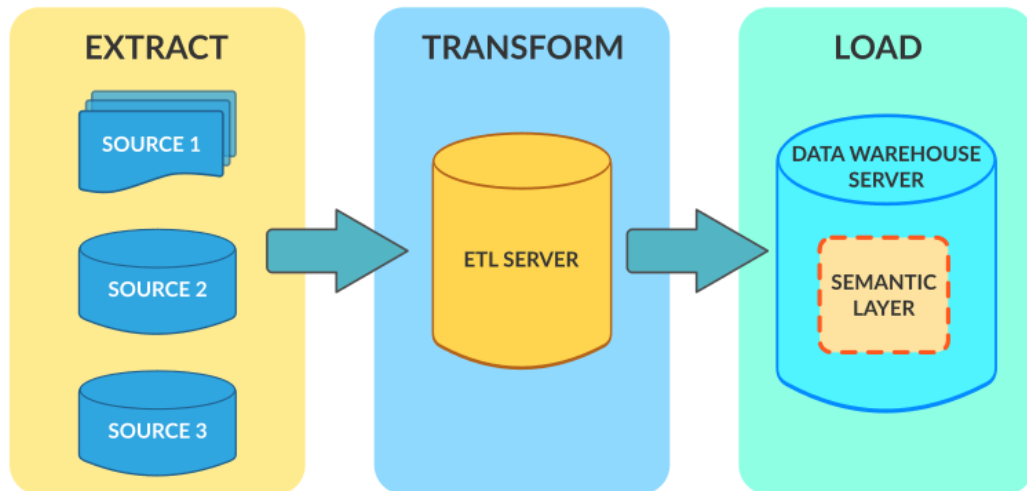
4.3.1. Topologi Sistem Data Warehouse

Salah satu cara dalam melakukan pengumpulan data berbasis teknologi informasi adalah dengan menerapkan konsep *data warehouse*. *Data Warehouse* atau Gudang Data adalah suatu konsep dan kombinasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang memfasilitasi organisasi untuk mengelola dan memelihara data historis yang diperoleh dari Sistem Informasi (aplikasi dan data) operasional. Pemakaian teknologi *Data Warehouse* hampir dibutuhkan oleh semua organisasi, tidak terkecuali Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. *Data Warehouse* memungkinkan integrasi berbagai macam jenis data dari berbagai macam sumber data dan sistem informasi. Hal ini menjamin mekanisme akses satu pintu bagi organisasi untuk memperoleh informasi serta melakukan analisis terhadapnya demi proses pemantauan dan pengambilan keputusan atau tindakan.

Secara fungsional, *Data Warehouse* dapat digunakan sebagai berikut:

1. Menyediakan integrasi dan gambaran lengkap (*total view*) dari data organisasi
2. Membuat data organisasi saat ini dan historis sebelumnya lebih mudah tersedia sebagai informasi yang dapat membantu dalam proses pemantauan dan pengambilan keputusan/tindakan.
3. Menyediakan informasi untuk proses pemantauan dan pengambilan keputusan/tindakan tanpa mengganggu sistem informasi operasional di organisasi karena *Data Warehouse* sudah terpisah sendiri
4. Memberikan konsistensi data dalam melakukan penyajian informasi bagi pemangku kepentingan di organisasi
5. Menyediakan sumber data yang interaktif dan fleksibel bagi informasi strategis, taktis dan operasional

Konsep dan teknologi *Data Warehouse* dapat digambarkan sebagai berikut:

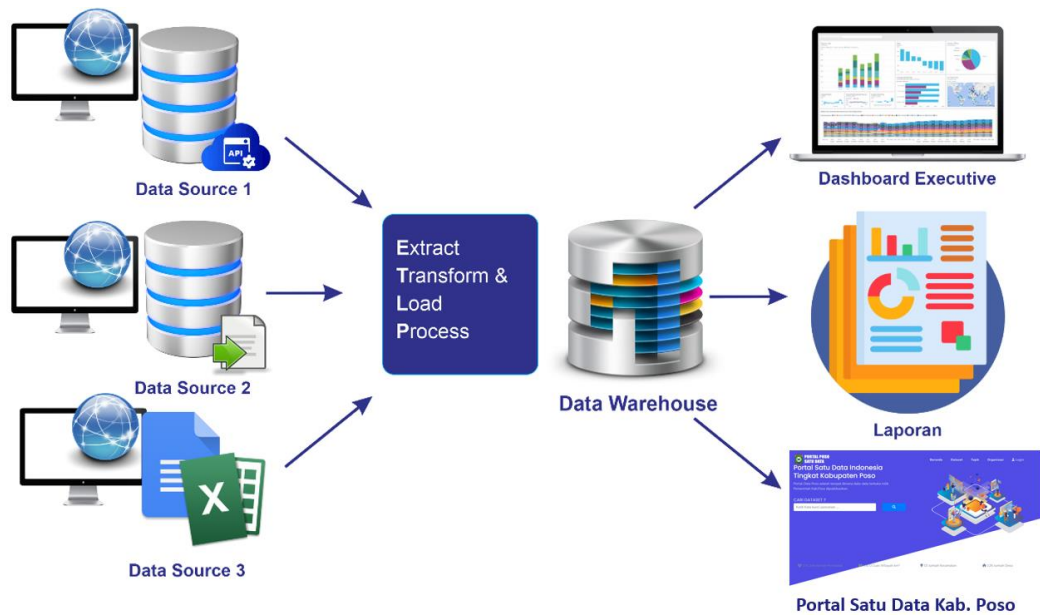


Gambar 4. Konsep Data Warehouse

Terdapat 3 (tiga) proses dalam memindahkan data dari berbagai sumber data operasional ke *Data Warehouse* yang disebut *Extract*, *Transform* dan *Load* (ETL). Ketiga proses ETL adalah sebagai berikut:

1. **Extract** : Proses ekstraksi untuk mengumpulkan data dari berbagai bagian di organisasi. Pada proses ini, data seringkali berasal dari berbagai jenis sumber dengan beragam format.
2. **Transform** : Proses transformasi untuk mengubah data yang diekstraksi ke dalam bentuk yang benar sehingga dapat ditempatkan ke dalam *Data Warehouse*. Proses ini sangat penting untuk memastikan data dari satu basis data atau aplikasi dapat dimanfaatkan oleh aplikasi dan basis data lainnya. Beberapa fungsi utama di sini termasuk:
 - Standarisasi data untuk serangkaian nilai pencarian yang konsisten
 - Pembersihan data melalui pemeriksaan validitas untuk menghapus atau mengubah data yang bermasalah
 - Transposisi, biasanya melalui denormalisasi dan reorganisasi menjadi model dimensional untuk mengoptimalkan pelaporan
 - Membuat kunci pengganti yang merupakan nilai baru yang diterapkan pada data yang serupa dari sistem sumber yang berbeda
3. **Load** : Proses memasukkan data yang telah diekstraksi dan ditransformasi sehingga tersimpan ke dalam *Data Warehouse*.

Berdasarkan hasil analisis kondisi aktual di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, konsep dan teknologi *Data Warehouse* ini bisa digunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan data demi merealisasikan Layanan SPBE yang terpadu dan menyeluruh di daerah Kabupaten Poso. Topologi *Data Warehouse* dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 5. Topologi Data Warehouse

Dalam Gambar 4, dapat dilihat bahwa *Data Warehouse* akan menampung berbagai data sumber (*data source*) melalui proses ETL (*Extract Transform & Load*) yang berasal dari berbagai sumber seperti data dari sistem informasi melalui API (*Application Programming Interface*), hasil export data dari suatu sistem informasi, dan *file* data seperti Excel, CSV, dan format data lainnya.

Hasil olahan dari *Data Warehouse* dapat ditampilkan ke dalam sistem *Dashboard Executive* untuk pimpinan, sistem informasi laporan, dan dipublikasi ke dalam Portal Satu Data Indonesia yang dimiliki oleh Kabupaten Poso.

4.3.2. Spesifikasi Data Warehouse

Menerapkan data warehouse di Pemerintah Kabupaten Poso membutuhkan perencanaan yang matang untuk memastikan sistem dapat memenuhi kebutuhan analisis dan pelaporan dari berbagai entitas. Berikut adalah beberapa spesifikasi sistem yang perlu dipertimbangkan:

1. Kapasitas Penyimpanan:
Tentukan estimasi volume data yang akan disimpan oleh setiap organisasi dan berikan cadangan untuk pertumbuhan masa depan. Pastikan kapasitas penyimpanan data warehouse dapat menangani data dari seluruh entitas dengan ruang yang memadai.
2. Skalabilitas:
Pertimbangkan desain sistem yang dapat diskalakan secara horizontal atau vertikal. Dengan memiliki banyak organisasi, kemungkinan adanya peningkatan volume data adalah tinggi. Desain yang dapat diskalakan memastikan kemampuan sistem untuk menangani pertumbuhan ini.

3. **Integrasi Data:**

Pastikan sistem mendukung integrasi data dari berbagai sumber. Data dari 36 organisasi mungkin memiliki format dan struktur yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan alat atau proses untuk mentransformasi dan mengintegrasikan data dari sumber yang berbeda.
4. **Keamanan:**

Terapkan kontrol akses yang ketat untuk memastikan bahwa setiap organisasi hanya dapat mengakses data yang relevan untuk mereka. Pertimbangkan pengaturan keamanan tingkat baris atau kolom untuk menyaring data yang dapat dilihat oleh pengguna.
5. **Performa dan Kinerja:**

Pastikan sistem memiliki kinerja tinggi untuk mendukung analisis dan pelaporan yang cepat. Hal ini dapat mencakup pengindeksan yang efisien, caching, dan optimisasi kueri.
6. **Fleksibilitas Query:**

Memastikan adanya fleksibilitas dalam menyusun kueri dan melibatkan berbagai dimensi data. Sistem harus dapat mendukung kueri kompleks dan analisis multidimensional untuk mendapatkan wawasan yang mendalam.
7. **Manajemen Metadata:**

Sistem harus memiliki mekanisme manajemen metadata yang baik untuk melacak asal-usul dan sejarah data. Ini penting untuk memastikan konsistensi dan akurasi data.
8. **Dukungan untuk Visualisasi Data:**

Pertimbangkan integrasi dengan alat visualisasi data seperti dashboard atau tools Bisnis Intelligence (BI) untuk memudahkan interpretasi dan komunikasi data kepada pengguna akhir.
9. **Pemeliharaan dan Dukungan:**

Pastikan terdapat rencana pemeliharaan dan dukungan yang jelas. Ini termasuk kebijakan backup, pemulihan bencana, dan pemantauan performa secara berkala.
10. **Ketersediaan dan Redundansi:**

Pertimbangkan opsi ketersediaan tinggi dan redundansi untuk memastikan bahwa data selalu dapat diakses, terutama dalam skenario bencana atau pemeliharaan.

Spesifikasi teknis untuk sistem data warehouse menggunakan database harus mencakup berbagai aspek, termasuk kapasitas, performa, keamanan, dan fleksibilitas. Berikut adalah contoh spesifikasi teknis untuk sistem data warehouse, sebagaimana ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel 6. Spesifikasi Sistem Data Warehouse (Rekomendasi)

Aspek	Spesifikasi
Kapasitas Penyimpanan	<ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas awal: 10 TB, mendukung data historis 5-10 tahun. - Penyimpanan dapat berbasis cloud (Pusat Data Nasional) atau on-premise dengan SSD/NVMe untuk performa tinggi. - Kompresi data hingga 3:1 untuk efisiensi penyimpanan.
Skalabilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Skalabilitas vertikal: Penambahan CPU/RAM pada node server. - Skalabilitas horizontal: Penambahan node pada cluster (contoh: MPP seperti <i>Snowflake</i>). - Mendukung auto-scaling berbasis cloud untuk menangani lonjakan beban kueri.
Integrasi Data	<ul style="list-style-type: none"> - ETL/ELT pipeline menggunakan alat seperti contoh Apache Airflow atau Talend. - Mendukung integrasi dari sumber heterogen (RDBMS, API, file CSV/JSON). - Konektor untuk sistem OLTP, CRM, ERP, dan data eksternal (misalnya, data pasar).
Keamanan Data	<ul style="list-style-type: none"> - Enkripsi data at-rest (AES-256) dan in-transit (TLS 1.3). - Autentikasi berbasis RBAC (Role-Based Access Control) dan integrasi LDAP/SSO. - Audit log untuk pelacakan akses dan perubahan data. - Masking data sensitif (contoh: informasi data pribadi).
Performa Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> - Latensi kueri < 5 detik untuk kueri analitik standar. - Mendukung pemrosesan paralel (MPP) untuk kueri kompleks. - Indeks bitmap dan materialized view untuk akselerasi kueri. - Throughput: 1000+ kueri/jam pada beban puncak.
Manajemen Metadata	<ul style="list-style-type: none"> - Repositori metadata terpusat (contoh: Apache Atlas). - Dokumentasi otomatis untuk skema tabel, kolom, dan hubungan. - Pelacakan lineage data untuk traceability dari sumber ke laporan. - Versi metadata untuk mendukung perubahan skema.
Dukungan Visualisasi Data	<ul style="list-style-type: none"> - Integrasi dengan alat BI seperti Tableau, Power BI, atau Looker. - API REST untuk akses data oleh dashboard kustom. - Mendukung visualisasi real-time dan batch untuk laporan interaktif. - Cache hasil kueri untuk visualisasi berulang.
Dukungan Pemeliharaan	<ul style="list-style-type: none"> - Backup otomatis harian dengan retensi 30 hari.

Aspek	Spesifikasi
	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan performa menggunakan alat seperti Prometheus atau Datadog. - Patch dan pembaruan sistem tanpa downtime (zero-downtime deployment). - Dokumentasi prosedur pemeliharaan dan SLA 99,9% uptime.
Redundansi	<ul style="list-style-type: none"> - Replikasi data multi-region untuk ketahanan bencana (DR). - Failover otomatis ke server sekunder dalam < 60 detik. - Penyimpanan redundan dengan RAID 10 atau sistem file terdistribusi (contoh: Hadoop HDFS). - Backup ke storage tier dingin untuk penghematan biaya.

BAB V

MANAJEMEN KUALITAS DATA

Manajemen Kualitas Data dilaksanakan untuk menjamin Data yang dihasilkan Produsen Data yang:

1. Memenuhi prinsip Satu Data Indonesia; dan
2. Diperbarui sesuai dengan jadwal pemutakhiran data.

Kegiatan Manajemen Kualitas Data melingkupi kegiatan untuk:

1. Mengembangkan dan mempromosikan kesadaran kualitas Data;
Kegiatan yang dilakukan dapat berupa:
 - Mengadakan pelatihan reguler untuk personel terkait;
 - Membuat materi sosialisasi dan kampanye untuk menyoroti pentingnya kualitas data;
 - Membuat dokumen pedoman kesadaran kualitas data.
2. Menentukan persyaratan kualitas Data;
Kegiatan yang dilakukan dapat berupa:
 - Melakukan wawancara dengan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka.
 - Mengorganisir workshop untuk merinci persyaratan kualitas data.
 - Mendokumentasikan persyaratan kualitas data dalam bentuk spesifikasi atau dokumen kebutuhan.
3. Menetapkan profil, analisis, dan nilai kualitas Data;
Kegiatan yang dilakukan dapat berupa:
 - Mengadakan sesi diskusi dan analisis untuk menetapkan profil kualitas data.
 - Membuat dokumentasi yang merinci nilai yang ingin dicapai dari data.
 - Melakukan tinjauan rutin untuk memastikan data masih sesuai dengan profil dan nilai yang diinginkan.

Contoh profil kualitas data ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel 7. Profil Kualitas Data

Atribut Kualitas Data	Deskripsi	Standar/Kriteria
Relevansi	Relevansi data dengan kebutuhan perencanaan dan pengambilan keputusan Pemda.	100% dataset yang dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan rencana pembangunan daerah (RPJMD).
Akurasi	Kondisi aktual data dengan tingkat kesalahan minimal.	Tingkat kesalahan data < 2% setelah validasi; 95% data kependudukan sesuai dengan dokumen resmi (KTP, KK).
Ketepatan Waktu	Ketersediaan dan pembaruan data sesuai jadwal yang ditentukan.	90% dataset diperbarui sesuai jadwal (misalnya, harian untuk data kesehatan darurat, bulanan untuk data ekonomi).
Aksesibilitas	Kemudahan akses data oleh pihak yang berwenang sesuai hak akses.	100% pengguna berwenang dapat mengakses data dalam < 5 detik melalui portal; 80% dataset tersedia dalam format terbuka (CSV, JSON).
Koherensi	Konsistensi data di seluruh sistem dan instansi.	100% dataset menggunakan standar referensi nasional (misalnya, kode wilayah dari Kemendagri); 0 inkonsistensi format antar dinas.
Kelengkapan	Kelengkapan data sesuai dengan kebutuhan metadata.	95% dataset memiliki metadata lengkap; 0 kolom wajib yang kosong dalam basis data terpadu.
Keamanan	Perlindungan data dari akses tidak sah dan kebocoran.	100% data sensitif terenkripsi; 0 insiden kebocoran data; audit log mencatat 100% aktivitas akses.

4. Menentukan matriks kualitas Data;

Kegiatan yang dilakukan dapat berupa:

- Merancang matriks kualitas data yang mencakup indikator utama.
- Menggunakan alat dan sistem untuk mengukur matriks tersebut secara teratur.
- Menetapkan batasan dan toleransi untuk setiap indikator.

Contoh matriks kualitas data dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8. Matriks Kualitas Data

Dimensi Kualitas Data	Indikator Kualitas	Standar Kualitas Data	Metode Pengukuran
Relevansi	100% dataset sesuai dengan kebutuhan rencana pembangunan daerah (RPJMD).	Semua dataset yang dikumpulkan relevan dengan tujuan strategis Pemda, seperti perencanaan anggaran, evaluasi program, atau pelayanan publik.	Audit dataset terhadap dokumen RPJMD dan kebutuhan dinas; survei kepuasan pengguna data (skor > 85%).
Akurasi	Tingkat kesalahan data < 2%; 95% data kependudukan sesuai dengan dokumen resmi (KTP, KK).	Data mencerminkan kondisi aktual dengan verifikasi terhadap sumber primer (misalnya, dokumen resmi atau lapangan).	Cross-checking dengan sumber primer; penghitungan persentase kesalahan melalui sampling acak (minimum 10% dataset).
Ketepatan Waktu	90% dataset diperbarui sesuai jadwal (harian untuk data kesehatan darurat, bulanan untuk data ekonomi).	Data tersedia dan diperbarui tepat waktu sesuai kebutuhan pengambilan keputusan (misalnya, mingguan untuk data kesehatan, tahunan untuk anggaran).	Pemantauan jadwal pembaruan melalui sistem manajemen data; laporan kepatuhan pembaruan dataset (otomatis via log sistem).
Aksesibilitas	100% pengguna berwenang dapat mengakses data dalam < 5 detik; 80% dataset tersedia dalam format terbuka (CSV, JSON).	Data mudah diakses melalui portal data terpadu atau API oleh pengguna berwenang, dengan format yang mendukung interoperabilitas.	Pengujian waktu akses melalui portal Satu Data Poso; analisis format dataset yang tersedia di portal (CSV, JSON, XML).
Koherensi	100% dataset menggunakan standar referensi nasional; 0 inkonsistensi format antar dinas.	Data konsisten di seluruh sistem dengan standar referensi yang sama (misalnya, kode wilayah Kemendagri, format tanggal YYYY-MM-DD).	Audit format data dan kode referensi antar dinas; penghitungan inkonsistensi menggunakan alat seperti Apache Atlas.
Kelengkapan	95% dataset memiliki metadata lengkap; 0 kolom wajib yang kosong dalam basis data terpadu.	Dataset mencakup semua atribut wajib dan metadata (sumber, waktu pengumpulan, dll.) sesuai kebutuhan analisis.	Pemeriksaan metadata melalui repositori terpusat; analisis otomatis untuk mendeteksi kolom kosong menggunakan SQL queries.
Keamanan	100% data sensitif terenkripsi; 0 insiden kebocoran data; audit log mencatat 100% aktivitas akses.	Data sensitif dilindungi dengan enkripsi AES-256, autentikasi RBAC, dan audit log untuk mencegah akses tidak sah.	Pengujian penetrasi sistem; pemeriksaan log akses melalui alat audit (misalnya, Splunk); verifikasi enkripsi data at-rest dan in-transit.

5. Menentukan aturan bisnis kualitas Data;
Kegiatan yang dilakukan antara lain:
 - Membuat kebijakan dan prosedur yang jelas terkait dengan pengelolaan kualitas data.
 - Mengadakan sesi pelatihan untuk memastikan pemahaman yang tepat.
 - Mengaudit secara rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan bisnis.
6. Menguji dan memvalidasi persyaratan kualitas Data;
Kegiatan yang dilakukan antara lain:
 - Mengembangkan skenario uji yang mencakup kasus penggunaan umum.
 - Melibatkan tim pengguna akhir dalam pengujian untuk validasi praktis.
 - Memastikan bahwa hasil pengujian dicatat dan dievaluasi untuk perbaikan.
7. Menetapkan dan mengevaluasi tingkat layanan kualitas Data;
Kegiatan yang dilakukan antara lain:
 - Menetapkan tingkat layanan berdasarkan kebutuhan bisnis dan harapan pengguna.
 - Melakukan survei kepuasan pengguna terkait dengan tingkat layanan.
 - Melakukan tinjauan berkala dan penyesuaian tingkat layanan sesuai dengan perubahan kebutuhan.
8. Mengukur dan memantau kualitas Data secara berkelanjutan.
Kegiatan yang dilakukan antara lain:
 - Menerapkan alat pemantauan otomatis untuk mengukur kualitas data secara berkelanjutan.
 - Membuat laporan berkala tentang performa kualitas data.
 - Menggunakan hasil pemantauan untuk mengidentifikasi area perbaikan dan mengambil tindakan korektif.

Manajemen kualitas data di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Poso dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama di level Produsen Data, dimana setiap Perangkat Daerah memeriksa data yang dikumpulkan sebelum diserahkan ke Walidata atau sebelum inputting data ke aplikasi Open Data. Tahap kedua di level Walidata, dimana Walidata memeriksa data yang dikirim oleh Produsen Data sesuai Prinsip Satu Data Indonesia. Jika data yang dikirimkan atau diinput oleh Produsen Data sudah sesuai dengan Prinsip Satu Data, maka akan dilakukan approval ke dalam aplikasi Open Data. Sebaliknya, jika tidak sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia, maka data akan ditolak dan dikembalikan kepada Produsen Data untuk diperbaiki.

Untuk meningkatkan kualitas data, Diskominfosandi juga melakukan standar data dengan mengacu pada petunjuk pelaksanaan standar data yang ditentukan. Standar data ini dilakukan untuk menyeragamkan format dan memenuhi standar kualitas data.

BAB VI

PETA JALAN MANAJEMEN DATA KABUPATEN POSO

Manajemen data merupakan pilar penting dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Poso, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data SPBE. Dokumen ini menjadi pedoman untuk memastikan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pemerintah. Peta jalan ini dirancang untuk mengatasi tantangan seperti data silo, standar data yang lemah, dan keterbatasan sumber daya manusia dalam transformasi digital, sebagaimana diidentifikasi dalam sosialisasi peraturan tersebut.

Peta jalan manajemen data Kabupaten Poso bertujuan untuk:

1. Membangun arsitektur data yang terintegrasi untuk mendukung interoperabilitas antar sistem.
2. Mengelola data induk dan referensi untuk memastikan konsistensi dan akurasi data.
3. Mengembangkan basis data yang andal untuk mendukung kebutuhan data real-time dan historis.
4. Meningkatkan kualitas data dari aspek relevansi, akurasi, ketepatan waktu, aksesibilitas, dan koherensi.
5. Mendukung implementasi Satu Data Indonesia (SDI) sesuai Perpres Nomor 39 Tahun 2019.

Peta jalan ini disusun untuk periode 2025–2029, dengan fokus pada penguatan tata kelola data, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi seperti Pusat Data Nasional (PDN). Implementasi akan dilakukan secara bertahap, dengan prioritas pada kebutuhan mendesak seperti integrasi data lintas sektor untuk perencanaan pembangunan, evaluasi, dan pengendalian.

Tabel 9. Peta Jalan Pelaksanaan Manajemen Data SPBE Kabupaten Poso

Kegiatan	Ruang Lingkup	Deskripsi	Penanggung Jawab	Indikator Keberhasilan	Tahun				
					2025	2026	2027	2028	2029
Reviu Arsitektur Data SPBE	Arsitektur Data	Melakukan reviu dan pembaruan arsitektur data SPBE Kabupaten Poso, termasuk pemetaan data lintas dinas dan integrasi dengan portal Satu Data Indonesia.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (DiskominfoSandi)	Dokumen arsitektur data disahkan; 100% dinas terpetakan dalam arsitektur data.	✓				
Identifikasi dan Standarisasi Data Induk	Data Induk dan Referensi	Mengidentifikasi data induk (misalnya, data kependudukan, aset daerah) dan menetapkan standar referensi untuk konsistensi data.	DiskominfoSandi, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda)	Daftar data induk dan referensi disusun; 80% data induk terstandarisasi.	✓				
Pengembangan Basis Data Terpadu	Basis Data	Membangun basis data terpusat untuk data kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, terintegrasi dengan PDN.	DiskominfoSandi, Badan Pusat Statistik (BPS)	Basis data terpadu operasional; 50% data dinas tersimpan di basis data terpusat.		✓			
Pelatihan SDM Manajemen Data	Kualitas Data	Melatih petugas dinas dalam pengelolaan data, termasuk validasi, pembersihan, dan analisis data untuk meningkatkan kualitas data.	DiskominfoSandi, BKPSDM	Petugas pengelola data di seluruh dinas dilatih; 90% tingkat kepuasan pelatihan.		✓			
Implementasi Sistem Manajemen Kualitas Data	Kualitas Data	Mengembangkan sistem untuk memantau dan mengevaluasi kualitas data berdasarkan relevansi, akurasi, dan ketepatan waktu.	DiskominfoSandi, Bapelitbangda	Sistem manajemen kualitas data beroperasi; 85% data memenuhi standar kualitas.			✓		

Kegiatan	Ruang Lingkup	Deskripsi	Penanggung Jawab	Indikator Keberhasilan	Tahun				
					2025	2026	2027	2028	2029
Integrasi Data dengan PDN	Basis Data	Menghubungkan basis data lokal dengan Pusat Data Nasional untuk mendukung interoperabilitas dan berbagi pakai data.	Diskominfo, Kementerian Kominfo	100% data prioritas terintegrasi dengan PDN; latensi akses data < 5 detik.		✓	✓		
Pengembangan Portal Data Terbuka	Arsitektur Data	Melakukan pengembangan dan pembaruan data di portal data terbuka Kabupaten Poso untuk akses publik terhadap data non-sensitif, sesuai standar SDI.	Diskominfo	Portal data terbuka aktif; 50 dataset publik tersedia.		✓	✓	✓	
Audit dan Pemutakhiran Data Induk	Data Induk dan Referensi	Melakukan audit berkala terhadap data induk dan referensi untuk memastikan akurasi dan konsistensi.	Diskominfo, BPS	100% data induk diaudit; 95% data bebas dari inkonsistensi.				✓	
Evaluasi dan Peningkatan Kualitas Data	Kualitas Data	Mengevaluasi seluruh proses manajemen data dan menerapkan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi.	Diskominfo, Bapelitbangda	Indeks kualitas data mencapai 90%; laporan evaluasi tahunan disusun.					✓
Penguatan Keamanan Data	Basis Data	Menerapkan enkripsi AES-256, RBAC, dan audit log untuk melindungi data sensitif di basis data terpadu.	Diskominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)	100% data sensitif terenkripsi; 0 insiden kebocoran data.					✓

BAB VII PENUTUP

Implementasi manajemen data SPBE di Kabupaten Poso merupakan langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan berbasis data. Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 16 Tahun 2020, manajemen data yang mencakup arsitektur data, data induk dan referensi, basis data, serta kualitas data telah dirancang untuk mendukung interoperabilitas, efisiensi, dan akurasi dalam pengelolaan data di lingkungan Pemerintah Daerah. Peta jalan yang disusun dalam dokumen ini, memberikan panduan yang jelas untuk periode 2025–2029, dengan fokus pada penguatan tata kelola data, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan infrastruktur teknologi seperti Pusat Data Nasional (PDN).

Keberhasilan manajemen data SPBE di Kabupaten Poso bergantung pada komitmen seluruh pemangku kepentingan, termasuk Dinas Komunikasi, Informatika DAN Persandian (DiskominfoSandi) sebagai koordinator utama, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pusat Statistik (BPS), dan dinas-dinas terkait lainnya. Tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, dan data silo dapat diatasi melalui kolaborasi lintas sektor, pelatihan berkelanjutan, serta penerapan standar Satu Data Indonesia (SDI) sesuai Perpres Nomor 39 Tahun 2019.

Ke depan, Pemerintah Daerah Kabupaten Poso akan terus memantau dan mengevaluasi implementasi manajemen data melalui audit berkala, pengukuran kualitas data, dan penyesuaian strategi berdasarkan perkembangan teknologi dan kebutuhan daerah. Dengan pengelolaan data yang berkualitas, terpadu, dan aman, Kabupaten Poso diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendukung perencanaan pembangunan yang lebih akurat, dan berkontribusi pada pencapaian tujuan nasional dalam transformasi digital pemerintahan.

Sebagai langkah lanjutan, Pemda akan memprioritaskan:

1. Penguatan koordinasi antarinstansi untuk memastikan integrasi data yang *seamless*.
2. Investasi dalam pelatihan SDM untuk meningkatkan literasi data di semua level.
3. Pemanfaatan teknologi modern seperti *cloud computing* dan alat analitik untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
4. Pengembangan portal data terbuka untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik.

Dokumen ini menjadi landasan untuk mewujudkan visi Kabupaten Poso sebagai daerah yang berdaya saing, inovatif, dan berbasis data, sekaligus mendukung visi nasional SPBE untuk pemerintahan yang efektif dan efisien. Dengan komitmen bersama, manajemen data SPBE akan menjadi fondasi kuat bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Format Metadata Kegiatan, Indikator dan Variabel Statistik Sektoral

Lampiran 1. Format Metadata Kegiatan, Indikator dan Variabel Statistik Sektoral



MS-Keg

METADATA STATISTIK KEGIATAN

Judul Kegiatan:		Tahun:	
Kode Kegiatan (diisi oleh petugas):			
Cara Pengumpulan Data:		<input type="checkbox"/>	
Pencacahan Lengkap	- 1	Kompilasi Produk Administrasi	- 3
Survei	- 2	Cara lain sesuai dengan perkembangan TI	- 4
Sektor Kegiatan:		<input type="checkbox"/>	
Pertanian dan Perikanan	- 1	Perdagangan Internasional dan Neraca Perdagangan	- 12
Demografi dan Kependudukan	- 2	Ketenagakerjaan	- 13
Pembangunan	- 3	Neraca Nasional	- 14
Proyeksi Ekonomi	- 4	Indikator Ekonomi Bulanan	- 15
Pendidikan dan Pelatihan	- 5	Produktivitas	- 16
Lingkungan	- 6	Harga dan Paritas Daya Beli	- 17
Keuangan	- 7	Sektor Publik, Perpajakan, dan Regulasi Pasar	- 18
Globalisasi	- 8	Perwilayahan dan Perkotaan	- 19
Kesehatan	- 9	Ilmu Pengetahuan dan Hak Paten	- 20
Industri dan Jasa	- 10	Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan	- 21
Teknologi Informasi dan Komunikasi	- 11	Transportasi	

III. PERENCANAAN DAN PERSIAPAN						
3.1. Latar Belakang Kegiatan:						
3.2. Tujuan Kegiatan:						
3.3. Rencana Jadwal Kegiatan:						
	Awal (tgl/bln/thn)			s.d.	Akhir (tgl/bln/thn)	
A. Perencanaan				s.d.		
1. Perencanaan Kegiatan				s.d.		
2. Desain				s.d.		
B. Pengumpulan						
3. Pengumpulan Data				s.d.		
C. Pemeriksaan						
4. Pengolahan Data				s.d.		
D. Penyebarluasan						
5. Analisis				s.d.		
6. Diseminasi Hasil				s.d.		
7. Evaluasi				s.d.		
3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:						
	No.	Nama Variabel (Karakteristik)	Referensi Waktu (Periode Enumerasi)			

IV. DESAIN KEGIATAN			
4.1. Kegiatan ini dilakukan:			<input type="checkbox"/>
Hanya sekali	- 1 → langsung ke R.4.3.	Berulang	- 2
4.2. Jika “berulang” (R.4.1. berkode 2), Frekuensi Penyelenggaraan:			<input type="checkbox"/>
Harian	- 1	Empat Bulanan	- 5
Mingguan	- 2	Semesteran	- 6
Bulanan	- 3	Tahunan	- 7
Triwulanan	- 4	> Dua Tahunan	- 8
4.3. Tipe Pengumpulan Data:			<input type="checkbox"/>
<i>Longitudinal Panel</i>	- 1		
<i>LongitudinalCross Sectional</i>	- 2		
<i>Cross Sectional</i>	- 3		
4.4. Cakupan Wilayah Pengumpulan Data:			<input type="checkbox"/>
Seluruh Wilayah Indonesia	- 1 → langsung ke R.4.6.		
Sebagian Wilayah Indonesia	- 2		
4.5. Jika “sebagian wilayah Indonesia” (R.4.4. berkode 2), Wilayah Kegiatan:			
No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	
4.6. Metode Pengumpulan Data:			<input type="checkbox"/>
Wawancara	- 1		
Mengisi kuesioner sendiri (swacacah)	- 2		
Pengamatan (observasi)	- 4		
Pengumpulan data sekunder	- 8		
Lainnya (sebutkan)	- 16		

4.7. Sarana Pengumpulan Data:		<input type="checkbox"/>
<i>Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI)</i>	- 1	
<i>Computer-assisted Personal Interviewing (CAPI)</i>	- 2	
<i>Computer-assisted Telephones Interviewing (CATI)</i>	- 4	
<i>Computer Aided Web Interviewing (CAWI)</i>	- 8	
<i>Mail</i>	- 16	
Lainnya (sebutkan)	- 32	
4.8. Unit Pengumpulan Data:		<input type="checkbox"/>
Individu	- 1	
Rumah tangga	- 2	
Usaha/perusahaan	- 4	
Lainnya (sebutkan)	- 8	
V. DESAIN SAMPEL		
Diisi jika cara pengumpulan data adalah survei sebagian		
5.1. Jenis Rancangan Sampel:		<input type="checkbox"/>
<i>Single Stage/Phase</i>	- 1	
<i>Multi Stage/Phase</i>	- 2	
5.2. Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir:		<input type="checkbox"/>
Sampel Probabilitas	- 1 → ke R.5.3.a	
Sampel Nonprobabilitas	- 2 → ke R.5.3.b	
5.3. Jika "sampel probabilitas" (R.5.2. berkode 1), Metode yang Digunakan:		<input type="checkbox"/>
<i>Simple Random Sampling</i>	- 1	} → ke R.5.4
<i>Systematic Random Sampling</i>	- 2	
<i>Stratified Random Sampling</i>	- 3	
<i>Cluster Sampling</i>	- 4	
<i>Multi Stage Sampling</i>	- 5	
Jika "sampel nonprobabilitas" (R.5.2. berkode 2), Metode yang Digunakan:		
<i>Quota Sampling</i>	- 6	} → ke R.5.7
<i>Accidental Sampling</i>	- 7	
<i>Purposive Sampling</i>	- 8	
<i>Snowball Sampling</i>	- 9	
<i>Saturation Sampling</i>	- 10	

5.4. Kerangka Sampel Tahap Terakhir:		<input type="checkbox"/>
<i>List Frame</i>	- 1	
<i>Area Frame</i>	- 2	
5.5. Fraksi Sampel Keseluruhan:		
5.6. Nilai Perkiraan <i>Sampling Error</i> Variabel Utama:		
5.7. Unit Sampel:		
5.8. Unit Observasi:		
VI. PENGUMPULAN DATA		
6.1. Apakah Melakukan Uji Coba (<i>Pilot Survey</i>)?		<input type="checkbox"/>
Ya	- 1	
Tidak	- 2	
6.2. Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data:		<input type="checkbox"/>
Kunjungan kembali (<i>revisit</i>)	- 1 <i>Task Force</i> - 4	
Supervisi	- 2 Lainnya (sebutkan) - 8	
6.3. Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?		<input type="checkbox"/>
Ya	- 1	
Tidak	- 2	
<p>Pertanyaan 6.4 – 6.7 ditanyakan jika sarana pengumpulan data adalah PAPI, CAPI, atau CATI (Pilihan R.4.7. kode 1, 2, dan/atau 4 dilingkari)</p>		
6.4. Petugas Pengumpulan Data:		<input type="checkbox"/>
Staf instansi penyelenggara	- 1	
Mitra/tenaga kontrak	- 2	
Staf instansi penyelenggara dan mitra/tenaga kontrak	- 3	

6.5. Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data:			<input type="checkbox"/>
≤ SMP	- 1		
SMA/SMK	- 2		
Diploma I/II/III	- 3		
Diploma IV/S1/S2/S3	- 4		
6.6. Jumlah Petugas:			
Supervisor/penyelia/pengawas orang		
Pengumpul data/enumerator orang		
6.7. Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?			<input type="checkbox"/>
Ya	- 1		
Tidak	- 2		
VII. PENGOLAHAN DAN ANALISIS			
7.1. Tahapan Pengolahan Data:			<input type="checkbox"/>
Penyuntingan (<i>Editing</i>)	Ya - 1	Tidak - 2	
Penyandian (<i>Coding</i>)	Ya - 1	Tidak - 2	
<i>Data Entry</i>	Ya - 1	Tidak - 2	
Penyahihan (Validasi)	Ya - 1	Tidak - 2	
7.2. Metode Analisis:			<input type="checkbox"/>
Deskriptif	- 1		
Inferensia	- 2		
Deskriptif dan Inferensia	- 3		
7.3. Unit Analisis:			<input type="checkbox"/>
Individu	- 1	Usaha/perusahaan	
Rumah tangga	- 2	Lainnya (sebutkan)	- 8
7.4. Tingkat Penyajian Hasil Analisis:			<input type="checkbox"/>
Nasional	- 1	Kecamatan	
Provinsi	- 2	Lainnya (sebutkan)	
Kabupaten/Kota	- 4		
VIII. DISEMINASI HASIL			
8.1. Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum:			<input type="checkbox"/>
Tercetak (<i>hardcopy</i>)	Ya - 1	Tidak - 2	
Digital (<i>softcopy</i>)	Ya - 1	Tidak - 2	
Data Mikro	Ya - 1	Tidak - 2	

8.2. Jika pilihan R.8.1. kode 1, Rencana Rilis Produk Kegiatan:

	Tanggal	Bulan	Tahun
Tercetak			
Digital			
Data Mikro			

_____, _____ 20__

Mengetahui,
Direktur/Kepala Biro

NIP.

Lampiran 2. Kuesioner FS3 (Formulir Rekomendasi BPS)



Badan Pusat Statistik

FS3

FORMULIR PEMBERITAHUAN
SURVEI STATISTIK SEKTORAL

Judul Survei :

Identitas Rekomendasi (diisi oleh BPS)

Pedoman Pengisian Kuesioner Statistik Sektoral (FS3)

Tuliskan judul survei yang akan dilaksanakan secara lengkap pada tempat yang disediakan.

Blok I. Identifikasi Penyelenggaraan Survei

1.1. Instansi Pemerintah Penyelenggara

Tuliskan nama instansi pemerintah (kementerian/lembaga/perangkat daerah) penyelenggara survei ini dan dituliskan setingkat dengan eselon II, misal *Kementerian Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika,*

1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara

Tuliskan dengan lengkap alamat instansi pemerintah penyelenggara (termasuk nomor telepon, faksimile, dan email). Contoh :

*Jl. Merdeka Barat No. 17 Gedung Sapta Pesona Jakarta 10110
Kabupaten/Kota : Kota Jakarta Pusat
Provinsi : DKI Jakarta*

Blok II. Penanggung Jawab Survei (sebagai *Contact Person*)

2.1. Nama Penanggung Jawab di Instansi

Tuliskan nama, jabatan, nomor telepon, nomor fax dan alamat email penanggung jawab survei di instansi penyelenggara survei. Penanggung jawab instansi disini sebaiknya yang mengetahui tentang informasi umum mengenai survei. Informasi umum adalah keterangan mengenai latar belakang, tujuan, cakupan dan lain-lainnya tentang survei ini.

2.2. Nama Manajer Survei

Tuliskan nama, jabatan, alamat surat, nomor telepon, nomor fax, dan alamat email manajer survei yang mengetahui teknis penyelenggaraan survei ini.

Blok III. Informasi Umum

3.1. Survei ini dilakukan

Lingkari kode 1 jika survei dilakukan hanya sekali dan lingkari kode 2 jika survei ini dilakukan berulang kali.

3.2. Jika "Berulang" frekuensi penyelenggaraan Rincian 3.1. (selanjutnya akan ditulis R.3.1.) berkode 2

Lingkari kode yang sesuai dengan frekuensi dilakukannya survei ini.

3.3. Tipe pengumpulan data

Lingkari kode 1 jika tipe pengumpulan data pada survei ini *longitudinal*, kode 2 jika *cross sectional*, dan kode 3 jika gabungan *longitudinal* dan *cross sectional*.

1. *Longitudinal*, yaitu data dikumpulkan pada waktu yang berbeda (dari waktu ke waktu) dan dilakukan secara terus menerus untuk melihat perubahan yang terjadi, biasanya ada analisis secara deskriptif.

- *Trend studies*: (1) dilakukan secara berkala; (2) setiap sampel mewakili populasi untuk waktu yang berbeda; (3) populasi sama, anggota mungkin berubah; (4) ada kemungkinan mengkaitkan antar variabel, tetapi tidak rinci.
- *Cohort studies*: (1) fokusnya adalah spesifik populasi; (2) dilakukan secara berkala; (3) populasi keadaan awal dan diikuti.
- *Parallel studies*: (1) dilakukan secara berkala; (2) sampel sama dan diikuti secara terus menerus; (3) analisa populasi tidak dimungkinkan dan rumit; (4) mahal dan membutuhkan waktu.

2. *Cross Sectional*, yaitu data dikumpulkan pada saat tertentu dari sampel terpilih dan menggambarkan suatu parameter pada saat itu (suatu saat) juga digunakan untuk mengaitkan suatu peubah dengan peubah lainnya (kajian mengaitkan antar variabel).

I. Identifikasi Penyelenggara Survei	
1.1. Instansi Pemerintah Penyelenggara :	
1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara :	
Kabupaten/Kota : (Coret salah satu)	
Provinsi :	
II. Penanggung Jawab Survei (Sebagai Contact Person)	
2.1. Nama Penanggung Jawab di Instansi :	
Jabatan :	
Telepon :	Fax :
E-mail :	
2.2. Nama Manajer Survei :	
Jabatan :	
Alamat :	
Telepon :	Fax :
E-mail :	
III. Informasi Umum	
3.1. Survei ini dilakukan :	
<i>Hanya sekali</i> - 1 ----> langsung ke R.3.3.	<i>Berulang</i> - 2 <input type="checkbox"/>
3.2. Jika "Berulang" frekuensi penyelenggaraan (R.3.1. berkode 2)	
<i>Harian</i> - 1	<i>Empat Bulanan</i> - 5
<i>Mingguan</i> - 2	<i>Semesteran</i> - 6
<i>Bulanan</i> - 3	<i>Tahunan</i> - 7 <input type="checkbox"/>
<i>Triwulanan</i> - 4	<i>> Dua Tahunan</i> - 8
<i>Lainnya (sebutkan)</i>	- 9
3.3. Tipe pengumpulan data :	
<i>Longitudinal</i>	- 1
<i>Cross Sectional</i>	- 2 <input type="checkbox"/>
<i>Longitudinal dan Cross Sectional</i>	- 3

Blok IV. Tujuan Survei dan Peubah yang Dikumpulkan

4.1. Tujuan survei

Tuliskan tujuan diselenggarakannya survei ini secara ringkas dan jelas pada tempat yang telah disediakan.

4.2. Peubah (*variable*) yang dikumpulkan pada survei ini dan periode enumerasi (referensi waktu)

Tuliskan peubah yang akan dikumpulkan dan periode enumerasi (referensi waktu) yang digunakan dalam survei ini. Contoh :

Besarnya biaya untuk pekerja, pembelian bahan baku, bahan penolong sewa tempat, dan lain-lain pada perusahaan industri elektronika, dengan periode enumerasi adalah setahun yang lalu.

Blok V. Rancangan Pengumpulan Data

5.1. Cara pengumpulan data

Tuliskan cara pengumpulan data yang akan dilakukan. Lingkari kode 1 jika pengumpulan data hanya pada sebagian populasi (sampel) dan lingkari kode 2 jika pengumpulan data pada seluruh populasi.

5.2. Survei dilakukan di

Tuliskan wilayah atau daerah dimana survei ini akan dilakukan. Lingkari kode 1 jika survei akan dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dan lingkari kode 2 jika survei akan dilakukan di sebagian wilayah Indonesia.

Pengertian di seluruh wilayah Indonesia adalah bila survei tersebut dilakukan di semua provinsi dan mencakup semua kabupaten/kota yang ada di Indonesia, tetapi tidak harus mencakup seluruh kecamatan atau desa/kelurahan yang ada. Bila ada responden atau unit wilayah di satu kabupaten/kota yang terambil dalam suatu survei, maka kabupaten/kota tersebut sudah diartikan tercakup dalam survei yang dimaksud. Sehingga bila di semua kabupaten/kota ada sebagian wilayahnya yang terambil survei yang akan dilakukan, sudah diartikan mencakup seluruh wilayah Indonesia.

5.3. Bila di sebagian wilayah Indonesia, survei dilakukan di

Tuliskan nama provinsi dan nama kabupaten/kota yang akan dicakup bila survei akan dilakukan di sebagian wilayah Indonesia (tidak mencakup semua propinsi atau tidak mencakup semua kabupaten/kota yang ada di Indonesia). Bila dalam satu provinsi semua kabupaten/kota tercakup dalam survei yang akan dilakukan, tidak perlu ditulis nama-nama kabupaten/kota yang ada tetapi cukup ditulis "semua". Jika ruang yang tersedia tidak mencukupi gunakan kertas tambahan.

IV. Tujuan Survei dan Peubah yang Dikumpulkan		
4.1. Tujuan Survei :		
4.2. Peubah (<i>variable</i>) yang dikumpulkan pada survei ini dan periode enumerasi (<i>referensi waktu</i>)		
V. Rancangan Pengumpulan Data		
5.1. Cara pengumpulan data :		
<i>Sebagian populasi (sampel)</i>	- 1	<input type="checkbox"/>
<i>Seluruh populasi</i>	- 2	
5.2. Survei dilakukan di :		
<i>Seluruh wilayah Indonesia</i>	- 1 ----> langsung ke R. 5.4.	<input type="checkbox"/>
<i>Sebagian wilayah Indonesia</i>	- 2	
5.3. Bila di sebagian wilayah Indonesia, survei dilakukan di :		
<i>No.</i>	<i>Provinsi</i>	<i>Kabupaten/Kota</i>
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

- 5.4. Metode pengumpulan data
Tentukan metode pengumpulan data yang dilakukan pada survei ini. Lingkari kode yang sesuai (bisa lebih dari satu). Jika isian lebih dari satu, jumlahkan kode yang terpilih dan pindahkan ke kotak yang tersedia.
- 5.5. Metode penelitian
Tentukan metode penelitian pada survei ini apakah sampel probabilitas atau sampel non probabilitas.
Sampel probabilitas adalah teknik sampling yang menerapkan setiap unit dalam populasi memiliki kesempatan atau peluang (lebih dari nol) untuk terpilih dalam sampel, dan peluang ini dapat ditentukan secara akurat. Teknik sampling yang termasuk dalam Probability Sampling adalah *Simple Random Sampling (SRS)*, *Systematic Sampling*, dan *Probability Proportional To Size (PPS)*.
Sampel non probabilitas adalah teknik sampling dimana sampel dipilih dari populasi tanpa menggunakan sampling probabilitas, dengan kata lain peluang unit dalam populasi untuk terpilih sebagai sampel tidak dapat dihitung. Unit populasi yang terpilih menjadi sampel bisa disebabkan karena kebetulan atau karena faktor lain yang sebelumnya sudah direncanakan oleh peneliti.
- 5.6. Metode untuk Sampel Non Probabilitas (bila R.5.5. berkode 2)
Jika P.5.5 kode yang dilingkari adalah kode 2 (sampel Non Probabilitas) jelaskan metode yang digunakan dan komposisi sampelnya.
Teknik sampel non probabilitas meliputi:
1. *Quota Sampling* (Sampling kuota); teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan, jumlah subjek yang akan diselidiki ditetapkan terlebih dahulu.
 2. *Accidental Sampling* (Sampling aksidental); teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, sangat subyektif, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.
 3. *Purposive Sampling*; teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, dengan catatan bahwa sampel tersebut mewakili populasi. Dalam purposive pemilihan sekelompok subyek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Misalnya akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam bidang kepegawaian saja.
 4. *Saturation Sampling* (Sampling jenuh); teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang.
 5. *Snowball sampling*; teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding, makin lama semakin besar.
- 5.7. Apakah melakukan Uji Coba (*Pilot Study*)
Lingkari kode 1 jika pada survei ini dilakukan pilot studi dan lingkari kode 2 jika tidak dilakukan uji coba. Jika kode 1, jelaskan secara singkat pelaksanaan uji coba tersebut, seperti jumlah responden, tempat pelaksanaan uji coba, frekuensi uji coba, dan lain-lain.
- 5.8. Petugas pengumpul data
Sebutkan petugas pengumpul data survei ini. Lingkari kode yang sesuai (bisa lebih dari satu).
- 5.9. Persyaratan pendidikan terendah petugas pengumpul data
Sebutkan persyaratan pendidikan terendah seluruh petugas pengumpul data survei ini, baik staf sendiri, mitra/kontrak, maupun lainnya. Jika Akademi/Universitas maka sebutkan apakah Diploma/S1/S2/S3. Lingkari kode yang sesuai (bisa lebih dari satu).
- 5.10. Apakah melakukan pelatihan petugas
Lingkari kode 1 jika petugas pelaksana survei ini mengikuti pelatihan terlebih dahulu atau lingkari kode 2 jika tidak. Jika "ya", jelaskan secara ringkas tentang kegiatan pelatihan petugas tersebut. Misal antara lain berapa lama waktu pelatihan dan materi pokok pelatihan. Briefing merupakan salah satu cara pelatihan petugas.
- 5.11. Jumlah petugas
Isikan jumlah petugas pelaksana survei ini sesuai dengan tugasnya, yaitu supervisi/penyelia dan petugas pengumpul data.

5.4. Metode pengumpulan data :			
Wawancara langsung	- 1		
Wawancara melalui sarana komunikasi	- 2		
Mengisi kuesioner sendiri (swacacah)	- 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pengamatan (observasi)	- 8		
Lainnya (sebutkan)	- 16		
5.5. Metode penelitian :			
Sampel Probabilitas	- 1	----> langsung ke R.5.7	<input type="checkbox"/>
Sampel Non Probabilitas	- 2		
5.6. Metode untuk Sampel Non Probabilitas (bila R.5.5. berkode 2) :			
5.7. Apakah melakukan Uji Coba (<i>Pilot Study</i>) :			
Ya	- 1	Tidak	- 2
Jika "Ya", jelaskan :			<input type="checkbox"/>
5.8. Petugas pengumpul data :			
Staf sendiri	- 1		
Mitra/Tenaga Kontrak	- 2		<input type="checkbox"/>
Lainnya (sebutkan)	- 4		
5.9. Persyaratan pendidikan terendah petugas pengumpul data :			
SMP	- 1		
SMU/SMK	- 2		<input type="checkbox"/>
Akademi/Universitas	- 4		
5.10. Apakah melakukan pelatihan petugas :			
Ya	- 1	Tidak	- 2
Jika "Ya", jelaskan :			<input type="checkbox"/>
5.11. Jumlah petugas :			
Supervisi/Penyelia/Pengawas		Orang	
Pengumpul Data/Enumerator		Orang	

Blok VI. Rancangan Sampel (diisi bila R.5.1. berkode 1 dan R.5.5. berkode 1)**6.1. Jenis rancangan sampel**

Tuliskan secara ringkas jenis rancangan sampel yang digunakan pada survei ini. Lingkari kode 1 jika rancangan sampel adalah *single stage/phase*, dan kode 2 jika rancangan sampel *multi stage/phase* atau rancangan sampel lebih dari satu tahap dan jelaskan.

Single stage adalah penarikan sampel langsung pada unit-unit yang terdaftar pada kerangka sampel (penarikan sampel hanya satu kali).

Multi stage adalah metode pengambilan sampel melalui dua tahap atau lebih dimana metode tiap tahapnya bisa berbeda.

Misal: Tahap I: Populasi pertama terdiri dari seluruh kecamatan yang dipilih secara PPS dari seluruh kabupaten yang ada.

Tahap II: Dari kecamatan terpilih diambil beberapa kelurahan/desa secara PPS.

Tahap III: Dari desa terpilih dibuat daftar seluruh unit sampel yang akan digunakan.

6.2. Kerangka sampel

Tulis dan jelaskan secara rinci kerangka sampel yang digunakan. Jika rancangan sampel lebih dari satu tahap, tuliskan kerangka sampel untuk setiap tahap.

Yang dimaksud dengan kerangka sampel adalah daftar dari semua unsur sampel dalam populasi sampel, berisi seluruh unit dalam populasi yang akan dijadikan dasar penarikan sampel (dibentuk dari kerangka induk). Kerangka sampel dapat berupa daftar mengenai jumlah penduduk, jumlah bangunan, mungkin pula sebuah peta yang unit-unitnya tergambar secara jelas.

Sebaiknya kerangka sampel memenuhi syarat, sebagai berikut :

- Meliputi seluruh unsur sampel, tersedia sampai satuan unit terkecil sebagai dasar penarikan sampel
- Unsur sampel tidak dihitung dua kali, tidak tumpang tindih atau terlewat
- *Up to date*
- Mempunyai batas jelas
- Mempunyai korelasi dengan data yang diteliti
- Dapat dilacak di lapangan

Contoh :

Untuk satu tahap : *Direktori Perusahaan Industri Besar dan Sedang di Tahun 1998.*

Untuk dua tahap : *Tahap I. DaftarBlok Sensus di DKI Jakarta 1999*

Tahap II. Daftar Rumah Tangga pada tiap Blok Sensus di DKI Jakarta.

6.3. Metode pemilihan sampel

Tuliskan secara ringkas metode pemilihan sampel yang digunakan pada survei ini, misalnya *simple random sampling*, *systematic sampling*, *probability proportional to size*. Jika survei ini menggunakan rancangan sampling multi stage/phase, jelaskan pemilihan sampel pada tiap stage/phase.

- *Simple random sampling*; merupakan pemilihan sampel berpeluang yang setiap elemen dalam populasi memiliki peluang terpilih yang sama..
- *Systematic sampling*; metode pengambilan sampel secara sistematis dengan interval tertentu dari suatu kerangka sampel yang telah diurutkan.
- *Probability Proportional To Size*; merupakan teknik sampling yang menggunakan variabel tambahan yang dipercaya berkorelasi kuat dengan variabel yang sedang diteliti untuk meningkatkan akurasi pemilihan sampel

6.4. Keseluruhan fraksi sampel (*overall sampling fraction*)

Tuliskan fraksi sampel (n/N) secara keseluruhan. Jika rancangan sampel multi stage/phase, fraksi sampel yang ditulis adalah untuk seluruh tahap.

6.5. Unit sampel

Tuliskan unit sampel terkecil dan tuliskan jumlah seluruh sampel survei ini.

Unit sampel adalah unit yang dijadikan dasar penarikan sampel baik berupa elemen atau kumpulan elemen (klaster). Sebagai contoh rumah tangga dapat dijadikan unit sampel dan atau kumpulan rumah tangga pada wilayah tertentu yaitu blok sensus. Contoh lain dari unit sampel adalah daftar individu perusahaan/usaha.

6.6. Perkiraan *sampling error*

Tuliskan perkiraan *sampling error* pada survei ini.

Sampling error adalah penyimpangan yang terjadi karena adanya kesalahan dalam pemakaian sampel. Semakin besar sampel yang diambil maka semakin kecil terjadinya penyimpangan.

6.7. Responden

Tuliskan responden dan jumlah responden survei ini. Isian rincian ini bisa sama dengan rincian 6.5.

Contoh : Responden survei adalah perorang/individu pada rumah tangga terpilih sampel

VI. Rancangan Sampel (diisi bila R.5.1. berkode 1 dan R.5.5. berkode 1)	
6.1. Jenis Rancangan Sampel :	
<i>Single Stage/Phase</i> - 1	<input type="checkbox"/>
<i>Multi Stage/Phase (sebutkan)</i> - 2	
6.2. Kerangka sampel :	
6.3. Metode pemilihan sampel :	
6.4. Keseluruhan fraksi sampel (<i>overal sampling fraction</i>):	
6.5. Unit sampel :	
6.6. Perkiraan <i>sampling error</i> :	
6.7. Responden :	

Blok VII. Pengolahan Data, Estimasi, dan Analisis

7.1. Metode pengolahan

Prosedur dan metode pengolahan data yang dilakukan untuk mengolah data hasil survei ini, antara lain meliputi penyuntingan (*editing*), penyandian (*coding*), dan penyahihan (*validasi*). Lingkari kode 1 jika “Ya” dan kode 2 jika “Tidak”. Adapun yang dimaksud dengan:

- Penyuntingan adalah melakukan pengecekan terhadap kemungkinan kesalahan pengisian daftar pertanyaan dan ketidakserasian informasi (*inconsistency*).
- Penyandian adalah kegiatan pemberian kode-kode tertentu untuk mempermudah pengolahan, terutama jika akan diolah dengan media komputer.
- Penyahihan adalah proses pemeriksaan terhadap data dan proses perbaikan data yang salah menjadi data yang benar dan valid. Tingkat validitas data sangat berpengaruh terhadap kualitas keluaran (*output*) yang dihasilkan. Proses penyahihan ada dua cara yakni penyahihan manual dan penyahihan komputer.

7.2. Tingkat estimasi yang diharapkan

Lingkari kode tingkat estimasi yang diharapkan, kode yang dilingkari bisa lebih dari satu.

7.3. Metode analisis hasil survei

Tuliskan secara ringkas metode analisis yang akan digunakan pada survei ini. Misal analisis deskriptif, analisis inferensia seperti regresi, regresi logistik, ataupun gabungan antara analisis deskriptif dan analisis inferensial.

7.4. Produk data yang tersedia untuk umum

Sebutkan produk data dari survei ini yang didiseminasikan/disebarluaskan kepada umum. Lingkari kode 1 jika “Ya” tersedia dan 2 jika “Tidak” tersedia.

Keterangan:

- Publikasi dalam *hardcopy* adalah hasil survei yang dipublikasikan dalam bentuk buku.
- Publikasi dalam *softcopy* adalah hasil survei yang dipublikasikan dalam media komputer (*disket, compact disk, optical disk*).
- Macro data adalah hasil survei yang tersedia bagi umum dalam bentuk file-file summary (agregat).
- Micro data/raw data adalah hasil survei yang tersedia bagi umum dalam bentuk *individual record*.

7.5. Waktu pelaksanaan survei (lampirkan)

Tuliskan tanggal, bulan dan tahun perencanaan, pelaksanaan lapangan, pengolahan, penyajian, dan analisis survei ini.

7.6. Waktu ketersediaan hasil survei untuk umum

Tuliskan tanggal, bulan dan tahun ketersediaan hasil survei ini untuk umum.

Pengertian “ketersediaan” disini adalah bahwa hasil survei ini menjadi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum (*publicly available*).

VII. Pengolahan Data, Estimasi, dan Analisis							
7.1. Metode pengolahan :							
<i>Penyuntingan (Editing)</i>	Ya - 1		<i>Tidak</i>	- 2		<input type="checkbox"/>	
<i>Penyandian (Coding)</i>	Ya - 1		<i>Tidak</i>	- 2		<input type="checkbox"/>	
<i>Penyahihan (Validasi)</i>	Ya - 1		<i>Tidak</i>	- 2		<input type="checkbox"/>	
7.2. Tingkat estimasi yang diharapkan :							
<i>Nasional</i>	- 1	<i>Kecamatan</i>		- 8		<input type="checkbox"/>	
<i>Provinsi</i>	- 2	<i>Lainnya</i>		- 16			
<i>Kabupaten/Kota</i>	- 4	<i>Tidak dilakukan estimasi</i>		- 32			
7.3. Metode analisis hasil survei :							
7.4. Produk data yang tersedia untuk umum :							
<i>Publikasi dalam Media Cetak</i>	Ya - 1		<i>Tidak</i>	- 2		<input type="checkbox"/>	
<i>Publikasi dalam Media Elektronik</i>	Ya - 1		<i>Tidak</i>	- 2		<input type="checkbox"/>	
<i>Macro Data</i>	Ya - 1		<i>Tidak</i>	- 2		<input type="checkbox"/>	
<i>Micro Data/Raw Data</i>	Ya - 1		<i>Tidak</i>	- 2		<input type="checkbox"/>	
<i>Lainnya (sebutkan)</i>	Ya - 1		<i>Tidak</i>	- 2		<input type="checkbox"/>	
7.5. Waktu pelaksanaan survei (lampirkan) :							
	Tgl	Bln	Thn		Tgl	Bln	Thn
<i>Perencanaan/Persiapan</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	s.d.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<i>Pelaksanaan Lapangan</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	s.d.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<i>Pengolahan</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	s.d.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<i>Analisis</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	s.d.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<i>Penyajian</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	s.d.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
7.6. Waktu ketersediaan hasil survei untuk umum :							
	Tgl	Bln	Thn				
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>				

Lampiran 3. Arsitektur Data SPBE

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Cara Memperoleh Data	Produsen Data	Jenis Data	Klasifikasi Data	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Jadwal Pemutakhiran
D.E.1.001	Data LPPD	Merupakan laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran	Bertujuan untuk mengetahui laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah	manual (offline, MS Office)	Bagian Tata Pemerintahan	Data Laporan	Terbuka	Dokumen	Narasi	Tahunan
D.E.4.001	Data Capaian program dan pelaksanaan program dan kegiatan OPD	informasi tentang pencapaian program dan pelaksanaan program kegiatan OPD	bertujuan untuk mengetahui informasi pencapaian program dan pelaksanaan program kegiatan OPD	manual (offline, MS Office)	Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan	Data Kinerja	Terbatas	Persentase	Tabel/Grafik	Tahunan
D.E.4.001	Data Capaian program dan pelaksanaan program dan kegiatan OPD	informasi tentang pencapaian program dan pelaksanaan program kegiatan OPD	bertujuan untuk mengetahui informasi pencapaian program dan pelaksanaan program kegiatan OPD	manual (offline, MS Office)	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Data Kinerja	Terbatas	Persentase	Tabel/Grafik	Tahunan
D.E.4.002	Data Kegiatan OPD	Merupakan informasi tentang kegiatan yang dilakukan oleh OPD	bertujuan untuk mengetahui informasi tentang kegiatan yang dilakukan oleh OPD	manual (offline, MS Office)	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Data Aktivitas	Terbuka	Kegiatan	Tabel/Narasi	Tahunan
D.E.4.001	Data Capaian program dan pelaksanaan program dan kegiatan OPD	informasi tentang pencapaian program dan pelaksanaan program kegiatan OPD	bertujuan untuk mengetahui informasi pencapaian program dan pelaksanaan program kegiatan OPD	manual (offline, MS Office)	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Data Kinerja	Terbatas	Persentase	Tabel/Grafik	Tahunan
D.E.4.001	Data Capaian program dan pelaksanaan program dan kegiatan OPD	informasi tentang pencapaian program dan pelaksanaan program kegiatan OPD	bertujuan untuk mengetahui informasi pencapaian program dan pelaksanaan program kegiatan OPD	Aplikasi database M SQL	Bagian Administrasi Pembangunan	Data Kinerja	Terbatas	Persentase	Tabel/Grafik	Tahunan
D.E.4.002	Data Kegiatan OPD	Merupakan informasi tentang kegiatan yang dilakukan oleh OPD	bertujuan untuk mengetahui informasi tentang kegiatan yang dilakukan oleh OPD	Aplikasi database M SQL	Bagian Administrasi Pembangunan	Data Aktivitas	Terbuka	Kegiatan	Tabel/Narasi	Tahunan
D.E.5.001	Data Distribusi BBM	Data Distribusi BBM	mengetahui informasi tentang distribusi BBM	manual (offline, MS Office)	Bagian Perekonomian	Data Statistik	Terbuka	Liter	Tabel/Grafik	Bulanan
D.E.5.002	Data LPG bersubsidi	LPG bersubsidi	Mengetahui informasi mengenai LPG bersubsidi	manual (offline, MS Office)	Bagian Perekonomian	Data Statistik	Terbuka	Tabung	Tabel	Bulanan

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Cara Memperoleh Data	Produsen Data	Jenis Data	Klasifikasi Data	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Jadwal Pemutakhiran
D.E.5.003	Data penerima KUR mikro kecil	Data rincian Kreditur	Mengetahui informasi mengenai rincian kreditur	manual (offline, MS Office)	Bagian Perekonomian	Data Profil	Tertutup	Orang	Tabel	Tahunan
D.E.5.004	Data BUMD	Kebijakan Pembinaan dan Pemantauan BUUMD dan BLUD	Mengetahui tentang pembinaan dan pemantauan BUMN dan BLUD yang dilaksanakan	manual (offline, MS Office)	Bagian Perekonomian	Data Laporan	Terbatas	Unit	Tabel/Narasi	Tahunan
D.E.6.001	Data rumusan pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan air	Merupakan data perencanaan terkait sumber daya alam daerah kabupaten Poso	Mengetahui data perencanaan terkait sumber daya alam daerah kabupaten Poso	manual (offline, MS Office)	Bagian Sumber Daya Alam	Data Perencanaan	Terbuka	Dokumen	Narasi/Peta	Tahunan
D.E.7.001	Data pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Proses pemilihan paket pengadaan barang jasa dalam RUP	Mengetahui informasi proses pemilihan paket pengadaan barang dan jasa dalam RUP	manual (offline, MS Office)	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Data Pengadaan	Terbatas	Unit	Tabel	Bulanan
D.E.7.002	Data jasa secara elektronik	merupakan informasi mengenai jasa secara elektronik	bertujuan untuk mengetahui informasi mengenai jasa secara elektronik	manual (offline, MS Office)	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Data Pengadaan	Terbatas	Unit	Tabel	Bulanan
D.E.7.003	Data belanja online	Merupakan data yang berisi informasi mengenai produk secara online	Bertujuan untuk mengetahui informasi mengenai produk secara online	manual (offline, MS Office)	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Data Keuangan	Terbatas	Rupiah	Tabel	Bulanan
D.E.7.004	Data RUP (Rencana Umum Pengadaan)	Merupakan data yang berisi informasi rencana umum pengadaan barang dan jasa	Bertujuan untuk mengetahui informasi rencana umum pengadaan barang dan jasa	manual (offline, MS Office)	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Data Perencanaan	Terbuka	Dokumen	Tabel/Narasi	Tahunan
D.E.7.005	Data kinerja penyedia barang/jasa	Merupakan data yang berisi informasi penyedia barang dan jasa	Bertujuan untuk mengetahui informasi penyedia barang dan jasa	manual (offline, MS Office)	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Data Profil	Terbatas	Unit	Tabel	Tahunan
D.E.7.006	Data Riwayat proses pemilihan	merupakan informasi riwayat proses pemilihan	bertujuan untuk mengetahui informasi riwayat proses pemilihan	manual (offline, MS Office)	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Data Laporan	Terbatas	Unit	Tabel	Berkala (sesuai proses)
D.E.7.007	Data Kegiatan OPD	merupakan informasi mengenai realisasi kegiatan OPD	bertujuan untuk mengetahui informasi realisasi kegiatan OPD	manual (offline, MS Office)	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Data Aktivitas	Terbuka	Kegiatan	Tabel/Narasi	Tahunan

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Cara Memperoleh Data	Produsen Data	Jenis Data	Klasifikasi Data	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Jadwal Pemutakhiran
D.E.8.001	Data produk hukum (Perda, Perbub, SK)	Berisi informasi mengenai produk hukum	bertujuan untuk mengetahui informasi mengenai produk hukum	Aplikasi database M SQL	Bagian Hukum	Data Regulasi	Terbuka	Dokumen	Narasi	Berkala (sesuai penerbitan)
D.E.9.001	Data pegawai kesekretariatan (Gaji, TPP, DUK, Anjab)	Merupakan informasi tentang pegawai kesekretariatan (Gaji, TPP, DUK, Anjab)	bertujuan mengetahui pegawai kesekretariatan (Gaji, TPP, DUK, Anjab)	manual (offline, MS Office)	Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan	Data Kepegawaian	Tertutup	Orang	Tabel	Tahunan
D.E.9.002	Data Arsip Surat Masuk Surat Keluar	merupakan data yang berisi informasi data arsip surat masuk dan surat keluar	bertujuan mengetahui informasi tentang arsip surat masuk dan keluar	manual (offline, MS Office)	Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan	Data Arsip	Terbatas	Dokumen	Tabel	Bulanan
D.E.9.003	Data Aset Kesekretariatan daerah	merupakan data yang berisikan informasi aset kesekretariatan daerah	bertujuan mengetahui informasi yang berisikan aset kesekretariatan daerah	manual (offline, MS Office)	Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan	Data Inventaris	Terbatas	Unit	Tabel	Tahunan
D.E.10.001	Data kelembagaan	merupakan data yang berisi informasi mengenai kelembagaan	Bertujuan untuk mengetahui informasi mengenai kelembagaan	manual (offline, MS Office)	Bagian Organisasi	Data Profil	Terbuka	Unit	Tabel	Tahunan
D.E.10.002	Data analisis jabatan (dokumen anjab dan Perbub)	merupakan data yang berisi informasi analisis jabatan (dokumen dan perbub)	Bertujuan untuk mengetahui informasi analisis jabatan (dokumen dan perbub)	manual (offline, MS Office)	Bagian Organisasi	Data Kepegawaian	Terbatas	Dokumen	Narasi	Tahunan
D.E.10.003	Data Reformasi Birokrasi	Merupakan informasi mengenai perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur negara	Bertujuan mengetahui informasi mengenai perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur negara	manual (offline, MS Office)	Bagian Organisasi	Data Laporan	Terbuka	Dokumen	Narasi	Tahunan
D.E.10.004	Data SIPPN	Merupakan media informasi elektronik satu pintu meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi	Berfungsi untuk penyimpanan data dan pengolahan informasi satu pintu nasional	manual (offline, MS Office)	Bagian Organisasi	Data Informasi	Terbuka	Dokumen	Tabel/Narasi	Berkala (sesuai pembaruan)
D.E.10.005	Data Lakip (Laporan Kinerja Pemerintah Daerah)	Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah	Bertujuan mengetahui informasi tentang akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi	manual (offline, MS Office)	Bagian Organisasi	Data Laporan	Terbuka	Dokumen	Narasi	Tahunan
D.E.10.006	Dokumen SKM Dari OPD yang melakukan Pelayanan Publik	merupakan data yang berisi informasi dokumen SKM dari OPD yang melakukan pelayanan publik	Bertujuan mengetahui informasi dokumen SKM dari OPD yang melakukan pelayanan publik	manual (offline, MS Office)	Bagian Organisasi	Data Laporan	Terbuka	Dokumen	Tabel/Narasi	Tahunan

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Cara Memperoleh Data	Produsen Data	Jenis Data	Klasifikasi Data	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Jadwal Pemutakhiran
D.E.11.001	Data RPJMD	Merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 tahun	Bertujuan untuk mengetahui informasi perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 tahun	manual (offline, MS Office)	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Data Perencanaan	Terbuka	Dokumen	Narasi	5 Tahunan
D.E.11.002	Data RKPD	Merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun	Bertujuan untuk mengetahui informasi dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun	manual (offline, MS Office)	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Data Perencanaan	Terbuka	Dokumen	Narasi	Tahunan
D.E.11.003	Data Monev	Merupakan proses pengumpulan data realisasi program atau kegiatan	Bertujuan untuk mengetahui proses pengumpulan data realisasi	manual (offline, MS Office)	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Data Laporan	Terbatas	Unit	Tabel/Grafik	Triwulanan
D.E.11.004	Data SCHISTOSOMIASIS	Merupakan data yang berisi informasi penelitian tentang cacing parasit yang hidup di air pada daerah subtropis	Bertujuan untuk mengetahui informasi penelitian tentang cacing parasit yang hidup di air pada daerah subtropis	manual (offline, MS Office)	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Data Penelitian	Terbuka	Kasus	Tabel/Narasi	Berkala (sesuai penelitian)
D.E.11.005	Data Ekonomi dan Kemiskinan	Merupakan data yang berisi informasi kondisi ekonomi dan kemiskinan yang ada di masyarakat	Bertujuan untuk mengetahui informasi kondisi ekonomi dan kemiskinan yang ada di masyarakat	manual (offline, MS Office)	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Data Statistik	Terbuka	Orang	Tabel/Grafik	Tahunan
D.E.11.006	Data Renstra	Merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi	Bertujuan untuk mengetahui rencana lima tahun ke depan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi	manual (offline, MS Office)	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Data Perencanaan	Terbuka	Dokumen	Narasi	5 Tahunan
D.E.11.007	Data Renja	Merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun	Bertujuan untuk mengetahui dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun	manual (offline, MS Office)	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Data Perencanaan	Terbuka	Dokumen	Narasi	Tahunan
D.E.11.008	Data RKA	Merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD	Bertujuan untuk mengetahui perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD	manual (offline, MS Office)	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Data Perencanaan	Terbuka	Dokumen	Tabel/Narasi	Tahunan

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Cara Memperoleh Data	Produsen Data	Jenis Data	Klasifikasi Data	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Jadwal Pemutakhiran
D.E.11.009	Data DPA	Merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran	Bertujuan untuk mengetahui dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran	manual (offline, MS Office)	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Data Keuangan	Terbatas	Rupiah	Tabel	Tahunan
D.E.11.010	Data RPJMDES dan RPJMD	Merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun	bertujuan sebagai landasan perencanaan pembangunan daerah	manual (offline, MS Office)	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Data Perencanaan	Terbuka	Dokumen	Narasi	5 Tahunan
D.E.11.011	Data Perencanaan Kabupaten Berbasis usulan perencanaan desa dan kelurahan	Merupakan informasi usulan Perencanaan Kabupaten Berbasis usulan perencanaan desa dan kelurahan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi usulan Perencanaan Kabupaten Berbasis usulan perencanaan desa dan kelurahan	manual (offline, MS Office)	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Data Perencanaan	Terbuka	Dokumen	Tabel/Narasi	Tahunan
D.E.11.012	Data evaluasi Penganggaran Kab Poso	Merupakan data yang berisi informasi evaluasi pada penganggaran pada Kab Poso	Bertujuan untuk mengetahui informasi evaluasi pada penganggaran pada Kab Poso	manual (offline, MS Office)	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Data Laporan	Terbatas	Rupiah	Tabel/Grafik	Tahunan
D.E.12.001	Data Peremajaan data PNS, Profil PNS	Merupakan informasi mengenai penyegaran data pns serta profil pns yang ada	Bertujuan untuk mengetahui informasi mengenai penyegaran data pns serta profil pns yang ada	manual (offline, MS Office, PDF)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Data Kepegawaian	Tertutup	Orang	Tabel	Tahunan
D.E.12.002	Data Profile BKPSDM dan kegiatan BKPSDM	Merupakan informasi kegiatan yang dilaksanakan oleh badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia	Bertujuan untuk mengetahui informasi kegiatan yang dilaksanakan oleh badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia	manual (offline, MS Office, PDF)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Data Profil	Terbuka	Unit	Tabel/Narasi	Tahunan
D.E.12.003	Data profil dan informasi lain terkait PNS	Merupakan data yang berisi gambaran latar belakang PNS	Bertujuan untuk mengetahui data yang berisi gambaran latar belakang PNS	manual (offline, MS Office, PDF)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Data Kepegawaian	Tertutup	Orang	Tabel	Tahunan

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Cara Memperoleh Data	Produsen Data	Jenis Data	Klasifikasi Data	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Jadwal Pemutakhiran
D.E.12.004	Data SKP	Merupakan rencana dan target kinerja yang harus dicapai oleh pegawai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur serta disepakati pegawai dan atasannya	Bertujuan untuk mengetahui rencana dan target kinerja yang harus dicapai oleh pegawai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur serta disepakati pegawai dan atasannya	manual (offline, MS Office, PDF)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Data Kinerja	Tertutup	Unit	Tabel	Tahunan
D.E.12.005	Data pejabat eselon IV, III dan II	Merupakan data yang berisi informasi penjabat eselon IV, III dan II	Bertujuan untuk mengetahui informasi penjabat eselon IV, III dan II	manual (offline, MS Office, PDF)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Data Kepegawaian	Tertutup	Orang	Tabel	Tahunan
D.E.12.006	Data kehadiran / absensi pegawai	Merupakan data yang berisi Informasi Kehadiran Pegawai , TPP , Disiplin Pegawai	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Kehadiran Pegawai	manual (offline, MS Office, PDF)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Data Kepegawaian	Tertutup	Orang	Tabel	Bulanan
D.E.12.007	Data penilaian kinerja pegawai	Merupakan data yang digunakan sebagai acuan penilaian kinerja pegawai	Berfungsi untuk penilaian kinerja pegawai	manual (offline, MS Office, PDF)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Data Kinerja	Tertutup	Skor	Tabel	Tahunan
D.E.13.002	Data FMIS (Data perencanaan keuangan Pemerintah Kab Poso)	Merupakan aplikasi yang berbasis web yang dikenal dengan financial management informasi system	Bertujuan untuk mengetahui aplikasi yang berbasis web yang dikenal dengan financial management informasi system	manual (offline, MS Office)	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Data Keuangan	Terbatas	Rupiah	Tabel	Berkala (sesuai pembaruan)
D.E.13.003	Data pengelolaan keuangan Daerah	Merupakan data yang berisi informasi pengelolaan keuangan daerah secara terintergrasi	Bertujuan untuk mengetahui informasi pengelolaan keuangan daerah secara terintergrasi	manual (offline, MS Office)	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Data Keuangan	Terbatas	Rupiah	Tabel	Tahunan
D.E.13.004	Data pengelolaan Barang	Merupakan data yang berisi informasi manajemen barang dan aset daerah	Bertujuan untuk mengetahui informasi manajemen barang dan aset daerah	manual (offline, MS Office)	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Data Inventaris	Terbatas	Unit	Tabel	Tahunan
D.E.13.005	Data DAK	Merupakan data yang berisi informasi dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai	Bertujuan untuk mengetahui informasi dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan	manual (offline, MS Office)	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Data Keuangan	Terbatas	Rupiah	Tabel	Tahunan

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Cara Memperoleh Data	Produsen Data	Jenis Data	Klasifikasi Data	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Jadwal Pemutakhiran
D.E.13.006	Data pengelolaan keuangan daerah (SIKD)	Merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk dapat menerima dan menyajikan Informasi Keuangan Daerah yang dikirim dari aplikasi pengelolaan keuangan daerah ke Pusat	Bertujuan untuk mengetahui aplikasi yang dikembangkan untuk dapat menerima dan menyajikan Informasi Keuangan Daerah yang dikirim dari aplikasi pengelolaan keuangan daerah ke Pusat	manual (offline, MS Office)	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Data Keuangan	Terbatas	Rupiah	Tabel	Berkala (sesuai pembaruan)
D.E.13.007	Data Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Merupakan informasi yang berisi administrasi keuangan perangkat daerah	Bertujuan untuk mengetahui informasi yang berisi administrasi perangkat daerah	manual (offline, MS Office)	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Data Keuangan	Terbatas	Rupiah	Tabel	Tahunan
D.E.13.008	Data Administrasi Umum Perangkat Daerah	Merupakan informasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bertujuan untuk mengetahui informasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	manual (offline, MS Office)	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Data Administrasi	Terbatas	Dokumen	Tabel	Bulanan
D.E.14.001	Data Subjek dan Objek Pajak	Merupakan informasi mengenai pelayanan dan Optimalisasi Pajak daerah	Bertujuan untuk mengetahui informasi mengenai pelayanan dan Optimalisasi Pajak daerah	manual (offline, MS Office)	Badan Pendapatan Daerah	Data Pajak	Terbatas	Unit	Tabel	Tahunan
D.E.14.002	Data informasi publik Badan Pendapatan Daerah (profil, berita, kegiatan, dsb)	Merupakan data yang berisi informasi profil OPD	Bertujuan untuk mengetahui informasi profil OPD	manual (offline, MS Office)	Badan Pendapatan Daerah	Data Profil	Terbuka	Dokumen	Narasi	Berkala (sesuai pembaruan)
D.E.14.003	Data retribusi	Merupakan data yang berisi informasi mengenai pungutan daerah yang berguna sebagai pembayaran atas jasa atau pemberi izin	Bertujuan untuk mengetahui informasi mengenai pungutan daerah yang berguna sebagai pembayaran atas jasa atau pemberi izin	manual (offline, MS Office)	Badan Pendapatan Daerah	Data Keuangan	Terbatas	Rupiah	Tabel	Bulanan
D.E.14.004	data 11 jenis pajak daerah	Merupakan informasi mengenai 11 jenis pajak daerah pada masing masing daerah	Bertujuan untuk mengetahui informasi mengenai 11 jenis pajak daerah pada masing masing daerah	manual (offline, MS Office)	Badan Pendapatan Daerah	Data Pajak	Terbuka	Unit	Tabel	Tahunan
D.E.15.001	Data Penanganan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Di Kab Poso	Merupakan Informasi Data Penanganan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Di Kab Poso	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Data Penanganan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Di Kab Poso	manual (offline, MS Office)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Data Laporan	Terbuka	Unit	Tabel/Narasi	Berkala (sesuai kejadian)

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Cara Memperoleh Data	Produsen Data	Jenis Data	Klasifikasi Data	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Jadwal Pemutakhiran
D.E.15.002	Data Aset terkait kebencanaan	Merupakan informasi dari manajemen barang milik negara	Bertujuan untuk mengetahui informasi dari manajemen barang milik negara	manual (offline, MS Office)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Data Inventaris	Terbatas	Unit	Tabel	Tahunan
D.E.15.003	Data Sosialisasi Masyarakat kab Poso	Merupakan informasi mengenai Sosialisasi bencana dan penanggulangan Masyarakat kab Poso	Bertujuan untuk mengetahui informasi mengenai Sosialisasi bencana dan penanggulangan Masyarakat kab Poso	manual (offline, MS Office)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Data Aktivitas	Terbuka	Kegiatan	Tabel/Narasi	Tahunan
D.E.15.004	Data Kejadian Bencana Dan Korban Bencana	Merupakan informasi mengenai Kejadian Bencana Dan kondisi Korban Bencana	Bertujuan untuk mengetahui informasi mengenai Kejadian Bencana Dan kondisi Korban Bencana	manual (offline, MS Office)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Data Statistik	Terbuka	Kasus	Tabel/Grafik	Berkala (sesuai kejadian)
D.E.16.001	Data ormas yang melapor	Merupakan informasi yang berisikan data ormas-ormas yang melapor	Bertujuan untuk mengetahui informasi yang berisikan data ormas-ormas yang melapor	manual (offline, MS Office)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Data Profil	Terbuka	Unit	Tabel	Tahunan
D.E.17.001	Data hasil pengawasan	Merupakan Informasi yang berisikan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi yang berisikan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan	manual (offline, MS Office)	Inspektorat	Data Laporan	Terbatas	Unit	Tabel/Narasi	Berkala (sesuai pengawasan)
D.E.17.002	Data APIP	Merupakan data yang berisi informasi mengenai tugas aparat pengawasan internal pemerintah	Bertujuan untuk mengetahui informasi mengenai tugas aparat pengawasan internal pemerintah	manual (offline, MS Office)	Inspektorat	Data Profil	Terbatas	Orang	Tabel	Tahunan
D.E.17.003	Data Hasil Tindak lanjut	Merupakan data yang berisi informasi pemantauan tindak lanjut secara real time antara dengan entitas yang diperiksa	Bertujuan untuk mengetahui informasi pemantauan tindak lanjut secara real time antara dengan entitas yang diperiksa	manual (offline, MS Office)	Inspektorat	Data Laporan	Terbatas	Unit	Tabel	Berkala (sesuai tindakan)
D.E.17.004	Data Pengendalian Intern	Merupakan data yang berisi informasi pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah	informasi pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah	manual (offline, MS Office)	Inspektorat	Data Laporan	Terbatas	Dokumen	Narasi	Tahunan
D.E.17.005	Data Anggaran dan pengendalian barang	Merupakan data yang berisi informasi penganggaran dan pengendalian barang yang ada	Merupakan data yang berisi informasi penganggaran dan pengendalian barang yang ada	manual (offline, MS Office)	Inspektorat	Data Keuangan	Terbatas	Rupiah	Tabel	Tahunan

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Cara Memperoleh Data	Produsen Data	Jenis Data	Klasifikasi Data	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Jadwal Pemutakhiran
D.E.17.006	Data Pelaporan aset	Merupakan data yang berisi informasi pelaporan aset yang dilaksanakan	Bertujuan untuk mengetahui informasi pelaporan aset yang dilaksanakan	manual (offline, MS Office)	Inspektorat	Data Inventaris	Terbatas	Unit	Tabel	Tahunan
D.E.17.007	Data Pembinaan Jabatan	Merupakan data yang berisi informasi pembinaan jabatan yang dilaksanakan	Bertujuan untuk mengetahui informasi pembinaan jabatan yang dilaksanakan	manual (offline, MS Office)	Inspektorat	Data Aktivitas	Terbatas	Kegiatan	Tabel/Narasi	Tahunan
D.E.17.008	Data pelaporan adanya Gratifikasi	merupakan data yang digunakan untuk melaporkan gratifikasi	bertujuan untuk memudahkan Aparatur Sipil Negara dan pejabat negara lainnya dalam melaporkan penerimaan Gratifikasi	manual (offline, MS Office)	Inspektorat	Data Laporan	Tertutup	Kasus	Tabel	Berkala (sesuai laporan)
D.E.17.009	Data Investigasi	Merupakan Informasi yang berisikan Investigasi yang dilakukan pada OPD	Bertujuan untuk mengetahui Informasi yang berisikan Investigasi yang dilakukan pada OPD	manual (offline, MS Office)	Inspektorat	Data Laporan	Tertutup	Kasus	Tabel/Narasi	Berkala (sesuai investigasi)
D.E.18.001	Data aspirasi masyarakat	Merupakan data yang berisikan aspirasi dari masyarakat	Bertujuan untuk pendataan/penampung aspirasi masyarakat	manual (offline, MS Office)	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Data Laporan	Terbuka	Unit	Tabel/Narasi	Berkala (sesuai pengumpulan)
D.E.19.001	Data Rujukan Pasien	Merupakan data yang berisi informasi rujukan pasien secara online	Bertujuan untuk mengetahui informasi rujukan pasien secara online	manual (offline, MS Office)	Dinas Kesehatan	Data Kesehatan	Tertutup	Kasus	Tabel	Harian
D.E.19.002	Data Pengawasan Kualitas Air	Merupakan data yang berisi proses pengawasan	Bertujuan untuk mengetahui proses pengawasan	manual (offline, MS Office)	Dinas Kesehatan	Data Pengawasan	Terbuka	Unit	Tabel	Bulanan
D.E.19.003	Data Sanitasi	Merupakan data yang berisi informasi jumlah pemilik jamban	Bertujuan untuk mengetahui informasi jumlah pemilik jamban	manual (offline, MS Office)	Dinas Kesehatan	Data Statistik	Terbuka	Unit	Tabel	Tahunan
D.E.19.004	Data Pangan	Merupakan data yang berisi informasi jumlah rumah makan, restoran dan jasa boga	Bertujuan untuk mengetahui informasi jumlah rumah makan, restoran dan jasa boga	manual (offline, MS Office)	Dinas Kesehatan	Data Statistik	Terbuka	Unit	Tabel	Tahunan
D.E.19.005	Data TFU	Merupakan data yang berisi informasi penentuan usia kehamilan dan berat badan janin	Bertujuan untuk mengetahui informasi penentuan usia kehamilan dan berat badan janin	manual (offline, MS Office)	Dinas Kesehatan	Data Kesehatan	Tertutup	Kasus	Tabel	Harian

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Cara Memperoleh Data	Produsen Data	Jenis Data	Klasifikasi Data	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Jadwal Pemutakhiran
D.E.31.001	Data Profil Desa	Merupakan data yang berisikan informasi profil desa	Bertujuan untuk mengetahui informasi profil desa	manual (offline, MS Office)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Data Profil	Terbuka	Unit	Tabel	Tahunan
D.E.31.002	Data APBDes	Merupakan data yang berisikan informasi penggunaan anggaran desa	Bertujuan untuk mengetahui informasi penggunaan anggaran desa	manual (offline, MS Office)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Data Keuangan	Terbatas	Rupiah	Tabel	Tahunan
D.E.31.003	Data Musrenbangdes	Merupakan data yang berisikan informasi musyawarah perencanaan pembangunan desa	Bertujuan untuk mengetahui informasi musyawarah perencanaan pembangunan desa	manual (offline, MS Office)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Data Perencanaan	Terbuka	Kegiatan	Tabel/Narasi	Tahunan
D.E.31.004	Data RPJM Desa	Merupakan informasi rencana pembangunan jangka menengah desa	Bertujuan untuk mengetahui informasi rencana pembangunan jangka menengah desa	manual (offline, MS Office)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Data Perencanaan	Terbuka	Dokumen	Narasi	5 Tahunan
D.E.31.005	Data RKP Desa	Merupakan informasi rencana kerja pemerintah desa	Bertujuan untuk mengetahui informasi rencana kerja pemerintah desa	manual (offline, MS Office)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Data Perencanaan	Terbuka	Dokumen	Narasi	Tahunan
D.E.31.006	Data Penduduk Desa	Merupakan informasi penduduk desa	Bertujuan untuk mengetahui informasi penduduk desa	manual (offline, MS Office)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Data Statistik	Terbuka	Orang	Tabel	Tahunan
D.E.31.007	Data Potensi Desa	Merupakan informasi potensi desa	Bertujuan untuk mengetahui informasi potensi desa	manual (offline, MS Office)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Data Statistik	Terbuka	Unit	Tabel/Peta	Tahunan
D.E.31.008	Data Pembentukan Desa	Merupakan informasi tindakan Pemerintah daerah untuk melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa	Bertujuan untuk mengetahui informasi tindakan Pemerintah daerah untuk melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa	manual (offline, MS Office)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Data Laporan	Terbuka	Unit	Tabel	Berkala (sesuai perubahan)

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Cara Memperoleh Data	Produsen Data	Jenis Data	Klasifikasi Data	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Jadwal Pemutakhiran
D.E.31.009	Data Kerjasama Desa	Merupakan informasi berisikan kerjasama yang dilakukan oleh desa	Bertujuan untuk mengetahui informasi berisikan kerjasama yang dilakukan oleh desa	manual (offline, MS Office)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Data Aktivitas	Terbuka	Unit	Tabel	Tahunan
D.E.31.010	Data Kelembagaan Masyarakat	Merupakan informasi yang berisikan kelembagaan yang aktif dimasyarakat	Bertujuan untuk mengetahui informasi yang berisikan kelembagaan yang aktif dimasyarakat	manual (offline, MS Office)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Data Profil	Terbuka	Unit	Tabel	Tahunan
D.E.31.011	Data Lembaga Kemasyarakatan	Merupakan data yang berisikan Informasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif pada desa	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif pada desa	manual (offline, MS Office)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Data Profil	Terbuka	Unit	Tabel	Tahunan
D.E.31.012	Data Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya	Merupakan Informasi Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya	manual (offline, MS Office)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Data Aktivitas	Terbuka	Kegiatan	Tabel/Narasi	Tahunan
D.E.31.013	Data Bumdes dan Inovasi Daerah	Merupakan informasi mengenai badan usaha milik desa dan inovasi yang dilaksanakan pada daerah	Bertujuan untuk mengetahui informasi mengenai badan usaha milik desa dan inovasi yang dilaksanakan pada daerah	manual (offline, MS Office)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Data Profil	Terbuka	Unit	Tabel	Tahunan
D.E.32.001	Data Potensi Investasi	Merupakan data yang berisikan informasi investor yang berpotensi dalam investasi	Bertujuan untuk mengetahui informasi investor yang berpotensi dalam investasi	manual (offline, MS Office)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Data Statistik	Terbuka	Unit	Tabel	Tahunan
D.E.32.002	Data Pelaksanaan Expo	Merupakan data yang berisikan informasi pelaksanaan Expo	Bertujuan untuk mengetahui informasi pelaksanaan Expo	manual (offline, MS Office)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Data Aktivitas	Terbuka	Kegiatan	Tabel/Narasi	Berkala (sesuai pelaksanaan)
D.E.32.003	Data NIB (nomor Induk Berusaha)	Merupakan data yang berisikan informasi proses pembuatan NIB	Bertujuan untuk mengetahui informasi proses pembuatan NIB	manual (offline, MS Office)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Data Perizinan	Terbatas	Unit	Tabel	Bulanan

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Cara Memperoleh Data	Produsen Data	Jenis Data	Klasifikasi Data	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Jadwal Pemutakhiran
D.E.32.004	Data PBG (Persetujuan Pembangunan Gedung)	Merupakan data yang berisi informasi tentang perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung	Bertujuan untuk mengetahui informasi tentang perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung	manual (offline, MS Office)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Data Perizinan	Terbatas	Unit	Tabel	Bulanan
D.E.32.005	Data Izin Praktik bidang kesehatan	Merupakan data yang berisi informasi prosedur izin praktik dibidang kesehatan	Bertujuan untuk mengetahui informasi prosedur izin praktik dibidang kesehatan	manual (offline, MS Office)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Data Perizinan	Terbatas	Unit	Tabel	Bulanan
D.E.32.006	Data Investasi	Merupakan data yang berisi informasi mengenai aktivitas penanaman uang atau modal (aset berharga) untuk tujuan memperoleh keuntungan	Bertujuan untuk mengetahui informasi mengenai aktivitas penanaman uang atau modal (aset berharga) untuk tujuan memperoleh keuntungan	manual (offline, MS Office)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Data Statistik	Terbuka	Rupiah	Tabel/Grafik	Tahunan
D.E.32.007	Data Pengawasan Pelaku usaha	Merupakan data yang berisi informasi proses pengawasan yang dilakukan oleh pelaku usaha	Bertujuan untuk mengetahui informasi proses pengawasan yang dilakukan oleh pelaku usaha	manual (offline, MS Office)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Data Pengawasan	Terbatas	Unit	Tabel	Tahunan
D.E.32.008	Data Pengaduan	Merupakan data yang berisi informasi mengenai laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya Pelanggaran terhadap Kode Etik	Bertujuan untuk mengetahui informasi mengenai laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya Pelanggaran terhadap Kode Etik	manual (offline, MS Office)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Data Laporan	Terbatas	Pengaduan	Tabel	Berkala (sesuai laporan)
D.E.32.009	Data Profil OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Merupakan data yang berisi informasi penggunaan aplikasi peduli lindungi untuk masyarakat	Bertujuan untuk informasi OPD	manual (offline, MS Office)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Data Profil	Terbuka	Dokumen	Narasi	Tahunan
D.E.32.010	Data SKM	Merupakan data yang berisi informasi survei yang dilakukan dalam pelayanan kepuasan masyarakat	Bertujuan untuk mengetahui informasi survei yang dilakukan dalam pelayanan kepuasan masyarakat	manual (offline, MS Office)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Data Laporan	Terbuka	Skor	Tabel/Grafik	Tahunan

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Cara Memperoleh Data	Produsen Data	Jenis Data	Klasifikasi Data	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Jadwal Pemutakhiran
D.E.32.011	Data perizinan selain OSS	Merupakan data yang berisikan permohonan perizinan	Berfungsi sebagai identifikasi permohonan perizinan	manual (offline, MS Office)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Data Perizinan	Terbatas	Unit	Tabel	Bulanan
D.E.33.001	Data arsitektur aplikasi	Merupakan data yang berisi informasi rancangan desain menyeluruh dari sebuah sistem aplikasi beserta infrastruktur pendukungnya	Bertujuan untuk mengetahui informasi rancangan desain menyeluruh dari sebuah sistem aplikasi beserta infrastruktur pendukungnya	manual (offline, MS Office)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Informasi	Terbatas	Dokumen	Narasi	Tahunan
D.E.33.002	Database Guru	Merupakan data yang berisi informasi riwayat guru yang masih aktif maupun sudah tidak	Bertujuan untuk mengetahui informasi riwayat guru yang masih aktif maupun sudah tidak	manual (offline, MS Office)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Kepegawaian	Tertutup	Orang	Tabel	Tahunan
D.E.33.003	Database Kepegawaian	Merupakan data yang berisi informasi riwayat pegawai yang masih aktif maupun sudah tidak	Bertujuan untuk mengetahui informasi riwayat pegawai yang masih aktif maupun sudah tidak	manual (offline, MS Office)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Kepegawaian	Tertutup	Orang	Tabel	Tahunan
D.E.33.004	Database Sekolah	Merupakan data yang berisi informasi riwayat sekolah yang masih aktif maupun sudah tidak	Bertujuan untuk mengetahui informasi riwayat sekolah yang masih aktif maupun sudah tidak	manual (offline, MS Office)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Profil	Terbuka	Unit	Tabel	Tahunan
D.E.33.005	Database Tendik	Merupakan data yang berisi informasi peserta tenaga didik yang masih aktif maupun tidak aktif	Bertujuan untuk mengetahui informasi sistem yang berfungsi mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang dapat disajikan kepada masyarakat	manual (offline, MS Office)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Kepegawaian	Tertutup	Orang	Tabel	Tahunan

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Cara Memperoleh Data	Produsen Data	Jenis Data	Klasifikasi Data	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Jadwal Pemutakhiran
D.E.33.006	Database siswa	Merupakan data yang berisi informasi siswa yang aktif dan tidak aktif	Bertujuan untuk mengetahui informasi sistem yang berfungsi mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang dapat disajikan kepada masyarakat	manual (offline, MS Office)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Profil	Tertutup	Orang	Tabel	Tahunan
D.E.33.007	Database Dapodik	Merupakan data yang berisi informasi dasar untuk penyaluran dana BOS, tetapi juga sebagai data untuk memberikan tunjangan profesi guru, dan dapat dijadikan dasar perencanaan program-program pendidikan lainnya	Bertujuan untuk mengetahui informasi dasar untuk penyaluran dana BOS, tetapi juga sebagai data untuk memberikan tunjangan profesi guru, dan dapat dijadikan dasar perencanaan program-program pendidikan lainnya	manual (offline, MS Office)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Pendidikan	Terbatas	Unit	Tabel	Tahunan
D.E.33.008	Data Profil OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Merupakan data yang berisi informasi Profil dinas pendidikan dan kebudayaan	bertujuan untuk mengetahui informasi Profil dinas pendidikan dan kebudayaan	manual (offline, MS Office)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Profil	Terbuka	Dokumen	Narasi	Tahunan
D.E.33.009	Data Kebudayaan Daerah	Merupakan data yang berisi informasi anggaran pendapatan dan belanja kebudayaan	Berfungsi untuk mengetahui informasi anggaran pendapatan dan belanja kebudayaan	manual (offline, MS Office)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Keuangan	Terbatas	Rupiah	Tabel	Tahunan
D.E.33.010	Data BOS	Merupakan data yang berisi informasi anggaran pendapatan dan belanja kebudayaan	Berfungsi untuk mengetahui informasi anggaran pendapatan dan belanja kebudayaan	manual (offline, MS Office)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Keuangan	Terbatas	Rupiah	Tabel	Tahunan
D.E.33.011	Data Aset dan Data pembelajaran	Merupakan data yang berisi informasi aset pembelajaran pada dinas pendidikan	Bertujuan untuk mengetahui informasi penganggaran dan perubahan dari penganggaran tersebut	manual (offline, MS Office)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Inventaris	Terbatas	Unit	Tabel	Tahunan
D.E.34.001	Data Organisasi Kepemudaan	Merupakan data yang berisi informasi jumlah organisasi kepemudaan	Bertujuan untuk mengetahui informasi jumlah organisasi kepemudaan	manual (offline, MS Office)	Dinas Pemuda dan Olahraga	Data Statistik	Terbuka	Unit	Tabel	Tahunan

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Cara Memperoleh Data	Produsen Data	Jenis Data	Klasifikasi Data	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Jadwal Pemutakhiran
D.E.34.002	Data Wirausaha olahraga	Merupakan data yang berisi informasi wirausaha yang ada pada OPD	Bertujuan untuk mengetahui informasi wirausaha yang ada pada OPD	manual (offline, MS Office)	Dinas Pemuda dan Olahraga	Data Profil	Terbuka	Unit	Tabel	Tahunan
D.E.34.003	Data Cabang Olahraga	Merupakan data yang berisi informasi jumlah cabang olahraga yang bergabung	Bertujuan untuk mengetahui informasi jumlah cabang olahraga yang bergabung	manual (offline, MS Office)	Dinas Pemuda dan Olahraga	Data Statistik	Terbuka	Unit	Tabel	Tahunan
D.E.34.004	Data Olahraga Rekreasi yang berkembang di masyarakat	Merupakan data yang berisi Informasi Data Olahraga Rekreasi yang berkembang di masyarakat	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Data Olahraga Rekreasi yang berkembang di masyarakat	manual (offline, MS Office)	Dinas Pemuda dan Olahraga	Data Statistik	Terbuka	Unit	Tabel	Tahunan
D.E.35.001	Data pengunjung perpustakaan	Merupakan data yang berisi informasi jumlah pengunjung perpustakaan	Bertujuan untuk mengetahui informasi jumlah pengunjung perpustakaan	manual (offline, MS Office)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Data Statistik	Terbuka	Orang	Tabel/Grafik	Bulanan
D.E.35.002	Data anggota perpustakaan	Merupakan data yang berisi informasi umum anggota perpustakaan	Bertujuan untuk mengetahui informasi jumlah pengunjung perpustakaan	manual (offline, MS Office)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Data Profil	Terbuka	Orang	Tabel	Tahunan
D.E.35.003	Data daftar buku	Merupakan data yang berisi informasi mengenai daftar buku yang tersedia	Bertujuan untuk mengetahui informasi mengenai daftar buku yang tersedia	manual (offline, MS Office)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Data Inventaris	Terbuka	Unit	Tabel	Tahunan
D.E.35.004	Data arsip Pemerintahan	Merupakan data pengelolaan arsip pemerintahan kabupaten poso	Bertujuan untuk pengelolaan dan arsip pemerintahan	manual (offline, MS Office)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Data Arsip	Terbatas	Dokumen	Tabel	Tahunan
D.E.35.005	Data penunjang perpustakaan	Merupakan data yang berisi informasi mengenai pengunjung yang meminjam buku	Bertujuan untuk mengetahui informasi mengenai pengunjung yang meminjam buku	manual (offline, MS Office)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Data Statistik	Terbuka	Unit	Tabel	Bulanan
D.E.36.001	Data Statistik Perikanan Tangkap	Merupakan data yang berisi informasi jumlah dari rata rata tangkapan ikan	Bertujuan untuk mengetahui informasi jumlah dari rata rata tangkapan ikan	manual (offline, MS Office)	Dinas Perikanan dan Kelautan	Data Statistik	Terbuka	Ton	Tabel/Grafik	Tahunan
D.E.37.001	Data Kunjungan Wistawan Mancanegara dan nusantara	Merupakan data yang Menyediakan data pariwisata yang ada di Kabupaten Poso	Bertujuan untuk Menyediakan data pariwisata yang ada di Kabupaten Poso	manual (offline, MS Office)	Dinas Pariwisata	Data Statistik	Terbuka	Orang	Tabel/Grafik	Tahunan
D.E.37.002	Data Objek Wisata	Merupakan data yang berisi informasi jumlah objek wisata yang ada di Kabupaten Poso	Bertujuan untuk mengetahui informasi jumlah objek wisata yang ada di Kabupaten Poso	manual (offline, MS Office)	Dinas Pariwisata	Data Statistik	Terbuka	Unit	Tabel/Peta	Tahunan

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Cara Memperoleh Data	Produsen Data	Jenis Data	Klasifikasi Data	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Jadwal Pemutakhiran
D.E.37.003	Data TDUP	Merupakan data yang berisi informasi pengurusan tanda daftar usaha pariwisata yang ada	Bertujuan untuk mengetahui informasi pengurusan tanda daftar usaha pariwisata yang ada	manual (offline, MS Office)	Dinas Pariwisata	Data Perizinan	Terbatas	Unit	Tabel	Bulanan
D.E.37.004	Data promosi event daerah yang terlaksana selama 1 tahun	Merupakan data yang berisi informasi media promosi event daerah yang dilaksanakan selama setahun	Bertujuan untuk mengetahui informasi media promosi event daerah yang dilaksanakan selama setahun	manual (offline, MS Office)	Dinas Pariwisata	Data Aktivitas	Terbuka	Kegiatan	Tabel/Narasi	Tahunan
D.E.37.005	Data promosi event Luarnegeri yang terlaksana selama 1 tahun	Merupakan data yang berisi informasi media promosi luar negeri daerah yang dilaksanakan selama setahun	Bertujuan untuk mengetahui informasi media promosi luar negeri daerah yang dilaksanakan selama setahun	manual (offline, MS Office)	Dinas Pariwisata	Data Aktivitas	Terbuka	Kegiatan	Tabel/Narasi	Tahunan
D.E.37.006	Data Tingkat Hunian Akomodasi dikelola oleh Pemda	Merupakan data yang berisi informasi tingkat hunian akomodasi dikelola oleh pemda	Bertujuan untuk mengetahui informasi tingkat hunian akomodasi dikelola oleh pemda	manual (offline, MS Office)	Dinas Pariwisata	Data Statistik	Terbuka	Persentase	Tabel/Grafik	Tahunan
D.E.37.007	Data Tenaga Kerja Pariwisata yg disertifikasi	Merupakan data yang berisi informasi jumlah tenaga kerja pariwisata yang disertifikasi	Bertujuan untuk mengetahui informasi jumlah tenaga kerja pariwisata yang disertifikasi	manual (offline, MS Office)	Dinas Pariwisata	Data Profil	Terbuka	Orang	Tabel	Tahunan
D.E.37.008	Data pemberdayaan masyarakat	Merupakan data yang berisi informasi pemberdayaan masyarakat pada objek wisata	Bertujuan untuk mengetahui informasi pemberdayaan masyarakat pada objek wisata	manual (offline, MS Office)	Dinas Pariwisata	Data Aktivitas	Terbuka	Kegiatan	Tabel/Narasi	Tahunan
D.E.37.009	Data pembinaan kemitraan usaha pariwisata	Merupakan data yang berisi informasi pembinaan kemitraan usaha pariwisata	Bertujuan untuk mengetahui informasi pembinaan kemitraan usaha pariwisata	manual (offline, MS Office)	Dinas Pariwisata	Data Aktivitas	Terbuka	Unit	Tabel	Tahunan
D.E.38.001	Data Populasi Ternak	Merupakan data yang berisi informasi Jumlah Ternak dan Inseminasi Buatan	Bertujuan untuk mengetahui informasi Jumlah Ternak dan Inseminasi Buatan	manual (offline, MS Office)	Dinas Pertanian	Data Statistik	Terbuka	Ekor	Tabel	Tahunan
D.E.38.002	Data Inseminasi Buatan	Merupakan data yang berisi informasi inseminasi buatan pada hewan ternak	Bertujuan untuk mengetahui informasi inseminasi buatan pada hewan ternak	manual (offline, MS Office)	Dinas Pertanian	Data Statistik	Terbuka	Unit	Tabel	Tahunan
D.E.38.003	Data Tanaman Pangan dan Hortikultura	Merupakan data yang berisi informasi Produksi dan Luas Panen	Bertujuan untuk mengetahui informasi Produksi dan Luas Panen	manual (offline, MS Office)	Dinas Pertanian	Data Statistik	Terbuka	Ton/Hektar	Tabel/Grafik	Tahunan

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Cara Memperoleh Data	Produsen Data	Jenis Data	Klasifikasi Data	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Jadwal Pemutakhiran
D.E.38.004	Data Tanaman Perkebunan	Merupakan data yang berisi informasi luas panen tanaman perkebunan	Bertujuan untuk mengetahui informasi Produksi dan Luas Panen	manual (offline, MS Office)	Dinas Pertanian	Data Statistik	Terbuka	Hektar	Tabel/Grafik	Tahunan
D.E.38.005	Data Kesehatan Hewan	Merupakan data yang berisi informasi riwayat kesehatan hewan	Bertujuan untuk mengetahui informasi riwayat kesehatan hewan	manual (offline, MS Office)	Dinas Pertanian	Data Kesehatan	Tertutup	Kasus	Tabel	Tahunan
D.E.38.006	Data Lalu Lintas Ternak	Merupakan informasi keluar-masuk antar daerah/pulau, mutasi dan keluar-masuk daerah produk peternakan	Bertujuan untuk mengetahui informasi keluar-masuk antar daerah/pulau, mutasi dan keluar-masuk daerah produk peternakan	manual (offline, MS Office)	Dinas Pertanian	Data Statistik	Terbuka	Ekor	Tabel	Bulanan
D.E.38.007	Data Penyusunan rencana	Merupakan data yang berisi informasi penyusunan rencana	Bertujuan untuk mengetahui informasi penyusunan rencana	manual (offline, MS Office)	Dinas Pertanian	Data Perencanaan	Terbuka	Dokumen	Narasi	Tahunan
D.E.38.008	Data pelaporan kegiatan pertanian	Merupakan data yang berisi pelaporan yang dilaksanakan secara online	Bertujuan untuk mengetahui pelaporan yang dilaksanakan secara online	manual (offline, MS Office)	Dinas Pertanian	Data Laporan	Terbuka	Unit	Tabel	Tahunan
D.E.38.009	Data penyuluh pertanian	Merupakan data yang berisi informasi penyuluh yang ada pada dinas pertanian	Bertujuan untuk mengetahui informasi penyuluh yang ada pada dinas pertanian	manual (offline, MS Office)	Dinas Pertanian	Data Profil	Terbuka	Orang	Tabel	Tahunan
D.E.38.010	Data pengajuan proposal	Merupakan data yang berisi informasi usulan aplikasi	Bertujuan untuk mengetahui informasi usulan aplikasi	manual (offline, MS Office)	Dinas Pertanian	Data Perencanaan	Terbatas	Unit	Tabel	Berkala (sesuai pengajuan)
D.E.38.011	Data Pemotongan Ternak	Merupakan data yang berisi informasi jumlah pemotongan ternak	Bertujuan untuk mengetahui informasi jumlah pemotongan ternak	manual (offline, MS Office)	Dinas Pertanian	Data Statistik	Terbuka	Ekor	Tabel	Tahunan
D.E.38.012	Data Populasi Ternak	Merupakan data jumlah ternak	Berfungsi sebagai laporan populasi ternak	manual (offline, MS Office)	Dinas Pertanian	Data Statistik	Terbuka	Ekor	Tabel	Tahunan
D.E.39.001	Data Biodata data kependudukan berangkat dari desa	Merupakan data yang berisi informasi kependudukan berangkat dari desa	Bertujuan untuk mengetahui informasi kependudukan berangkat dari desa	manual (offline, MS Office)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Data Statistik	Terbuka	Orang	Tabel	Tahunan

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Cara Memperoleh Data	Produsen Data	Jenis Data	Klasifikasi Data	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Jadwal Pemutakhiran
D.E.39.002	Data Pegawai	Merupakan data yang berisi Informasi Kehadiran Pegawai dan Disiplin Pegawai	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Kehadiran Pegawai dan Disiplin Pegawai	manual (offline, MS Office)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Data Kepegawaian	Tertutup	Orang	Tabel	Bulanan
D.E.39.003	Data Monitoring perencanaan	Merupakan data yang berisi informasi pengawasan perencanaan yang dilakukan	Bertujuan untuk mengetahui informasi pengawasan perencanaan yang dilakukan	manual (offline, MS Office)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Data Laporan	Terbatas	Unit	Tabel	Triwulanan
D.E.39.004	Data Perencanaan Desa	Merupakan data yang berisi informasi perencanaan yang dilakukan Desa	Bertujuan untuk mengetahui Sinkronisasi Program Desa dengan RPJMD	manual (offline, MS Office)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Data Perencanaan	Terbuka	Dokumen	Tabel/Narasi	Tahunan
D.E.39.005	Data Statistik Sektoral	Merupakan data yang berisi Informasi Data Sektoral Seluruh OPD Poso	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Data Sektoral Seluruh OPD Poso	manual (offline, MS Office)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Data Statistik	Terbuka	Unit	Tabel/Grafik	Tahunan
D.E.39.006	Data menara telemunikasi	Merupakan data yang berisi Informasi menara telemunikasi	Bertujuan untuk mengetahui Informasi menara telemunikasi	manual (offline, MS Office)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Data Infrastruktur	Terbuka	Unit	Tabel/Peta	Tahunan
D.E.39.007	Data Insfrastruktur Jaringan	Merupakan data yang berisi Informasi insfrastruktur jaringan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi insfrastruktur jaringan	manual (offline, MS Office)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Data Infrastruktur	Terbuka	Unit	Tabel/Peta	Tahunan
D.E.39.008	Data informasi publik Pemerintah Kabupaten Poso	Merupakan data yang berisi informasi profil dinas komunikasi informatika dan persandian	-	manual (offline, MS Office)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Data Profil	Terbuka	Dokumen	Narasi	Tahunan
D.E.39.009	Data Kehumasan kab Poso	Merupakan data yang berisi Informasi Kehumasan kab Poso	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Kehumasan kab Poso	manual (offline, MS Office)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Data Aktivitas	Terbuka	Kegiatan	Tabel/Narasi	Berkala (sesuai kegiatan)
D.E.40.001	Data Linmas	Merupakan data yang berisi informasi warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana	Bertujuan untuk mengetahui informasi warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana	manual (offline, MS Office)	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Data Profil	Terbuka	Orang	Tabel	Tahunan

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Cara Memperoleh Data	Produsen Data	Jenis Data	Klasifikasi Data	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Jadwal Pemutakhiran
D.E.40.002	Data Jumlah Penindakan	Merupakan data yang berisi informasi jumlah penindakan pada bencana	Bertujuan untuk mengetahui informasi jumlah penindakan pada bencana	manual (offline, MS Office)	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Data Statistik	Terbuka	Unit	Tabel	Berkala (sesuai kejadian)
D.E.40.003	Data Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Perlindungan Terhadap Masyarakat	Merupakan Informasi Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Perlindungan Terhadap Masyarakat	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Perlindungan Terhadap Masyarakat	manual (offline, MS Office)	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Data Laporan	Terbuka	Unit	Tabel/Narasi	Berkala (sesuai kejadian)
D.E.40.004	Data Penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	Merupakan data yang berisi informasi Penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	Bertujuan untuk mengetahui informasi Penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	manual (offline, MS Office)	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Data Laporan	Terbuka	Unit	Tabel/Narasi	Berkala (sesuai kejadian)
D.E.41.001	Data umum yang berhubungan dengan pasien	Merupakan informasi yang berhubungan dengan pasien diinputkan secara manual oleh operator server	Bertujuan untuk mengetahui informasi surat keterangan yang dibutuhkan warga kelurahan Gebang Rejo	manual (offline, MS Office)	Rumah Sakit Umum Daerah	Data Kesehatan	Tertutup	Kasus	Tabel	Harian
D.E.41.002	Data sdm rs, Digunakan untuk pembuatan SEP BPJS (Surat Eligibilitas Pasien)	Merupakan informasi mengenai cara pembuatan SEP BPJS (Surat Eligibilitas Pasien)	Bertujuan untuk mengetahui informasi mengenai cara pembuatan SEP BPJS (Surat Eligibilitas Pasien)	manual (offline, MS Office)	Rumah Sakit Umum Daerah	Data Kepegawaian	Tertutup	Orang	Tabel	Tahunan
D.E.41.003	Data pasien	Merupakan informasi umum pasien RSUD	Bertujuan untuk mengetahui informasi umum pasien RSUD	manual (offline, MS Office)	Rumah Sakit Umum Daerah	Data Kesehatan	Tertutup	Kasus	Tabel	Harian
D.E.41.004	Data hasil pemeriksaan laboratorium	Merupakan data yang berisi informasi fasilitas laboratorium pada rumah sakit umum daerah	-	manual (offline, MS Office)	Rumah Sakit Umum Daerah	Data Kesehatan	Tertutup	Kasus	Tabel	Harian
D.E.41.005	data ketersediaan tempat tidur	Merupakan data yang berisikan informasi ketersediaan tempat tidur pada rumah sakit umum daerah	Bertujuan untuk mengetahui informasi umum pasien RSUD	manual (offline, MS Office)	Rumah Sakit Umum Daerah	Data Inventaris	Terbatas	Unit	Tabel	Harian
D.E.41.006	data hari rawat	Merupakan data yang berisikan informasi hari rawat yang ada pada RSUD	Bertujuan untuk mengetahui informasi hari rawat yang ada pada RSUD	manual (offline, MS Office)	Rumah Sakit Umum Daerah	Data Kesehatan	Tertutup	Hari	Tabel	Harian

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Cara Memperoleh Data	Produsen Data	Jenis Data	Klasifikasi Data	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Jadwal Pemutakhiran
D.E.41.007	data kunjungan	Merupakan data yang berisikan informasi kunjungan yang dilakukan keluarga pasien	Bertujuan untuk mengetahui informasi kunjungan yang dilakukan keluarga pasien	manual (offline, MS Office)	Rumah Sakit Umum Daerah	Data Statistik	Terbatas	Orang	Tabel	Harian
D.E.41.008	data penyakit	Merupakan data yang berisikan informasi riwayat penyakit yang diderita pasien	bertujuan untuk mengetahui informasi riwayat penyakit yang diderita pasien	manual (offline, MS Office)	Rumah Sakit Umum Daerah	Data Kesehatan	Tertutup	Kasus	Tabel	Harian
D.E.41.009	data sdm rs	Merupakan data yang berisikan informasi dokter, perawat, farmasi dan petugas kesehatan lainnya	Bertujuan untuk mengetahui informasi riwayat penyakit yang diderita pasien	manual (offline, MS Office)	Rumah Sakit Umum Daerah	Data Kepegawaian	Tertutup	Orang	Tabel	Tahunan
D.E.42.001	Data Kependudukan Kecamatan Poso Kota	Merupakan data yang Berisi informasi jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Poso kota	Bertujuan untuk mengetahui informasi jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Poso kota	manual (offline, MS Office)	Camat Poso Kota	Data Statistik	Terbuka	Orang	Tabel	Tahunan
D.E.42.002	Data surat keterangan umum	Merupakan data yang berisikan informasi surat keterangan umum yang dibutuhkan	Bertujuan untuk mengetahui informasi surat keterangan umum yang dibutuhkan	manual (offline, MS Office)	Camat Poso Kota	Data Administrasi	Terbatas	Unit	Tabel	Bulanan
D.E.42.003	Data surat penyerahan tanah	Merupakan data yang berisikan informasi surat penyerahan tanah yang dilaksanakan pada kecamatan Poso Kota	Bertujuan untuk mengetahui informasi surat keterangan umum yang dibutuhkan	manual (offline, MS Office)	Camat Poso Kota	Data Administrasi	Terbatas	Unit	Tabel	Berkala (sesuai pengajuan)
D.E.43.001	Data Surat Keterangan	Merupakan data yang berisikan informasi surat keterangan yang dibutuhkan warga kelurahan Gebang Rejo	Bertujuan untuk mengetahui informasi surat tanda terima pembayaran pajak yang dilakukan oleh warga kelurahan Gebang Rejo	manual (offline, MS Office)	Lurah Gebang Rejo	Data Administrasi	Terbatas	Unit	Tabel	Bulanan
D.E.43.002	Data STTS PBB-P2	Merupakan data yang berisikan informasi surat tanda terima pembayaran pajak yang dilakukan oleh warga kelurahan Gebang Rejo	Bertujuan untuk mengetahui informasi surat tanda terima pembayaran pajak yang dilakukan oleh warga kelurahan Gebang Rejo	manual (offline, MS Office)	Lurah Gebang Rejo	Data Administrasi	Terbatas	Unit	Tabel	Bulanan

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Cara Memperoleh Data	Produsen Data	Jenis Data	Klasifikasi Data	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Jadwal Pemutakhiran
D.E.43.003	Data Kependudukan Lurah Gebang Rejo	Merupakan data yang berisikan informasi kependudukan yang ada di kelurahan Gebang Rejo	Bertujuan untuk mengetahui informasi kependudukan yang ada di kelurahan Gebang Rejo	manual (offline, MS Office)	Lurah Gebang Rejo	Data Statistik	Terbuka	Orang	Tabel	Tahunan
D.E.43.004	Data Lansia	Merupakan data yang berisi informasi jumlah dan kondisi lansia yang ada pada kelurahan Gebang Rejo	Bertujuan untuk mengetahui informasi jumlah dan kondisi lansia yang ada pada kelurahan Gebang Rejo	manual (offline, MS Office)	Lurah Gebang Rejo	Data Statistik	Terbuka	Orang	Tabel	Tahunan
D.E.43.005	Data Layanan Kesehatan	Merupakan data yang berisikan informasi fasilitas dan layanan kesehatan pada kelurahan Gebang Rejo	Bertujuan untuk mengetahui informasi fasilitas dan layanan kesehatan pada kelurahan Gebang Rejo	manual (offline, MS Office)	Lurah Gebang Rejo	Data Profil	Terbuka	Unit	Tabel	Tahunan
D.E.43.006	Data Siskamling	Merupakan Informasi fungsi dari siskamling yang ada dikelurahan Gebang Rejo	Bertujuan untuk mengetahui Informasi fungsi dari siskamling yang ada dikelurahan Gebang Rejo	manual (offline, MS Office)	Lurah Gebang Rejo	Data Aktivitas	Terbuka	Unit	Tabel/Narasi	Tahunan
D.E.43.007	Data Hansip	Merupakan data yang berisi informasi laporan keamanan yang ada dikelurahan Gebang Rejo	Bertujuan untuk mengetahui informasi kependudukan yang ada di lurah Gebang Rejo Timur	manual (offline, MS Office)	Lurah Gebang Rejo	Data Laporan	Terbuka	Unit	Tabel	Berkala (sesuai laporan)
D.E.43.008	Data Laporan Keamanan Kelurahan	Merupakan data yang berisi informasi laporan keamanan yang ada dikelurahan Gebang Rejo	Bertujuan untuk mengetahui informasi kependudukan yang ada di lurah Gebang Rejo Timur	manual (offline, MS Office)	Lurah Gebang Rejo	Data Laporan	Terbuka	Unit	Tabel	Berkala (sesuai laporan)
D.E.43.009	Data Keuangan	Merupakan data yang berisikan laporan keuangan pada kelurahan Gebang Rejo	Bertujuan untuk mengetahui laporan keuangan pada kelurahan Gebang Rejo	manual (offline, MS Office)	Lurah Gebang Rejo	Data Keuangan	Terbatas	Rupiah	Tabel	Tahunan
D.E.43.010	Data Kepegawaian	Merupakan data yang berisikan jumlah pegawai dan jabatan pegawai	Bertujuan untuk mengetahui jumlah pegawai dan jabatan pegawai	manual (offline, MS Office)	Lurah Gebang Rejo	Data Kepegawaian	Tertutup	Orang	Tabel	Tahunan

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Cara Memperoleh Data	Produsen Data	Jenis Data	Klasifikasi Data	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Jadwal Pemutakhiran
D.E.43.011	Data DTKS	Merupakan informasi data induk yang berisi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial	Bertujuan untuk mengetahui informasi data induk yang berisi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial	manual (offline, MS Office)	Lurah Gebang Rejo	Data Statistik	Terbatas	Orang	Tabel	Tahunan
D.E.43.012	Data Laporan Keamanan Kelurahan	Merupakan data yang berisi informasi laporan keamanan yang ada di kelurahan Gebang Rejo	Bertujuan untuk mengetahui informasi kependudukan yang ada di lurah Gebang Rejo Timur	manual (offline, MS Office)	Lurah Gebang Rejo	Data Laporan	Terbuka	Unit	Tabel	Berkala (sesuai laporan)
D.E.44.001	Data Pendudukan Lurah Gebang Rejo Timur	Merupakan data yang berisi informasi kependudukan yang ada di lurah Gebang Rejo Timur	Bertujuan untuk mengetahui informasi kependudukan yang ada di lurah Gebang Rejo Timur	manual (offline, MS Office)	Lurah Gebang Rejo Timur	Data Statistik	Terbuka	Orang	Tabel	Tahunan
D.E.44.002	Data Pendudukan	Merupakan data yang berisi informasi kependudukan yang ada di lurah Gebang Rejo Timur	Bertujuan untuk mengetahui informasi kependudukan yang ada di lurah Gebang Rejo Timur	manual (offline, MS Office)	Lurah Gebang Rejo Timur	Data Statistik	Terbuka	Orang	Tabel	Tahunan
D.E.45.001	Data imunisasi anak	Merupakan data yang berisi informasi anak yang mendapatkan imunisasi	Bertujuan untuk mengetahui informasi anak yang mendapatkan imunisasi	Internal OPD	Puskesmas Kayamanya	Data Kesehatan	Tertutup	Orang	Tabel	Bulanan
D.E.45.002	Data pemantauan ibu dan bayi	Merupakan data yang berisi informasi pemantauan yang dilakukan pada ibu dan bayi	Bertujuan untuk mengetahui informasi pemantauan yang dilakukan pada ibu dan bayi	Internal OPD	Puskesmas Kayamanya	Data Kesehatan	Tertutup	Kasus	Tabel	Bulanan
D.E.45.003	Data penderita penyakit Hepatitis dan Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan	Merupakan data yang berisi informasi penderita hepatitis	Bertujuan untuk mengetahui informasi penderita hepatitis	Internal OPD	Puskesmas Kayamanya	Data Kesehatan	Tertutup	Kasus	Tabel	Bulanan

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Cara Memperoleh Data	Produsen Data	Jenis Data	Klasifikasi Data	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Jadwal Pemutakhiran
D.E.45.004	Data Malaria	Merupakan data yang berisi informasi penderita malaria	Bertujuan untuk mengetahui informasi penderita malaria	Internal OPD	Puskesmas Kayamanya	Data Kesehatan	Tertutup	Kasus	Tabel	Bulanan

Lampiran 4. Data Statistik Sektoral

L4-1. Sektor Pemerintahan

Daftar Data Statistik Sektoral yang Dihasilkan oleh Produsen Data

L4-1.1. Sekretariat Dewan

No	Elemen Data
1	Nama Ketua DPRD Kabupaten Poso
2	Nama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Poso
3	Nama Anggota DPRD Kabupaten Poso Menurut Susunan Fraksi
4	Nama Anggota DPRD Kabupaten Poso Menurut Susunan Komisi
5	Jumlah Produk Hukum DPRD Kabupaten Poso
6	Jumlah Produk Hukum Daerah

L4-1.2. Sekretariat Daerah

No	Elemen Data
1	Daftar Kepala Daerah/Pemerintah Kabupaten Poso
2	Daftar Nama Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Poso
3	Kecamatan dan Kelurahan Yang Sudah/Belum Memiliki Batas Wilayah
4	Jumlah Peraturan Daerah Kabupaten Poso
5	Jumlah Peraturan Bupati Kabupaten Poso
6	Jumlah Rumah Ibadah di Kabupaten Poso Berdasarkan Kecamatan

L4-1.3. Inspektorat

No	Elemen Data
1	Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah
2	Hasil Penilaian Lembar Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi (LKE RB)
3	Gelar Pengawasan Bagi Perangkat Daerah Tercepat dalam Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
4	Capaian MCP Kabupaten Poso

L4-1.4. Badan Keuangan dan Aset Daerah

No	Elemen Data
1	Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Poso
2	Realisasi Pengeluaran Belanja Pemerintah Kabupaten Poso
3	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Poso
4	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan
5	Persentase SILPA terhadap APBD
6	Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Dilaksanakan
7	Belanja Pendidikan
8	Belanja Kesehatan

L4-1.5. Badan Pendapatan Daerah

No	Elemen Data
1	Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Poso
2	Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Poso
3	Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Kecamatan di Kabupaten Poso
4	PAD Sektor Pariwisata di Kabupaten Poso

L4-1.6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Elemen Data
1	Jumlah Pegawai Tetap
2	Jumlah Pegawai Tetap Berdasarkan Pendidikan
3	Jumlah Pegawai Tetap Berdasarkan Golongan
4	Jumlah Pegawai Honor

L4-1.7. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Elemen Data
1	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RERDA
2	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan
3	Jumlah Dokumen Perencanaan, Data Pembangunan, Data Pengendalian di Kabupaten Poso

L4-1.8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Elemen Data
1	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Kabupaten Poso
2	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Menurut Partai Politik Daerah Kabupaten Poso
3	Jumlah Bantuan Keuangan Pada Politik Daerah di Kabupaten Poso
4	Nama- Nama LSM dan Ormas Terdaftar di Kabupaten Poso
5	Pembinaan LSM dan Ormas di Kabupaten Poso

L4-1.9. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No	Elemen Data
1	Jumlah Aparat Keamanan dan Ketertiban Umum
2	Jumlah Sarana Keamanan dsan Ketertiban Umum
3	Jumlah Kendaraan Operasional SATPOL PP
4	Jumlah Kendaraan Operasional DAMKAR

L4-1.10. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

No	Elemen Data
1	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Yang Aktif Menurut Kecamatan
2	Nama Media Yang Aktif Menurut Jenis Media di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso
3	Jumlah Laporan Status SP4N-Lapor Menurut Perangkat Daerah
4	Jumlah Laporan PPID Menurut Perangkat Daerah.
5	Nama Domain dan Sub Domain Website Resmi Pemerintah Pada Perangkat Daerah Kabupaten Poso
6	Jumlah Desa Terlayani dan Belum Terlayani Jaringan Telekomunikasi di Kabupaten Poso
7	Data Titik Lokasi Wifi di OPD Kabupaten Poso

No	Elemen Data
8	Data Titik Lokasi Wifi Menurut Kecamatan/Desa Kabupaten Poso
9	Jumlah Menara BTS Menurut Kecamatan di Kabupaten Poso

L4-2. Sektor Sosial Budaya

Daftar Data Statistik Sektor yang Dihasilkan oleh Produsen Data

L4-2.1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Elemen
1	Jumlah Peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Menurut Kecamatan
2	Jumlah Bangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Menurut Kecamatan
3	Jumlah Tenaga Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Menurut Kecamatan
4	Jumlah Siswa Taman Kanak-Kanak Menurut Kecamatan
5	Jumlah Bangunan Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Bangunan Baik Menurut Kecamatan
6	Jumlah Bangunan Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Bangunan Tidak Baik Menurut Kecamatan
7	Jumlah Pengelola Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK)
8	Jumlah Ruang Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK)
9	Jumlah Tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak (TK)
10	Jumlah Rasio Siswa Dengan Tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak (TK)
11	Jumlah Siswa SD/MI/Sederajat Menurut Kecamatan
12	Jumlah Bangunan Baik SD/MI/Sederajat Menurut Kecamatan
13	Jumlah Bangunan Tidak Baik SD/MI/Sederajat Menurut Kecamatan Pada Tahun 2023
14	Jumlah Pengelola Sekolah SD/MI/Sederajat
15	Jumlah Ruang Sekolah SD/MI/Sederajat Menurut Kecamatan
16	Jumlah Tenaga Pendidik Sekolah SD/MI/Sederajat
17	Jumlah Rasio Siswa Dengan Tenaga Pendidik SD/MI/Sederajat
18	Jumlah Angka Partisipasi Kasar Sekolah SD/MI/Sederajat
19	Jumlah Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Sederajat
20	Jumlah Angka Partisipasi Murni Sekolah SD/MI/Sederajat
21	Jumlah Siswa SMP/MTS/Sederajat Menurut Kecamatan
22	Jumlah Bangunan Baik SMP/MTS/Sederajat Menurut Kecamatan
23	Jumlah Bangunan Tidak Baik SMP/MTS/Sederajat Menurut Kecamatan

No	Elemen
24	Jumlah Pengelola SMP/MTS/Sederajat
25	Jumlah Ruang SMP/MTS/Sederajat
26	Jumlah Tenaga Pendidik Sekolah SMP/MTS/Sederajat
27	Jumlah Rasio Siswa Dengan Tenaga Pendidik SD/MI/Sederajat
28	Jumlah Sekolah SMP/MTS/Sederajat Memiliki Fasilitas Laboratorium
29	Jumlah Sekolah SMP/MTS/Sederajat Memiliki Fasilitas Komputer
30	Jumlah Sekolah SMP/MTS/Sederajat Memiliki Fasilitas Internet
31	Angka Partisipasi Murni Sekolah SMP/MTS/Sederajat
32	Jumlah Angka Partisipasi Kasar Sekolah SMP/MTS/Sederajat
33	Jumlah Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTS/Sederajat
34	Jumlah Pegiat Seni dan Budaya
35	Jumlah Cagar Budaya Yang Ada di Kabupaten Poso

L4-2.2. Dinas Kesehatan

No	Elemen Data
1	Jumlah Penderita Penyakit Menular Menurut Kecamatan
2	Jumlah Penderita Gizi Buruk Menurut Kecamatan
3	Jumlah Penderita Sakit Jiwa Menurut Kecamatan
4	Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Neonatal Menurut Kecamatan K1
5	Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Neonatal Menurut Kecamatan K4
6	Jumlah Ibu Yang Bersalin di Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan K4
7	Jumlah Ibu Yang Mendapat Pelayanan Nifas Menurut Kecamatan K4
8	Jumlah Ibu Hamil Dengan Lila Menurut Kecamatan K4
9	Jumlah Ibu Hamil Penderita (KEK) Menurut Kecamatan K4
10	Jumlah Ibu Hamil Penderita Kurang Darah HB 8-11 mg/dl Menurut Kecamatan
11	Jumlah Bayi Menurut Kecamatan
12	Jumlah Pemberian Pelayanan Pada Bayi Menurut Kecamatan
13	Jumlah Neonatus Dengan Komplikasi Yang Di Tangani Menurut Kecamatan
14	Jumlah Balita Kurus Yang Mendapat Makanan Tambahan Menurut Kecamatan
15	Jumlah Bayi Yang Mendapat Imunisasi Menurut Kecamatan
16	Jumlah Bayi Berat Badan Lahir Rendah Menurut Kecamatan

No	Elemen Data
17	Jumlah Bayi Bergizi Buruk Menurut Kecamatan
18	Angka Kematian Ibu dan Anak
19	Jumlah Rumah Sakit Yang Ada di Kabupaten Poso
20	Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap Menurut Kecamatan
21	Jumlah Puskesmas Rawat Inap Menurut Kecamatan
22	Jumlah Puskesmas Pembantu Menurut Kecamatan
23	Jumlah Poliklinik Menurut Kecamatan
24	Jumlah Posyandu Menurut Kecamatan
25	Jumlah Posyandu Pratama Menurut Kecamatan
26	Jumlah Posyandu Madya Menurut Kecamatan
27	Jumlah Posyandu Purnama Menurut Kecamatan
28	Jumlah Posyandu Mandiri Menurut Kecamatan
29	Jumlah Balai Kesehatan Masyarakat Menurut Kecamatan
30	Jumlah Pos Kesehatan Desa Menurut Kecamatan
31	Jumlah Dokter Umum Menurut Kecamatan
32	Jumlah Dokter Spesialis Menurut Kecamatan
33	Jumlah Dokter Gigi Menurut Kecamatan
34	Jumlah Bidan Menurut Kecamatan
35	Jumlah Perawat Menurut Kecamatan
36	Jumlah Apoteker Menurut Kecamatan
37	Jumlah Sarjana Teknis Kefarmasian Menurut Kecamatan
38	Jumlah Tenaga Psikologi Klinis Menurut Kecamatan
39	Jumlah Epidemiolog Kesehatan Menurut Kecamatan
40	Jumlah Tenaga Promosi dan Ilmu Perilaku Menurut Kecamatan
41	Jumlah Pembimbing Kesehatan Kerja Menurut Kecamatan
42	Jumlah Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Menurut Kecamatan
43	Jumlah Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Menurut Kecamatan
44	Jumlah Tenaga Sanitasi Lingkungan Menurut Kecamatan
45	Jumlah Tenaga Nutrisionis Menurut Kecamatan

L4-2.3. Dinas Sosial

No	Elemen Data
1	Jumlah Keluarga Miskin Menurut Tingkat Kesejahteraan 3 Plus Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Pada Kecamatan
2	Jumlah Keluarga Sejahtera Tahap 1 Menurut Kecamatan
3	Jumlah Keluarga Sejahtera Tahap 2 Menurut Kecamatan
4	Jumlah Keluarga Sejahtera Tahap 3 Menurut Kecamatan

L4-2.4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Elemen Data
1	Jumlah Sistem Peringatan Dini
2	Jumlah Kawasan Rawan Bencana Banjir Menurut Kecamatan
3	Jumlah Kawasan Rawan Bencana Gunung Meletus Menurut Kecamatan
4	Jumlah Kawasan Rawan Bencana Longsor Menurut Kecamatan
5	Jumlah Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Menurut Kecamatan
6	Jumlah Kawasan Rawan Bencana Tsunami Menurut Kecamatan
7	Jumlah Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Menurut Kecamatan
8	Jumlah Korban Bencana
9	Jumlah Pengungsi Akibat Bencana
10	Jumlah Kerugian Akibat Bencana
11	Jumlah Sarana Dan Prasarana Tanggap Bencana

L4-2.5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Elemen Data
1	Jumlah Pelatihan Kerja Kabupaten Poso
2	Jumlah TKI Diluar Negeri Kabupaten Poso
3	Jumlah Tenaga Kerja Warga Negara Asing Kabupaten Poso
4	Jumlah Kegiatan Bidang Pembinaan Transmigrasi dan Pengembangan Kawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Poso

L4-2.6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Elemen Data
1	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Laki-Laki Menurut Kecamatan

No	Elemen Data
2	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Perempuan Menurut Kecamatan
3	Jumlah Agregat Penduduk Menurut Kecamatan
4	Jumlah Penduduk Laki-Laki Belum Tamat SD/ Sederajat Menurut Kecamatan
5	Jumlah Penduduk Perempuan Belum Tamat SD/ Sederajat Menurut Kecamatan
6	Jumlah Penduduk Laki-Laki Tamat SD/ Sederajat Menurut Kecamatan
7	Jumlah Penduduk Perempuan Tamat SD/ Sederajat Menurut Kecamatan
8	Jumlah Penduduk Laki-Laki Tidak/ Belum Sekolah Menurut Kecamatan
9	Jumlah Penduduk Perempuan Tidak/ Belum Sekolah Menurut Kecamatan
10	Jumlah Penduduk Laki-Laki Yang Ditamatkan SLTP Sederajat Menurut Kecamatan
11	Jumlah Penduduk Perempuan Yang Ditamatkan SLTP Sederajat Menurut Kecamatan
12	Jumlah Penduduk Laki-Laki Yang Ditamatkan SLTA Sederajat Menurut Kecamatan
13	Jumlah Penduduk Perempuan Yang Ditamatkan SLTA Sederajat Menurut Kecamatan
14	Jumlah Penduduk Laki-Laki Diploma I,II dan III Menurut Kecamatan
15	Jumlah Penduduk Perempuan Diploma I,II dan III Menurut Kecamatan
16	Jumlah Penduduk Laki-Laki Sarjana S1 Menurut Kecamatan
17	Jumlah Penduduk Perempuan Sarjana S1 Menurut Kecamatan
18	Jumlah Penduduk Laki-Laki Sarjana S2 Menurut Kecamatan
19	Jumlah Penduduk Perempuan Sarjana S2 Menurut Kecamatan
20	Jumlah Penduduk Laki-Laki Sarjana S3 Menurut Kecamatan
21	Jumlah Penduduk Perempuan Sarjana S3 Menurut Kecamatan
22	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Kecamatan
23	Jumlah Petani/Pekebun Menurut Kecamatan
24	Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Nelayan Menurut Kecamatan
25	Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Peternak Menurut Kecamatan
26	Jumlah Penduduk Belum Bekerja Menurut Kecamatan
27	Jumlah Tenaga Pendidik Guru Menurut Kecamatan
28	Jumlah Tenaga Pendidik Dosen Menurut Kecamatan
29	Jumlah Tenaga Pendidik Dokter Menurut Kecamatan
30	Jumlah Pedagang Menurut Kecamatan
31	Jumlah Karyawan Swasta Menurut Kecamatan
32	Jumlah Penduduk Beragama Islam Menurut Kecamatan

No	Elemen Data
33	Jumlah Penduduk Beragama Khatolik Menurut Kecamatan
34	Jumlah Penduduk Beragama Kristen Menurut Kecamatan
35	Jumlah Penduduk Beragama Budha Menurut Kecamatan
36	Jumlah Penduduk Beragama Hindu Menurut Kecamatan
37	Jumlah Penduduk Sudah Memiliki E-KTP Menurut Kecamatan
38	Jumlah Penduduk Belum Memiliki E-KTP Menurut Kecamatan
39	Jumlah Penduduk Sudah Memiliki Akta Kelahiran Menurut Kecamatan
40	Jumlah Penduduk Belum Memiliki Akta Kelahiran Menurut Kecamatan

L4-2.7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Elemen Data
1	Jumlah Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Menurut Kecamatan
2	Jumlah Pemberdayaan Perempuan Bidang Hukum Menurut Kecamatan
3	Jumlah Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Menurut Kecamatan
4	Jumlah Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi Menurut Kecamatan
5	Jumlah Perangkat Daerah Sudah Menerapkan Pengarusutamaan Gender (PUG)
6	Jumlah Pekerja Perempuan Pada Lembaga Pemerintah
7	Jumlah Pekerja Perempuan Pada Lembaga Non Pemerintah Menurut Kecamatan
8	Jumlah Pekerja Perempuan Sebagai Kepala Keluarga Menurut Kecamatan
9	Jumlah Pekerja Anak Menurut Kecamatan
10	Jumlah Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Pelaku Menurut Kecamatan
11	Jumlah Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Korban Menurut Kecamatan
12	Jumlah Anak Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Pelaku Menurut Kecamatan
13	Jumlah Anak Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Korban Menurut Kecamatan
14	Jumlah Laporan Pengaduan Perempuan Korban Kekerasan Ditindak Lanjuti Menurut Kecamatan
15	Jumlah Laporan Pengaduan Anak Korban Kekerasan Ditindak Lanjuti Menurut Kecamatan
16	Jumlah Perempuan Tamatan SD/Sederajat Menurut Kecamatan
17	Jumlah Perempuan Tamatan SMP/Sederajat Menurut Kecamatan
18	Jumlah Anak Laki-Laki Tamatan SD/Sederajat Menurut Kecamatan

No	Elemen Data
19	Jumlah Anak Perempuan Tamatan SD/Sederajat Menurut Kecamatan
20	Jumlah Anak Laki-Laki Tamatan SMP/Sederajat Menurut Kecamatan
21	Jumlah Anak Perempuan Tamatan SMP/Sederajat Menurut Kecamatan

L4-2.8. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Elemen Data
1	Rata - rata Jumlah Anak Per Keluarga Menurut Kecamatan
2	Jumlah Kelahiran Menurut Kecamatan
3	Jumlah Kematian Menurut Kecamatan
4	Jumlah Remaja Wanita Usia 15-19 Tahun Yang Melahirkan Menurut Kecamatan
5	Jumlah Kehamilan Yg Tidak Diinginkan Dari Wanita Usia Subur 15-19 Tahun Menurut Kecamatan
6	Jumlah Pasangan Usia Subur Peserta KB Menurut Kecamatan
7	Jumlah Pasangan Usia Subur Belum mengikuti KB Menurut Kecamatan
8	Jumlah Peserta Suntik KB/Implan Menurut Kecamatan
9	Jumlah Peserta Obat / Pil KB Menurut Kecamatan
10	Jumlah Peserta IUD/Spiral Menurut Kecamatan
11	Jumlah Peserta Susuk KB Menurut Kecamatan
12	Jumlah Peserta Kondom Menurut Kecamatan
13	Jumlah Peserta Vagina Diafragma Menurut Kecamatan
14	Jumlah Peserta Spermatisida Menurut Kecamatan
15	Jumlah Peserta Vasektomi Menurut Kecamatan
16	Jumlah Peserta Tubektomi Menurut Kecamatan
17	Jumlah Alat Peraga KB Menurut Kecamatan
18	Jumlah Balai KB Menurut Kecamatan
19	Jumlah Puskesmas Pelayanan KB Menurut Kecamatan
20	Jumlah Puskesmas Pembantu Pelayanan KB Menurut Kecamatan
21	Jumlah Klinik KB Menurut Kecamatan
22	Jumlah Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa Menurut Kecamatan
23	Jumlah Tenaga Dokter Klinik KB Menurut Kecamatan
24	Jumlah Tenaga Bidan Klinik KB Menurut Kecamatan
25	Jumlah Petugas KB Yang Ada di Kabupaten Poso
26	Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita Menurut Kecamatan
27	Jumlah Kelompok Bina Keluarga Remaja Menurut Kecamatan
28	Jumlah Kelompok Bina Keluarga Lansia Menurut Kecamatan
29	Jumlah Pembantu Pembina KB Desa Menurut Kecamatan
30	Jumlah Sub Pembantu Pembina KB Desa Menurut Kecamatan

L4-2.9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Elemen Data
1	Jumlah Desa Yang Ada di Kabupaten Poso Menurut Kecamatan
2	Jumlah Rukun Warga (RW) Pada Pemerintahan Desa Menurut Kecamatan
3	Jumlah Rukun Tetangga (RT) Pada Pemerintahan Desa Menurut Kecamatan Yang Ada di Kabupaten Poso
4	Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan Yang Ada di Kabupaten Poso
5	Jumlah Rukun Warga (RW) Pada Kelurahan Menurut Kecamatan Yang Ada di Kabupaten Poso
6	Jumlah Rukun Tetangga (RT) Pada Kelurahan Menurut Kecamatan Yang Ada di Kabupaten Poso
7	Jumlah Desa Tertinggal Berdasarkan Indeks Pembangunan Daerah Menurut Kecamatan Yang Ada di Kabupaten Poso
8	Jumlah Desa Berkembang Berdasarkan Indeks Pembangunan Daerah Menurut Kecamatan Yang Ada di Kabupaten Poso
9	Jumlah Desa Mandiri Berdasarkan Indeks Pembangunan Daerah Menurut Kecamatan

L4-2.10. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Elemen Data
1	Data Jenis Perpustakaan
2	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengelola Kearsipan
3	Jumlah Bimbingan Teknis Kepada Pengelola Arsip Dinamis
4	Jumlah Supervisi Kepada Pengelola Arsip Dinamis
5	Jumlah Lembaga Kearsipan Terakreditasi
6	Jumlah Supervisi Pengelola Arsip Statis
7	Jumlah Arsip Vital dan Arsip Statis
8	Jumlah Pemanfaat Arsip
9	Jumlah Simpul Jaringan Kearsipan
10	Jumlah Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana

L4-3. Ekonomi

Daftar Data Statistik Sektor yang Dihasilkan oleh Produsen Data

L4-3.1. Dinas Perikanan dan Kelautan

No	Elemen Data
1	Data Perikanan Tangkap Laut
2	Data Perikanan Budidaya
3	Data Benih, Industri dan Nilai Perikanan
4	Jumlah Pembudidaya Air Laut Menurut Kecamatan
5	Jumlah Penerimaan Pembudidaya Air Laut Menurut Kecamatan
6	Jumlah Pengeluaran Biaya Konsumsi Pembudidaya Air Laut Menurut Kecamatan
7	Jumlah Pengeluaran Biaya Produksi Pembudidaya Air Laut Menurut Kecamatan
8	Jumlah Pembudidaya Air Tawar Menurut Kecamatan
9	Jumlah Penerimaan Pembudidaya Air Tawar Menurut Kecamatan
10	Jumlah Pengeluaran Biaya Konsumsi Pembudidaya Air Tawar Menurut Kecamatan
11	Jumlah Pengeluaran Biaya Produksi Pembudidaya Air Tawar Menurut Kecamatan
12	Jumlah Pembudidaya Air Payau Menurut Kecamatan
13	Jumlah Penerimaan Pembudidaya Air Payau Menurut Kecamatan
14	Jumlah Pengeluaran Biaya Konsumsi Pembudidaya Air Payau Menurut Kecamatan
15	Jumlah Pengeluaran Biaya Produksi Pembudidaya Air Payau Menurut Kecamatan

L4-3.2. Dinas Pertanian

No	Elemen Data
1	Jumlah Luas Lahan Pertanian Sawah Beririgasi Menurut Kecamatan
2	Jumlah Luas Lahan Pertanian Tadah Sawah Menurut Kecamatan
3	Jumlah Luas Lahan Pertanian Lahan Kering Tegal / Kebun Menurut Kecamatan
4	Jumlah Luas Lahan Pertanian Lahan Kering Ladang / Huma Menurut Kecamatan
5	Jumlah Produksi Tanaman Padi Menurut Kecamatan
6	Jumlah Produksi Tanaman Jagung Menurut Kecamatan
7	Jumlah Produksi Tanaman Kedelai Menurut Kecamatan
8	Jumlah Produksi Tanaman Ubi Menurut Kecamatan
9	Jumlah Produksi Tanaman Pangan Lainnya Menurut Kecamatan
10	Jumlah Luas Areal Holtikultura Buah-Buahan Menurut Kecamatan
11	Jumlah Luas Areal Holtikultura Sayuran Menurut Kecamatan
12	Jumlah Luas Areal Holtikultura Bahan Obat-Obat Nabati Menurut Kecamatan
13	Jumlah Luas Areal Florikultura Menurut Kecamatan
14	Jumlah Produksi Holtikultura Buah-Buahan Menurut Kecamatan
15	Jumlah Produksi Holtikultura Sayuran Menurut Kecamatan
16	Jumlah Produksi Holtikultura Bahan Obat Obat Nabati Menurut Kecamatan
17	Jumlah Produksi Florikultura Menurut Kecamatan
18	Jumlah Luas Areal Perkebunan
19	Jumlah Produksi Perkebunan
20	Jumlah Usaha Peternakan Hewan Besar Menurut Kecamatan
21	Jumlah Usaha Peternakan Unggas Menurut Kecamatan
22	Jumlah Populasi Ternak Sapi Menurut Kecamatan
23	Jumlah Populasi Ternak Kerbau Menurut Kecamatan
24	Jumlah Populasi Ternak Kuda Menurut Kecamatan
25	Jumlah Populasi Ternak Kambing Menurut Kecamatan
26	Jumlah Populasi Ternak Domba Menurut Kecamatan
27	Jumlah Populasi Ternak Kecil Lainnya** (BABI) Menurut Kecamatan
28	Jumlah Populasi Ternak Ayam Potong Menurut Kecamatan
29	Jumlah Populasi Ternak Itik Menurut Kecamatan
30	Jumlah Produksi Daging Sapi Menurut Kecamatan
31	Jumlah Nilai Produksi Daging Sapi Menurut Kecamatan
32	Jumlah Produksi Daging Kambing Menurut Kecamatan
33	Jumlah Produksi Daging Ternak Kecil Lainnya** (BABI) Menurut Kecamatan
34	Jumlah Nilai Produksi Daging Ternak Kecil Lainnya**(BABI) Menurut Kecamatan
35	Jumlah Produksi Daging Ayam Menurut Kecamatan
36	Jumlah Nilai Produksi Daging Ayam Menurut Kecamatan
37	Jumlah Produksi Telur Ayam Menurut Kecamatan

No	Elemen Data
38	Jumlah Nilai Produksi Telur Ayam Menurut Kecamatan
39	Jumlah Nilai Produksi Telur Hewan Ternak Lainnya Menurut Kecamatan

L4-3.3. Dinas Ketahanan Pangan

No	Elemen Data
1	Jumlah Produksi Komoditas Pangan dan Ketersediaan Energi dan Protein
2	Jumlah Perkembangan Rata-rata Konsumsi Energi dan Protein
3	Jumlah Konsumsi Penduduk Terhadap Kelompok Bahan Pangan
4	Jumlah Pergudang

L4-3.4. Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan

No	Elemen Data
1	Jumlah UMKM Perbidang Usaha
2	Jumlah Pasar Tradisional Bangunan Permanen Yang Dikelola Pemerintah Menurut Kecamatan
3	Jumlah Pasar Modern Swayalayan/Supermarket/Toserba Menurut Kecamatan
4	Jumlah Pasar Modern Minimarket Menurut Kecamatan
5	Jumlah Pertokoan Menurut Kecamatan
6	Jumlah Jenis Industri Kecil
7	Jumlah Unit Industri Besar Pengolahan Pangan Yang Menerapkan K3 Menurut Kecamatan
8	Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar Pengolahan Pangan Yang Menerapkan K3 Menurut Kecamatan
9	Jumlah Nilai Produksi Industri Besar Pengolahan Pangan Yang Menerapkan K3 Menurut Kecamatan
10	Jumlah Unit Industri Besar Pengolahan Kayu Yang Menerapkan K3 Menurut Kecamatan
11	Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar Pengolahan Kayu Yang Menerapkan K3 Menurut Kecamatan
12	Jumlah Nilai Produksi Industri Besar Pengolahan Kayu Yang Menerapkan K3 Menurut Kecamatan
13	Jumlah Unit Industri Galian Bukan Logam Yang Menerapkan K3 Menurut Kecamatan
14	Jumlah Tenaga Kerja Industri Galian Bukan Logam Yang Menerapkan K3 Menurut Kecamatan
15	Jumlah Nilai Produksi Industri Galian Bukan Logam Yang Menerapkan K3 Menurut Kecamatan

L4-3.5. Dinas Pariwisata

No	Elemen Data
1	Jumlah Obyek Wisata
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan
3	Jumlah Kunjungan Wisatawan Per Objek Wisata
4	Jumlah Lama Kunjungan Wisatawan
5	Jumlah Jenis Penginapan
6	Jumlah Biro Wisatawan Biro dan Agen Perjalanan Wisata
7	Jumlah Pemandu Wisata
8	Jumlah Jenis Usaha Jasa Makanan / Minuman
9	Jumlah Kategori Restoran Berdasarkan Jenis Makanan Yang Disediakan
10	Jumlah Pusat Penjualan CendraMata

L4-3.6. Dinas Pemuda dan Olahraga

No	Elemen Data
1	Jumlah Pemuda Laki-Laki Usia 16-30 Tahun Menurut Kecamatan
2	Jumlah Pemuda Perempuan Usia 16-30 Tahun Menurut Kecamatan
3	Jumlah Organisasi Bidang Olahraga Menurut Kecamatan
4	Jumlah Lapangan Bola Voli Menurut Kecamatan
5	Jumlah Lapangan Bola Basket Menurut Kecamatan
6	Jumlah Lapangan Tenis Menurut Kecamatan
7	Jumlah Lapangan Futsal Menurut Kecamatan
8	Jumlah Stadion Sepak Bola
9	Jumlah Stadion Atletik
10	Jumlah Lapangan Bulu Tangkis
11	Jumlah Gedung Olahraga
12	Jumlah Kolam Renang
13	Jumlah Sasana Tinju/Beladiri
14	Jumlah Velodrome
15	Jumlah Arena Bowling
16	Jumlah Rumah Billiard Menurut Kecamatan
17	Jumlah Lapangan Olah Raga Terbuka Menurut Kecamatan
18	Kondisi Prasarana Olah Raga

No	Elemen Data
19	Jumlah Klub Olah Raga

L4-3.7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Elemen Data
1	Jumlah Nilai Investasi Sektor Primer
2	Jumlah Nilai Investasi Sektor Sekunder
3	Jumlah Nilai Investasi Sektor Tersier
4	Jumlah Unit Usaha Sektor Primer
5	Jumlah Unit Usaha Sektor Sekunder
6	Jumlah Unit Usaha Sektor Tersier

L4-4. Fisik/Infrastruktur

Daftar Data Statistik Sektor yang Dihasilkan oleh Produsen Data

L4-4.1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Elemen Data
1	Data Jalan dan Jembatan
2	Data Jaringan Irigasi/Pengairan
3	Data Ketersediaan Air Baku
4	Jumlah Rumah Tangga Menggunakan Sumur Terlindung Menurut Kecamatan
5	Jumlah Rumah Tangga Menggunakan Sumur Tidak Terlindung Menurut Kecamatan
6	Jumlah Desa/kelurahan Rawan Kering Sumber Air Menurut Kecamatan
7	Jumlah Desa/Kelurahan Yang Tidak Memiliki Sumber Air Menurut Kecamatan
8	Jumlah Rumah Tangga Memiliki MCK Menurut Kecamatan
9	Jumlah Rumah Tangga tidak Memiliki MCK Menurut Kecamatan
10	Data Pengelolaan Air Limbah
11	Jumlah Pengolahan Air Limbah Individual Menurut Kecamatan
12	Jumlah Pengolahan Air Limbah Komunal Menurut Kecamatan
13	Jumlah Rumah Tangga Yang Memanfaatkan Air Bawah Tanah Menurut Kecamatan
14	Data Jaringan Irigasi Pengairan
15	Jumlah Bangunan Memiliki IMB Menurut Kecamatan
16	Jumlah Bangunan Tidak Memiliki IMB Menurut Kecamatan
17	Jumlah Bangunan Gedung Yang Memiliki Sertifikat Laik Fungsi Menurut Kecamatan
18	Jumlah Bangunan Gedung Yang Tidak Memiliki Sertifikat Laik Fungsi Menurut Kecamatan
19	Data Sempadan Sumber Air

L4-4.2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Elemen Data
1	Jumlah Rumah Layak Huni Menurut Kecamatan
2	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Menurut Kecamatan
3	Jumlah Kawasan Pemukiman Kumuh Menurut Kecamatan

L4-4.3. Dinas Lingkungan Hidup

No	Elemen Data
1	Jumlah Lokasi Pencemaran Air Menurut Kecamatan
2	Jumlah Volume Sampah Rumah Tangga
3	Jumlah Volume Sampah Rumah Tangga Yang Terolah
4	Jumlah Volume Sampah Yang Mengandung Limbah Bahan Berbahaya
5	Jumlah Alat Angkut Sampah
6	Jumlah Tempat Pengolahan Sampah

L4-4.4. Dinas Perhubungan

No	Elemen Data
1	Jumlah Transportasi Darat
2	Jumlah Transportasi Laut
3	Jumlah Transportasi Udara

Lampiran 5. Data Prioritas

L5-1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Kabupaten Poso

No	Indikator	Satuan
1	Indeks Desa Membangun	Indeks
2	Desa Maju	Persen
3	Desa Berkembang	Persen
4	Indeks Pembangunan Manusia	Poin
5	Usia Harapan Hidup	Tahun
6	Prevalensi Angka Stunting	Persen
7	Indeks Pendidikan	Indeks
8	Harapan Lama Sekolah	Tahun
9	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun
10	Indeks Pembangunan Gender	Persen
11	Indeks pemberdayaan Ekonomi Inklusif	Persen
12	Pertumbuhan Ekonomi	Persen
13	Indeks Gini Rasio	Indeks
14	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks
15	Pendapatan perkapita	Juta Rp
16	Persentase Penduduk Miskin	Persen
17	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen
18	Nilai Tukar petani	Persen
19	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks
20	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	Indeks
21	Nilai SAKIP	Nilai
22	Opini BPK	Indeks
23	Indeks Demokrasi	Kategori
24	Angka Kriminalitas	Persen
25	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks
26	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks
27	Daerah Persentase Desa Tangguh Bencana	Persen
28	Indeks Resiko Bencana Daerah	Indeks
29	Indeks Kualitas Infrastruktur Wilayah	Indeks
30	Cakupan Layanan Kebakaran skala Kabupaten	Persen
31	Presentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik	Persen

No	Indikator	Satuan
32	Internet Desa	Persen
33	Cakupan Pelayanan Persampahan	Persen

L5-2. Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Poso

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan
1.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	
1.1.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	
1.1.1	Pertumbuhan PDRB-ADH Berlaku dengan Migas (%)	Persen (%)
1.1.2	Pertumbuhan PDRB-ADH Konstan dengan Migas (%)	Persen (%)
1.1.3	PDRB-ADH Berlaku dengan Migas (Juta Rp)	Juta Rp
1.1.4	PDRB-ADH Berlaku tanpa Migas (Juta Rp)	Juta Rp
1.1.5	PDRB-ADH Konstan dengan Migas (Juta Rp)	Juta Rp
1.1.6	PDRB-ADH Konstan tanpa Migas (Juta Rp)	Juta Rp
1.1.7	Laju inflasi	Persen (%)
1.1.8	Perkembangan PDRB Perkapita (%)	Persen (%)
	- PDRB Perkapita ADH Berlaku (Rp)	Rupiah
	- Perkembangan PDRB Perkapita (%)	Persen (%)
	- PDRB Perkapita ADH Konstan 2010 (Rp)	Rupiah
	- Perkembangan PDRB Konstan 2010 Perkapita (%)	Persen (%)
1.1.9	Indeks Gini	Indeks (0-1)
1.1.10	Persentase Penduduk Miskin	
	- Garis Kemiskinan (000)	Ribu orang
	- Jumlah Masyarakat Miskin (000)	Ribu orang
	- Persentase Kemiskinan (%)	Persen (%)
	- Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks
	- Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Indeks
1.1.10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks
1.1.11	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	Persen (%)

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan
1.2.	Kesejahteraan Sosial	
1.2.1	Angka Melek Huruf	Persen (%)
1.2.2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun
1.2.3	Angka Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun
1.2.4	Balita Gizi Buruk	Persen (%)
1.2.5	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	Persen (%)
1.2.6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen (%)
1.2.7	Tingkat pengangguran terbuka	Persen (%)
1.2.8	Rasio Penduduk yang Bekerja	Persen (%)
1.2.9	PDRB per tenaga kerja Laju pertumbuhan	
	- PDRB ADHB	Persen (%)
	- PDRB ADHK	Persen (%)
1.2.10	Persentase PAD terhadap pendapatan	Persen (%)
1.2.11	Opini BPK	Kategori (WTP/WDP/dll)
1.2.12	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor (0-100)
1.2.13	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten	
	- PDRB ADHB	Persen (%)
	- PDRB ADHK	Persen (%)
1.2.14	Kontribusi sektor Pertanian (Holtikultura) terhadap PDRB Kabupaten	
	- PDRB ADHB	Persen (%)
	- PDRB ADHK	Persen (%)
1.2.15	Produksi Tanaman Pertanian	
	Padi	Ton
	Jagung	Ton
	Kacang Kedelai	Ton
	Kacang Tanah	Ton
	Kacang Hijau	Ton
	Ketela Pohon	Ton

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan
	Ketela Rambat	Ton
1.2.16	Kontribusi Sub-Sektor Perkebunan terhadap PDRB	
	- PDRB ADHB	Persen (%)
	- PDRB ADHK	Persen (%)
1.2.17	Produksi Tanaman Perkebunan	
	Cengkeh	Ton
	Kelapa Dalam	Ton
	Kelapa Sawit	Ton
	Kopi	Ton
	Karet	Ton
	Kakao	Ton
	Pala	Ton
	Kemiri	Ton
1.2.18	Kontribusi Sub Sektor Kehutanan Terhadap PDRB	
	- PDRB ADHB	Persen (%)
	- PDRB ADHK	Persen (%)
1.2.19	Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB	
	- PDRB ADHB	Persen (%)
	- PDRB ADHK	Persen (%)
1.2.20	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	
	- PDRB ADHB	Persen (%)
	- PDRB ADHK	Persen (%)
1.2.21	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	
	- PDRB ADHB	Persen (%)
	- PDRB ADHK	Persen (%)
1.2.22	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	
	- PDRB ADHB	Persen (%)
	- PDRB ADHK	Persen (%)
1.2.23	Kontribusi Sektor Industri Terhadap	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan
	PDRB	
	- PDRB ADHB	Persen (%)
	- PDRB ADHK	Persen (%)
1.2.24	Pertumbuhan Industri	Persen (%)
1.3.	Fokus Seni Budaya dan Olahraga	
1.3.1	Seni Budaya	
	- Jumlah Grup Kesenian per 10.000 penduduk	Unit
	- Jumlah Gedung Kesenian Per 10.000 Penduduk	Unit
1.3.2	Olahraga	
	Jumlah Klub Olah Raga Per 10.000 Penduduk	Unit
	Jumlah Gedung Olahraga Per 10.000 Penduduk	Unit
2.	ASPEK PELAYANAN UMUM	
2.1.	Urusan pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar	
2.1.1	Pendidikan	
2.1.1.1	Pendidikan Anak Usia Dini	
	Rasio Ketersediaan Guru Per Murid TK	Rasio (Guru:Murid)
2.1.1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK)	
	- Angka Partisipasi Kasar SD/MI	Persen (%)
	- Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	Persen (%)
	- Angka Partisipasi Kasar SMU/MA/SMK	Persen (%)
2.1.1.3	Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT)	
	- Angka Pendidikan yang ditamatkan SD/MI	Persen (%)
	- Angka Pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs	Persen (%)
	- Angka Pendidikan yang ditamatkan SMU/MA/SMK	Persen (%)
2.1.1.4	Angka Partisipasi Murni (APM)	
	- Angka Partisipasi Murni SD/MI	Persen (%)
	- Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	Persen (%)

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan
	- Angka Partisipasi Murni SMU/MA/SMK	Persen (%)
2.1.1.5	Angka Partisipasi Sekolah	
	- Tingkat SD/MI	Persen (%)
	- Tingkat SMP/MTs	Persen (%)
	- Tingkat SMA/SMK/MA	Persen (%)
2.1.1.6	Angka Putus Sekolah	
	- Tingkat SD/MI	Persen (%)
	- Tingkat SMP/MTs	Persen (%)
	- Tingkat SMA/SMK/MA	Persen (%)
2.1.1.7	Angka Kelulusan	
	- Tingkat SD/MI	Persen (%)
	- Tingkat SMP/MTs	Persen (%)
	- Tingkat SMA/SMK/MA	Persen (%)
2.1.1.8	Fasilitas Pendidikan	
	- Tingkat SD/MI	Unit
	- Tingkat SMP/MTs	Unit
	- Tingkat SMA/SMK/MA	Unit
2.1.1.9	Rasio Guru/Murid jenjang Pendidikan Dasar	Rasio (Guru:Murid)
2.1.1.10	Rasio Guru/Murid Jenjang pendidikan Menengah	Rasio (Guru:Murid)
2.1.1.11	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun	Persen (%)
2.1.1.12	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen (%)
2.1.2.	Kesehatan	
2.1.2.1	Angka Kematian Bayi	
2.1.2.2	Rasio posyandu per satuan balita	Rasio (Posyandu:Balita)
2.1.2.3	Rasio puskesmas, poliklinik, Poskesdes dan pustu per satuan penduduk	Unit Per 1.000 Penduduk
	Rasio Puskesmas	Unit Per 1.000 Penduduk
	Rasio Posyandu	Unit Per 1.000 Penduduk
	Rasio Polindes	Unit Per 1.000 Penduduk

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan
	Rasio Sarana Kesehatan	Unit Per 1.000 Penduduk
2.1.2.4	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (Per 1.000)	Unit Per 1.000 Penduduk
2.1.2.5	Rasio Dokter per satuan penduduk (Per 1.000)	Dokter Per 1.000 Penduduk
2.1.2.6	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (Per 1.000)	Tenaga Medis Per 1.000 Penduduk
2.1.2.7	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen (%)
2.1.2.8	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen (%)
2.1.2.9	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Persen (%)
2.1.2.11	Angka Kejadian Malaria	Kasus per 1.000 Penduduk
2.1.2.12	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	Persen (%)
2.1.2.13	Cakupan puskesmas (Persen)	Persen (%)
2.1.2.14	Cakupan Polindes (Persen)	Persen (%)
2.1.2.15	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	Persen (%)
2.1.2.16	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Persen (%)
2.1.2.17	Angka Stunting	Persen (%)
2.1.4.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2.1.4.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen (%)
2.1.4.2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Km per 1.000 Penduduk
2.1.4.3	Proporsi Jalan yang dapat dilalui Kendaraan Roda Empat	Persen (%)
	Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m)	Persen (%)
2.1.4.4	Rasio Jaringan Irigasi	Km per Ha Lahan
2.1.4.5	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk (1.000)	Unit per 1.000 Penduduk
2.1.4.6	Persentase Areal Kawasan Kumuh	Persen (%)
2.1.4.7	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Ha per Km ²

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan
2.1.4.8	Rasio Bangunan ber- IMB per Satuan Bangunan	Persen (%)
2.1.5.	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;	
2.1.5.1	Rumah tangga pengguna air bersih	Persen (%)
2.1.5.2	Rumah tangga pengguna listrik	Persen (%)
2.1.5.3	Rumah layak huni	Persen (%)
2.1.5.4	Rumah tangga ber-Sanitasi	Persen (%)
2.1.5.5	Rasio Permukiman Layak Huni	Persen (%)
2.1.5.6	Persentase Pemukiman yang Tertata	Persen (%)
2.1.6.	Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat;	
2.1.6.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Persen (%)
2.1.6.2	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persen (%)
2.1.6.3	Persentase Penegakan PERDA	Persen (%)
2.1.8.	Sosial	
2.1.8.1	Jumlah PMKS PMKS yang memperoleh bantuan Sosial	Orang
2.2.	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	
2.2.1.	Tenaga Kerja	
2.2.1.1	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun (Kasus)	Kasus
2.2.1.2	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan (Orang)	Orang
2.2.1.3	Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek (Orang)	Orang
2.2.1.4	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Orang)	Orang
2.2.1.5	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat (Orang)	Orang
2.2.1.6	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan	Orang

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan
	Kewirausahaan (Orang)	
2.2.1.7	Jumlah Lulusan S1/S2/S3 (orang)	Orang
2.2.2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.2.2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen (%)
2.2.2.2	Proporsi Kursi yang diduduki perempuan di DPRD	Persen (%)
2.2.2.3	Rasio KDRT	Kasus per 1.000 Penduduk
2.2.2.4	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	Persen (%)
2.2.3.	Ketahanan Pangan	
2.2.3.1	Ketersediaan Pangan Utama	Ton
2.2.3.2	Ketersediaan Energi dan Protein	
	Ketersediaan Energi	Kkal per Kapita
	Ketersediaan Protein	Gram per Kapita
2.2.3.3	Wilayah Rawan Pangan (Kecamatan)	
	Aman	Jumlah Kecamatan
	Waspada	Jumlah Kecamatan
	Rawan	Jumlah Kecamatan
2.2.4.	Pertanahan	
2.2.5.	Lingkungan Hidup	
2.2.5.1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten Poso	Dokumen (Ada/Tidak)
2.2.5.2	Terselenggaranya KLHS K/R/P	Dokumen (Ada/Tidak)
2.2.5.3	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	Indeks
2.2.5.4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	Indeks
2.2.5.5	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	Unit
2.2.5.6	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Jumlah Penghargaan
2.2.5.7	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen (%)

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan
2.2.6.	Kependudukan dan Catatan Sipil	
2.2.6.1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	Persen (%)
2.2.6.2	Rasio bayi berakte kelahiran	Persen (%)
2.2.6.3	Rasio pasangan berakte menikah	Persen (%)
2.2.6.4	Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten (ada/tidak)	Status (Ada/Tidak)
2.2.6.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK (sudah/belum)	Status (Sudah/Belum)
2.2.7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.2.7.1	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	Persen (%)
2.2.7.2	Jumlah Kelompok PKK	Unit
2.2.7.3	Persentase LPM Berprestasi	Persen (%)
2.2.7.4	Persentase PKK Aktif	Persen (%)
2.2.7.5	Posyandu aktif	Unit
2.2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.2.8.1	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen (%)
2.2.8.2	Total Fertility Rate (TFR)	Anak per Wanita
2.2.8.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Persen (%)
2.2.8.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persen (%)
2.2.8.6	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Anak
2.2.8.7	Cakupan peserta KB aktif	Persen (%)
2.2.8.8	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen (%)
2.2.8.9	Jumlah petugas Pembantu Pembina KB Desa	Orang
2.2.8.10	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tahun
2.2.8.11	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD	Persen (%)

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan
2.2.9.	Perhubungan	
2.2.9.1.	Jumlah Arus Penumpang (Orang)	
	- Jumlah Penumpang Angkutan Darat	Orang
	- Jumlah Penumpang Angkutan Laut	Orang
	- Jumlah Penumpang Angkutan Udara	Orang
2.2.9.2	Rasio ijin trayek	Persen (%)
2.2.9.3	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	Unit
2.2.9.4	Pemasangan Rambu-rambu	Unit
2.2.9.5	Jumlah Angkutan Barang	
	Jumlah orang (orang)	Orang
	Jumlah Barang (ton)	Ton
2.2.9.6	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	
	- Jumlah Pelabuhan Laut	Unit
	- Jumlah Bandar Udara	Unit
	- Jumlah Terminal Bis	Unit
2.2.10.	Komunikasi dan Informatika	
2.2.10.1	Persentase penduduk yang menggunakan HP	Persen (%)
2.2.10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	Persen (%)
2.2.10.3	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet	Persen (%)
2.2.11.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
2.2.11.1	Persentase koperasi aktif	Persen (%)
2.2.11.2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen (%)
2.2.11.3	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	Persen (%)
2.2.11.4	Persentase BPR/LKM aktif	Persen (%)
2.2.12.	Penanaman Modal	
2.2.12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Unit
2.2.12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	
	- Jumlah investasi PMDN (Milyar USS)	Milyar USS

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan
	- Jumlah investasi PMA (Milyar USS)	Milyar USS
2.2.12.4	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (%)	Persen (%)
2.2.13	Kepemudaan dan Olahraga	
2.2.13.1	Persentase jumlah organisasi pemuda yang dibina	Persen (%)
2.2.13.2	Jumlah Pemuda Non Organisasi yang dibina	Orang
2.2.13.3	Jumlah Organisasi Pemuda	Unit
2.2.13.4	Prestasi yang diraih Atlet Poso pada tingkat nasional	Jumlah Medali
2.2.13.5	Prestasi yang diraih Atlet Poso pada tingkat regional (asean)	Jumlah Medali
2.2.13.6	Prestasi yang diraih Atlet Poso pada tingkat internasional	Jumlah Medali
2.2.14.	Statistik	
2.2.14.1	Terintegrasinya Sistem Data statistik data terintegrasi	Status (Ada/Tidak)
2.2.14.2	Buku Kabupaten Dalam Angka	Dokumen (Ada/Tidak)
2.2.14.3	Buku PDRB	Dokumen (Ada/Tidak)
2.2.15.	Persandian	
2.2.15.1	Pengelolaan Persandian	Persentase (%)
2.2.16.	Kebudayaan	
2.2.16.1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Unit
2.2.17.	Perpustakaan	
2.2.17.1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Orang
2.2.17.2	Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk	Unit per 100.000 Penduduk
2.2.17.3	Rata-rata jumlah pengunjung perpustakaan/tahun	Orang per Tahun
2.2.17.4	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul
2.3.	Urusan Pemerintahan Pilihan yang Berkaitan Pelayanan Dasar	
2.3.1.	Pariwisata	
2.3.1.1	Jumlah Kunjungan Wisman	Orang
	Jumlah Kunjungan Wisnu	Orang
2.3.1.2	Jumlah Penyelenggaraan Event Seni dan budaya	Unit

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan
2.3.1.3	PAD sektor pariwisata	Juta Rupiah
2.3.2.	Pertanian	
2.3.2.1	Kontribusi Sektor Pertanian	
	- PDRB ADHB	Persen (%)
	- PDRB ADHK	Persen (%)
2.3.2.2	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	
	Padi	Ton per Ha
	Jagung	Ton per Ha
	Kacang Kedelai	Ton per Ha
	Kacang Tanah	Ton per Ha
	Kacang Hijau	Ton per Ha
	Ketela Pohon	Ton per Ha
	Ketela Rambat	Ton per Ha
2.3.2.3	Cakupan bina kelompok petani	Persen (%)
2.3.3.	Energi dan Sumberdaya Mineral	
2.3.3.1	Rumah tangga pengguna listrik	Persen (%)
2.3.4.	Perdagangan	
2.3.4.1	Ekspor Bersih Perdagangan	Juta Rupiah
2.3.5.	Perindustrian	
2.3.5.1	Pertumbuhan Industri	Persen (%)
2.3.5.2	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	
	- PDRB ADHB	Persen (%)
	- PDRB ADHK	Persen (%)
2.3.5.	Transmigrasi	
2.3.5.1	Jumlah UPT Pendukung Kota Terpadu Mandiri (Unit)	Unit
2.3.5.2	Jumlah warga transmigran yang dibina di kawasan transmigrasi (KK)	KK (Kepala Keluarga)
2.3.5.3	Jumlah keluarga miskin yang ikut transmigrasi lokal (KK)	KK (Kepala Keluarga)
2.4.	Fokus Layanan Urusan Penunjang	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan
2.4.1	Perencanaan Pembangunan	
2.4.1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen (Ada/Tidak)
2.4.1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Dokumen (Ada/Tidak)
2.4.1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Dokumen (Ada/Tidak)
2.4.1.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen (Ada/Tidak)
2.4.2	Keuangan	
2.4.2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Kategori (WTP/WDP/dll)
2.4.2.2	Persentase SILPA	Persen (%)
2.4.2.3	Persentase belanja pendidikan (20%)	Persen (%)
2.4.2.4	Persentase belanja kesehatan (10%)	Persen (%)
2.4.2.5	Persentase belanja langsung	Persen (%)
2.4.2.6	Persentase belanja belanja tidak langsung	Persen (%)
2.4.2.7	Penetapan APBD Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu.	Status (Tepat/Tidak)
2.4.3	Kepegawan serta Pendidikan dan Pelatihan	
2.4.3.1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Jam
2.4.3.2	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan forma	Orang
2.4.3.3	Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktura	Orang
2.4.3.4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Unit
2.4.3.5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Unit
2.4.4	Penelitian dan Pengembangan	
2.4.5	Pengawasan	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan
2.4.5.1	Persentase/Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	Persen (%)
2.4.5.2	Jumlah ASN yang dikenai sanksi	Orang
2.4.5.3	Jumlah temuan BPK	Unit
2.4.6	Sekretariat Dewan	
2.4.6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Poso	Dokumen (Ada/Tidak)
2.4.6.2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi pengawasan, Fungsi pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD).	Dokumen (Ada/Tidak)
2.4.6.3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD.	Dokumen (Ada/Tidak)
3	DAYA SAING DAERAH	
3.1.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	
3.1.1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	Rp
3.1.2	Nilai Tukar Petani	Indeks
3.1.3	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita	Persen (%)
3.1.4	Produktivitas Total Daerah	Rp per Tenaga Kerja
3.1.5	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	
	- PDRB ADHB	Persen (%)
	- PDRB ADHK	Persen (%)
3.2.	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	
3.2.1	Panjang Ruas Jalan Kabupaten	Km
3.2.2	Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum	Orang

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan
	Jumlah Arus Penumpang (Orang)	Orang
	Jumlah penumpang Bis	Orang
	Jumlah penumpang Kapal laut	Orang
	Jumlah penumpang Pesawat udara	Orang
	Jumlah Angkutan Barang	Orang
	Jumlah orang (orang)	Orang
	Jumlah Barang (ton)	Ton
3.2.5	Luas Wilayah Produktif	
	- Jumlah Luas Wilayah Produktif	Ha
	- Jumlah Luas Seluruh Wilayah Budidaya	Ha
	- Persentase Wilayah Produktif	Persen (%)
3.2.6	Luas Wilayah Kebanjiran (Ha)	Ha
3.2.7	Luas Wilayah Kekeringan (Ha)	Ha
3.2.9	Luas Wilayah Perkotaan	
	- Jumlah Luas Wilayah Perkotaan	Ha
	- Jumlah Luas Seluruh Wilayah Budidaya	Ha
	- Persentase Wilayah Perkotaan	Persen (%)
3.2.10	Jumlah Bank	
	- Konvensional	Unit
	- Syariah	Unit
3.2.11	Jumlah Restoran/Rumah Makan	Unit
71--80	Jumlah Penginapan/Hotel	Unit
3.3.	Fokus Iklim Berinvestasi	
3.3.1	Angka Kriminalitas	Kasus per 1.000 Penduduk
3.4.	Fokus Sumber Daya Manusia	
3.4.1	Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)	
	- Rasio Lulusan S1-S2-S3	Persen (%)
3.4.2	Tingkat Ketergantungan	
	- Rasio Ketergantungan	Persen (%)

L5-3. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Program Pemerintah Daerah Kabupaten Poso

Kode	Program/Keg/Sub. Keg	Indikator Kinerja	Satuan	OPD Penanggungjawab
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			
1.01	Urusan Pendidikan			
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	Nilai (AA/A/BB/C/CC/D/DD)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen (%)	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen (%)	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen (%)	
1.01.03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase sekolah yang menerapkan Mulok TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs	Persen (%)	
1.02	Urusan Kesehatan			
	Dinas Kesehatan			
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	Nilai (AA/A/BB/C/CC/D/DD)	Dinas Kesehatan
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	

Kode	Program/Keg/Sub. Keg	Indikator Kinerja	Satuan	OPD Penanggungjawab
	Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	Persen (%)	
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Presentase Sarana Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optikal, UMOT, IRTP dan TTU Mamin yang memenuhi Standar	Persen (%)	
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah	Persentase Posyandu Aktif	Persen (%)	
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	Nilai (AA/A/BB/C/CC/D/DD)	Rumah Sakit Umum Daerah
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan layanan pasien	Persen (%)	
1.03	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			Dinas PUPR
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	Nilai (AA/A/BB/C/CC/D/DD)	
1.03.02	Program	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang	Persen (%)	

Kode	Program/Keg/Sub. Keg	Indikator Kinerja	Satuan	OPD Penanggungjawab
	Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	dilayani oleh jaringan irigasi		
		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Persen (%)	
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Persen (%)	
1.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air minum layak	Persen (%)	
1.03.05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen (%)	
1.03.06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m)	Persen (%)	
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung pemerintah/ fasilitas umum dalam kondisi baik	Persen (%)	
1.03.09	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Persen (%)	
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen (%)	
1.03.11	Program	Indeks kualitas jasa konstruksi	Persen (%)	

Kode	Program/Keg/Sub. Keg	Indikator Kinerja	Satuan	OPD Penanggungjawab
	Pengembangan Jasa Konstruksi			
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Presentase Ketaatan terhadap RTRW (%)	Persen (%)	
1.04	Urusan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman			
1.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	Nilai (AA/A/BB/C/CC/D/DD)	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	Persen (%)	
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Persen (%)	
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Presentase Pengurangan Kawasan Kumuh di Bawah 10 Ha	Persen (%)	
		Persentase RTLH	Persen (%)	
1.04.04	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Tidak Layak Huni diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persen (%)	
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen (%)	

Kode	Program/Keg/Sub. Keg	Indikator Kinerja	Satuan	OPD Penanggungjawab
	Dan Utilitas Umum (Psu)			
1.05	Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat			
	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran			
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	Nilai (AA/A/BB/C/CC/D/DD)	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Prsentase penyelesaian pelanggaran K3	Persen (%)	
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	Nilai (AA/A/BB/C/CC/D/DD)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase potensi bencana alam yang diantisipasi	Persen (%)	
1.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial			

Kode	Program/Keg/Sub. Keg	Indikator Kinerja	Satuan	OPD Penanggungjawab
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	Nilai (AA/A/BB/C/CC/D/DD)	Dinas Sosial
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Kelompok di berdayakan	Persen (%)	
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen (%)	
1.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase penurunan anak terlantar dan fakir miskin (rumah tangga miskin)	Persen (%)	
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen (%)	
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang dipelihara	Persen (%)	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			
2.07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja			
2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai (AA/A/BB/C/CC/D/DD)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Program/Keg/Sub. Keg	Indikator Kinerja	Satuan	OPD Penanggungjawab
	Kabupaten/Kota			
2.07.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen (%)	
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persen (%)	
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persen (%)	
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Persen (%)	
2.08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	Nilai (AA/A/BB/C/CC/D/DD)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	Persen (%)	
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persen (%)	
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	Persen (%)	
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem	Jumlah Dokumen Data anak perempuan dan	Persen (%)	

Kode	Program/Keg/Sub. Keg	Indikator Kinerja	Satuan	OPD Penanggungjawab
	Data Gender Dan Anak	data terpilah gender yang tersedia		
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Presentase pemberdayaan lembaga perempuan dan anak	Persen (%)	
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen (%)	
2.09	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan			
2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	Nilai (AA/A/BB/C/CC/D/DD)	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Presentase Desa Mandiri Pangan	Persen (%)	
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Cadangan Pangan Masyarakat	Persen (%)	
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Persen (%)	
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	Persen (%)	
2.10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian			
2.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan	Persen (%)	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kode	Program/Keg/Sub. Keg	Indikator Kinerja	Satuan	OPD Penanggungjawab
2.10.08	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Luas Tanah Kosong yang Termanfaatkan dan/ Terkelola	m ²	
2.10.10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen (%)	
2.11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup			
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	Nilai (AA/A/BB/C/CC/D/DD)	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen wajib perencanaan lingkungan hidup	Nilai (AA/A/BB/C/CC/D/DD)	
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	Nilai (AA/A/BB/C/CC/D/DD)	
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B)	Presentase Pengelolaan Limbah B3	Nilai (AA/A/BB/C/CC/D/DD)	
2.11.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Pelaku Usaha pemilik izin Lingkungan, Izin PPLH yang terawasi	Nilai (AA/A/BB/C/CC/D/DD)	

Kode	Program/Keg/Sub. Keg	Indikator Kinerja	Satuan	OPD Penanggungjawab
	(PPLH)			
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup	Persen (%)	
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Kasus Aduan Lingkungan Yang terselesaikan	Persen (%)	
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen (%)	
2.12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	Nilai (AA/A/BB/C/CC/D/DD)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Perekaman KTP elektronik	Persen (%)	
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen (%)	
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan akta kelahiran 0-18 Tahun	Persen (%)	
		Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya di laporkan	Persen (%)	
		Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua	Persen (%)	

Kode	Program/Keg/Sub. Keg	Indikator Kinerja	Satuan	OPD Penanggungjawab
		individu yang percerainnya dilaporkan		
		Presentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	Persen (%)	
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Presentase Pemanfaatan Data	Persen (%)	
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase penyajian data kependudukan skala kabupaten dalam 1 tahun	Persen (%)	
2.13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
2.13.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	Nilai (AA/A/BB/C/CC/D/DD)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.02	Program Penataan Desa	Persentase Peningkatan Status Desa Maju (%)	Persen (%)	
2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa yang Melakukan Kerjasama Antar Desa (%)	Persen (%)	
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Presentase Bumdes yang Dibina (%)	Persen (%)	
		Persentase Desa yang tertib administrasi (%)	Persen (%)	
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Desa yang diberdayakan/dibina (%)	Persen (%)	
2.14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian			

Kode	Program/Keg/Sub. Keg	Indikator Kinerja	Satuan	OPD Penanggungjawab
	Penduduk Dan Keluarga Berencana			
2.14.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	Nilai (AA/A/BB/C/CC/D/DD)	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	TFR (Angka Kelahiran Total)	Persen (%)	
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen (%)	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen (%)	
		Menurunnya angka kelahiran menurut kelompok umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun	Persen (%)	
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Cakupan peserta KB aktif MKJP	Persen (%)	
2.14.04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Persen (%)	
2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan			
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	Nilai (AA/A/BB/C/CC/D/DD)	Dinas Perhubungan

Kode	Program/Keg/Sub. Keg	Indikator Kinerja	Satuan	OPD Penanggungjawab
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Rasio konektivitas kabupaten / kota	Rasio	
		Kinerja Lalu Lintas Kabupaten / Kota (%)	Persen (%)	
		Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 10 ribu keberangkatan	Persen (%)	
2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Meningkatnya Sarana, Informasi, Korodinasi dan Disiplin Angkutan Penyebrangan	Persen (%)	
2.15.04	Program Pengelolaan Penerbangan	Persentase Pengelolaan Penerbangan	Persen (%)	
2.16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika			
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	Nilai (AA/A/BB/C/CC/D/DD)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.02	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Layanan Publik (G2B) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan	Persen (%)	
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah	Persen (%)	
2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Persentase layanan administrasi pemerintahan (G2G) yang diimplementasikan	Persen (%)	
2.17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai (AA/A/BB/C/CC/D/DD)	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil

Kode	Program/Keg/Sub. Keg	Indikator Kinerja	Satuan	OPD Penanggungjawab
	Kabupaten/Kota			Menengah dan Perdagangan
2.17.03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (%)	Persen (%)	
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya	Persen (%)	
2.17.05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan	Persen (%)	
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Persen (%)	
2.17.08	Program Pengembangan Umkm	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Usaha Kecil	Persen (%)	
2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal			
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	Nilai (AA/A/BB/C/CC/D/DD)	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah investor berskala nasional (PMDN) (Investor)	Jumlah	
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Presentase Ketercapaian Rencata Kerja Tahunan (RKT) (%)	Persen (%)	
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Persen (%)	
		Tercapainya realisasi penanaman modal	Triliun	

Kode	Program/Keg/Sub. Keg	Indikator Kinerja	Satuan	OPD Penanggungjawab
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Presentase Ketersediaan data Penanaman Modal dan PTSP (%)	Persen (%)	
2.18.06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Perijinan yang dikeluarkan tepat waktu sesuai SOP (%)	Persen (%)	
2.19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga			
2.19.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	Nilai (AA/A/BB/C/CC/D/DD)	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Persen (%)	
		Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen (%)	
2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peningkatan Prestasi Olahraga	-	
2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif	Persen (%)	
2.20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik			
2.20.02	Oprogram Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data	Persen (%)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kode	Program/Keg/Sub. Keg	Indikator Kinerja	Satuan	OPD Penanggungjawab
		statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		
2.21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi			
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Indeks	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan			
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Kebudayaan yang di Kembangkan	Persen (%)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Penyelenggaraan Event Seni Tradisional	Persen (%)	
2.22.05	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dikestarikan	Persen (%)	
2.23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan			
2.23.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	Nilai (AA/A/BB/C/CC/D/DD)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Rasio	
2.24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan			
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Unit	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Program/Keg/Sub. Keg	Indikator Kinerja	Satuan	OPD Penanggungjawab
2.24.03	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan Arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbagai dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Unit	
2.24.04	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase naskah kuno yang dilestarikan	Persen (%)	
3	Urusan Pemerintahan Pilihan			
3.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan			
3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	Nilai (AA/A/BB/C/CC/D/DD)	Dinas Perikanan dan Kelautan
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan Tangkap (Ton)	Ton	
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan Budidaya (Ton)	Ton	
3.25.06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Usaha Pengolahan yang difasilitasi	Persen (%)	
3.26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata			
3.26.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	Nilai (AA/A/BB/C/CC/D/DD)	Dinas Pariwisata
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%)	Persen (%)	

Kode	Program/Keg/Sub. Keg	Indikator Kinerja	Satuan	OPD Penanggungjawab
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara (%)	Persen (%)	
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (%)	Persen (%)	
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Tingkat hunian akomodasi	Persen (%)	
		Persentase Pertumbuhan pelaku usaha ekonomi kreatif pendukung sektor pariwisata (%)	Persen (%)	
		Lama Tinggal Wisatawan (Length of stay)	Persen (%)	
3.27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian			
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	Nilai (AA/A/BB/C/CC/D/DD)	Dinas Pertanian
3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Prosentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	-	
		1. Padi	Persen (%)	
		2. Jagung	Persen (%)	
		Prosentase Peningkatan Produktivitas Hortikultura	Persen (%)	
		1. Bawang Merah	Persen (%)	
		2. Cabe	Persen (%)	
		3. Tomat	Persen (%)	
		Prosentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan		
		1. Kakao	Persen (%)	
		2. Kopi Arabika	Persen (%)	
3. Kopi Robusta	Persen (%)			

Kode	Program/Keg/Sub. Keg	Indikator Kinerja	Satuan	OPD Penanggungjawab
		Prosentase Peningkatan Produktivitas Peternakan		
		1. Sapi	Persen (%)	
		2. Kerbau	Persen (%)	
		3. Babi	Persen (%)	
		4. Kambing	Persen (%)	
3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase Pengembangan Infrastruktur Pertanian/Perkebunan	Persen (%)	
		Prosentase Penataan Padang Pengembalaan	Persen (%)	
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	Persen (%)	
3.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Luas Areal pengendalian dan penanggulangan Bencana OPT	Persen (%)	
		Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	Persen (%)	
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Rekomendasi teknis usaha pertanian/jumlah usaha pertanian dalam arti luas		
		a. Pertanian	Persen (%)	
		b. Perkebunan	Persen (%)	
		c. Peternakan	Persen (%)	
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Jumlah Kelompok Tani yang naik kelas	Persen (%)	

Kode	Program/Keg/Sub. Keg	Indikator Kinerja	Satuan	OPD Penanggungjawab
3.30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan			
3.30.02	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Tertib Usaha	Persen (%)	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen (%)	
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Persen (%)	
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Stabilitas dan Jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	Persen (%)	
3.30.06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	Persen (%)	
		Persentase Barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundangundangan	Persen (%)	
		persentase penanganan pengaduan konsumen	Persen (%)	
3.31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian			
3.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan non migas terhadap PDB	Persen (%)	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
		Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait.	Persen (%)	

Kode	Program/Keg/Sub. Keg	Indikator Kinerja	Satuan	OPD Penanggungjawab
		Persentase Jumlah data Industri yang masuk dalam SIIInas	Persen (%)	
3.32	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi			
3.32.02	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase penempatan transmigrasi baru yang direncanakan	Persen (%)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.32.03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi prioritas nasional yang di revitalisasi	Persen (%)	
3.32.04	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi prioritas kementerian yang di revitalisasi	Persen (%)	
4	Unsur Penunjang			
4.01	Sekretariat Daerah			
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Nilai (AA/A/BB/C/CC/D/DD)	Sekretariat Daerah
	Daerah Kabupaten/Kota			
4.01.02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Presentase Kebijakan Strategis Di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persen (%)	
4.01.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Presentase Kebijakan Strategis Di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persen (%)	
4.01.04	Program Penataan Administrasi Umum	Presentase Kebijakan Strategis Di Bidang Administrasi Umum	Persen (%)	
4.02	Sekretariat DPRD			
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	Nilai (AA/A/BB/C/CC/D/DD)	Sekretariat DPRD

Kode	Program/Keg/Sub. Keg	Indikator Kinerja	Satuan	OPD Penanggungjawab
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Persentase Rancangan Perda yang ditetapkan	Persen (%)	
4.02.02	Program Layanan Dan Administrasi Keuangan	Cakupan pelayanan kesejahteraan dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD yang ditetapkan	Persen (%)	
5	Unsur Pendukung			
5.01	Perencanaan			
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	Nilai (AA/A/BB/C/CC/D/DD)	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen (%)	
5.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi capaian program OPD mitra bidang ekonomi dan SDA	Persen (%)	
		Persentase konsistensi capaian program OPD mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persen (%)	
		Persentase konsistensi capaian program OPD mitra bidang Infrastruktur dan kewilayahan	Persen (%)	
5.02	Keuangan			
	Badan Pendapatan Daerah			
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	Nilai (AA/A/BB/C/CC/D/DD)	Badan Pendapatan Daerah

Kode	Program/Keg/Sub. Keg	Indikator Kinerja	Satuan	OPD Penanggungjawab
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap Total PAD	Persen (%)	
		Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	Persen (%)	
Badan Keuangan Dan Aset Daerah				
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	Nilai (AA/A/BB/C/CC/D/DD)	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen (%)	
		Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Persen (%)	
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen (%)	
		Persentase anggaran sisa terhadap total anggaran tahun sebelumnya	Persen (%)	
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Jumlah BMD yang terkelola dengan tertib dan baik	Persen (%)	
5.03	Kepegawaian			
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	Nilai (AA/A/BB/C/CC/D/DD)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Presentase penempatan ASN sesuai ANJAB	Persen (%)	
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat	Persen (%)	

Kode	Program/Keg/Sub. Keg	Indikator Kinerja	Satuan	OPD Penanggungjawab
		Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		
		Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan		
		Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen (%)	
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen (%)	
5.04	Pendidikan Dan Pelatihan			
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pejabat Struktural Eselon II yang Sudah Mengikuti Diklat PIM	Persen (%)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase Pejabat Struktural Eselon III yang Sudah Mengikuti Diklat PIM	Persen (%)	
		Persentase Pejabat Struktural Eselon IV yang Sudah Mengikuti Diklat PIM	Persen (%)	
5.05	Penelitian Dan Pengembangan			
5.05.02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan	Persen (%)	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
6	Unsur Pengawas			
6.01	Pengawasan			
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	Nilai (AA/A/BB/C/CC/D/ DD)	Inspektorat Daerah
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase OPD yang memenuhi maturitas SPIP	Persen (%)	

Kode	Program/Keg/Sub. Keg	Indikator Kinerja	Satuan	OPD Penanggungjawab
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase OPD yang tertib administrasi Keuangan	Persen (%)	
7	Urus Kewilayahan			
7.01	Kecamatan Poso Kota			
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	Nilai (AA/A/BB/C/CC/D/DD)	Kecamatan Poso Kota
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Persen (%)	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa	Persen (%)	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	Persen (%)	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah instansi	
7.01	Kecamatan Poso Kota Utara			
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	Nilai (AA/A/BB/C/CC/D/DD)	Kecamatan Poso Kota Utara
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks	

Kode	Program/Keg/Sub. Keg	Indikator Kinerja	Satuan	OPD Penanggungjawab
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa	Persen (%)	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	Persen (%)	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen (%)	
7.01	Kecamatan Poso Kota Selatan			
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	Nilai (AA/A/BB/C/CC/D/DD)	Kecamatan Poso Kota Selatan
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa	Persen (%)	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	Persen (%)	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah instansi	
7.01	Kecamatan Lage			
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai (AA/A/BB/C/CC/D/DD)	Kecamatan Lage

Kode	Program/Keg/Sub. Keg	Indikator Kinerja	Satuan	OPD Penanggungjawab
	Kabupaten/Kota			
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Nilai IDM Kecamatan	Indeks	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Status Desa Maju	Indeks	
		Status Desa Berkembang	Indeks	
		Status Desa Tertinggal	Indeks	
		Status Desa Sangat Tertinggal	Indeks	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	Persen (%)	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah instansi	
7.01	Kecamatan Poso Pesisir			
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	Nilai (AA/A/BB/C/CC/D/DD)	Kecamatan Poso Pesisir
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Nilai IDM Kecamatan	Indeks	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan	Status Desa Maju	Indeks	
		Status Desa Berkembang	Indeks	

Kode	Program/Keg/Sub. Keg	Indikator Kinerja	Satuan	OPD Penanggungjawab
	Pemerintahan Desa	Status Desa Tertinggal	Indeks	
		Status Desa Sangat Tertinggal	Indeks	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	Persen (%)	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah instansi	
7.01	Kecamatan Poso Pesisir Selatan			
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	Nilai (AA/A/BB/C/CC/D/DD)	Kecamatan Poso Pesisir Selatan
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Nilai IDM Kecamatan	Indeks	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Status Desa Maju	Indeks	
		Status Desa Berkembang	Indeks	
		Status Desa Tertinggal	Indeks	
		Status Desa Sangat Tertinggal	Indeks	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	Persen (%)	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah instansi	
7.01	Kecamatan Poso Pesisir Utara			

Kode	Program/Keg/Sub. Keg	Indikator Kinerja	Satuan	OPD Penanggungjawab
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	Nilai (AA/A/BB/C/CC/D/DD)	Kecamatan Poso Pesisir Utara
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Nilai IDM Kecamatan	Indeks	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Status Desa Maju	Indeks	
		Status Desa Berkembang	Indeks	
		Status Desa Tertinggal	Indeks	
		Status Desa Sangat Tertinggal	Indeks	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	Persen (%)	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah instansi	
7.01	Kecamatan Pamona Utara			
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	Nilai (AA/A/BB/C/CC/D/DD)	Kecamatan Pamona Utara
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Nilai IDM Kecamatan	Indeks	

Kode	Program/Keg/Sub. Keg	Indikator Kinerja	Satuan	OPD Penanggungjawab	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Status Desa Maju	Indeks		
		Status Desa Berkembang	Indeks		
		Status Desa Tertinggal	Indeks		
		Status Desa Sangat Tertinggal	Indeks		
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	Persen		
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah instansi		
7.01	Kecamatan Pamona Pusulemba				
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	Nilai (AA/A/BB/C/CC/D/DD)		Kecamatan Pamona Pusulemba
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Nilai IDM Kecamatan	Indeks		
7.01.06	Program Pembinaan Dan	Status Desa Maju	Indeks		
	Pengawasan Pemerintahan Desa	Status Desa Berkembang	Indeks		
		Status Desa Tertinggal	Indeks		
		Status Desa Sangat Tertinggal	Indeks		
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	Persen		
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah instansi		

Kode	Program/Keg/Sub. Keg	Indikator Kinerja	Satuan	OPD Penanggungjawab
	Pemerintahan Umum			
7.01	Kecamatan Pamona Timur			
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	Nilai (AA/A/BB/C/CC/D/DD)	Kecamatan Pamona Timur
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Nilai IDM Kecamatan	Indeks	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Status Desa Maju	Indeks	
		Status Desa Berkembang	Indeks	
		Status Desa Tertinggal	Indeks	
		Status Desa Sangat Tertinggal	Indeks	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	Persen (%)	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah instansi	
7.01	Kecamatan Pamona Tenggara			
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	Nilai (AA/A/BB/C/CC/D/DD)	Kecamatan Pamona Tenggara
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks	

Kode	Program/Keg/Sub. Keg	Indikator Kinerja	Satuan	OPD Penanggungjawab
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Nilai IDM Kecamatan	Indeks	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Status Desa Maju	Indeks	
		Status Desa Berkembang	Indeks	
		Status Desa Tertinggal	Indeks	
		Status Desa Sangat Tertinggal	Indeks	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	Persen (%)	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah instansi	
7.01	Kecamatan Pamona Selatan			
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	Nilai (AA/A/BB/C/CC/D/DD)	Kecamatan Pamona
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks	Selatan
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Nilai IDM Kecamatan	Indeks	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Status Desa Maju	Indeks	
		Status Desa Berkembang	Indeks	
		Status Desa Tertinggal	Indeks	
		Status Desa Sangat Tertinggal	Indeks	
7.01.04	Program Koordinasi	Persentase kasus ketentraman dan	Persen (%)	

Kode	Program/Keg/Sub. Keg	Indikator Kinerja	Satuan	OPD Penanggungjawab
	Ketentraman Dan Ketertiban Umum	ketertiban masyarakat yang tertangani		
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah instansi	
7.01	Kecamatan Pamona Barat			
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	Nilai (AA/A/BB/C/CC/D/DD)	Kecamatan Pamona Barat
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Nilai IDM Kecamatan	Indeks	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Status Desa Maju	Indeks	
		Status Desa Berkembang	Indeks	
		Status Desa Tertinggal	Indeks	
		Status Desa Sangat Tertinggal	Indeks	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	Persen (%)	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah instansi	
7.01	Kecamatan Lore Utara			
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai (AA/A/BB/C/CC/D/DD)	Kecamatan Lore Utara

Kode	Program/Keg/Sub. Keg	Indikator Kinerja	Satuan	OPD Penanggungjawab
	Kabupaten/Kota			
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Nilai IDM Kecamatan	Indeks	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Status Desa Maju	Indeks	
		Status Desa Berkembang	Indeks	
		Status Desa Tertinggal	Indeks	
		Status Desa Sangat Tertinggal	Indeks	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	Persen (%)	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah instansi	
7.01	Kecamatan Lore Timur			
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	Nilai (AA/A/BB/C/CC/D/DD)	Kecamatan Lore Timur
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Nilai IDM Kecamatan	Indeks	
7.01.06	Program	Status Desa Maju	Indeks	

Kode	Program/Keg/Sub. Keg	Indikator Kinerja	Satuan	OPD Penanggungjawab
	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Status Desa Berkembang	Indeks	
		Status Desa Tertinggal	Indeks	
		Status Desa Sangat Tertinggal	-	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	Persen (%)	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah instansi	
7.01	Kecamatan Lore Peore			
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	Nilai (AA/A/BB/C/CC/D/DD)	Kecamatan Lore Peore
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Nilai IDM Kecamatan	Indeks	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Status Desa Maju	Indeks	
		Status Desa Berkembang	Indeks	
		Status Desa Tertinggal	Indeks	
		Status Desa Sangat Tertinggal	Indeks	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	Persen (%)	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah instansi	
7.01	Kecamatan Lore Tengah			

Kode	Program/Keg/Sub. Keg	Indikator Kinerja	Satuan	OPD Penanggungjawab
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	Nilai (AA/A/BB/C/CC/D/DD)	Kecamatan Lore Tengah
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Nilai IDM Kecamatan	Indeks	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Status Desa Maju	Indeks	
		Status Desa Berkembang	Indeks	
		Status Desa Tertinggal	Indeks	
		Status Desa Sangat Tertinggal	Indeks	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	Persen (%)	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah instansi	
7.01	Kecamatan Lore Selatan			
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	Nilai (AA/A/BB/C/CC/D/DD)	Kecamatan Lore Selatan
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Nilai IDM Kecamatan	Indeks	

Kode	Program/Keg/Sub. Keg	Indikator Kinerja	Satuan	OPD Penanggungjawab	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Status Desa Maju	Indeks		
		Status Desa Berkembang	Indeks		
		Status Desa Tertinggal	Indeks		
		Status Desa Sangat Tertinggal	Indeks		
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	Persen (%)		
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah instansi		
7.01	Kecamatan Lore Barat				
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	Nilai (AA/A/BB/C/CC/D/DD)		Kecamatan Lore Barat
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Nilai IDM Kecamatan	Indeks		
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Status Desa Maju	Indeks		
		Status Desa Berkembang	Indeks		
		Status Desa Tertinggal	Indeks		
		Status Desa Sangat Tertinggal	Indeks		
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	Persen (%)		
7.01.05	7.01.05 Program Penyelenggaraan Urusan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Jumlah instansi		

Kode	Program/Keg/Sub. Keg	Indikator Kinerja	Satuan	OPD Penanggungjawab
	Pemerintahan Umum	Umum		
	Unsur Pemerintahan Umum			
1.05	Kesatuan Bangsa Dan Politik			
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	Nilai (AA/A/BB/C/CC/D/DD)	Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Presentase siswa Jenjang Pendidikan SLTP dan SLTA yang Mendapatkan pembinaan ideologi pancasila	Persen (%)	
		Presentase ASN yang Mendapatkan Pendidikan Bela Negara	-	
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Presentase partai politik yang mendapatkan pendidikan politik serta etika budaya politik.	Persen (%)	
8.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Presentase Ormas yang diberdayakan dan diawasi	Persen (%)	
8.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial,	Persentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi, sosial dan pelestarian budaya di 19 kecamatan.	Persen (%)	

Kode	Program/Keg/Sub. Keg	Indikator Kinerja	Satuan	OPD Penanggungjawab
	Dan Budaya			
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	persentase potensi gangguan/konflik yang tertangani	Persen (%)	

L5-4. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

No	Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
2	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.
3	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.
4	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.
5	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.
6	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.
7	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.
8	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15- 49 tahun yang berstatus kawin.
9	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.
10	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.
11	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.
12	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.
13	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.
14	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.
15	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
16	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.

No	Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
17	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.
18	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.
19	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/Madrasah Aman Bencana)
20	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.
21	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.
22	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.
23	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.
24	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.
25	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).
26	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.
27	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.
28	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.
29	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.
30	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.
31	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.
32	Prevalensi anemia pada ibu hamil.
33	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.
34	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.
35	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja). Angka Kematian Ibu (AKI).
36	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.
37	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.
38	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.
39	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.
40	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.
41	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi. Prevalensi HIV pada populasi dewasa.
42	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.
43	Kejadian Malaria per 1000 orang.
44	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.

No	Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
45	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.
46	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).
47	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.
48	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis
49	Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun.
50	Prevalensi tekanan darah tinggi.
51	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun.
52	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.
53	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa. Prevalensi penyalahgunaan narkoba.
54	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.
55	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.
56	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.
57	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.
58	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).
59	Total Fertility Rate (TFR).
60	Unmet need pelayanan kesehatan.
61	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.
62	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
63	Proporsi kematian akibat keracunan.
64	Persentase merokok pada penduduk umur 15 tahun.
65	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.
66	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.
67	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.
68	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.
69	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.
70	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.
71	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.
72	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

No	Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
73	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
74	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.
75	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.
76	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.
77	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).
78	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik. Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.
79	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.
80	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.
81	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.
82	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif. Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.
83	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.
84	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).
85	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.
86	Proporsi perempuan yang berada di posisi manajerial.
87	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.
88	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).
89	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.
90	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.
91	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.
92	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.
93	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.
94	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.
95	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.

No	Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
96	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
97	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).
98	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.
99	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.
100	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
101	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.
102	Kualitas air danau.
103	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.
104	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.
105	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
106	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.
107	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.
108	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.
109	Bauran energi terbarukan.
110	Intensitas energi primer.
111	Laju pertumbuhan PDB per kapita.
112	PDB per kapita.
113	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.
114	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.
115	Persentase tenaga kerja formal.
116	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.
117	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.
118	Upah rata-rata per jam pekerja.
119	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.
120	Tingkat setengah pengangguran.
121	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).
122	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.
123	Jumlah wisatawan mancanegara.
124	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.
125	Jumlah devisa sektor pariwisata.

No	Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
126	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.
127	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).
128	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.
129	Panjang pembangunan jalan tol.
130	Panjang jalur kereta api.
131	Jumlah dermaga penyeberangan.
132	Jumlah pelabuhan strategis.
133	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.
134	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.
135	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.
136	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.
137	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.
138	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB. Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.
139	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam
140	Proporsi individu yang menggunakan internet
141	Koefisien Gini.
142	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
143	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.
144	Jumlah desa tertinggal.
145	Jumlah Desa Mandiri.
146	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.
147	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.
148	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.
149	Indeks Kebebasan Sipil.
150	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.
151	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.
152	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
153	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).
154	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).
155	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.

No	Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
156	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.
157	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
158	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).
159	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.
160	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.
161	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.
162	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.
163	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.
164	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.
165	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).
166	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.
167	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.
168	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.
169	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.
170	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.
171	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
172	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.
173	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.
174	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.
175	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.
176	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.
177	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.
178	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.
179	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.
180	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.
181	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.
182	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.
183	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).
184	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.

No	Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
185	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).
186	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).
187	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.
188	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik
189	Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).
190	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).
191	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
192	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).
193	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.
194	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.
195	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.
196	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan.
197	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.
198	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.
199	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.
200	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.
201	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.
202	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband
203	Proporsi individu yang menggunakan internet.
204	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.
205	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
206	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
207	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.
208	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.

No	Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
209	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).
210	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.
211	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)
212	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.
213	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POSO
TAHUN 2025